

Laporan Teknis 2022



Peatland Management and Rehabilitation Project (PROPEAT)

STUDI PENGEMBANGAN DATA DASAR SOSIAL EKONOMI DI DELTA KAYAN SEMBAKUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA



implemented by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Judul: Studi Pengembangan Data Dasar Sosial Ekonomi Di Delta Kayan Sembakung Provinsi Kalimantan Utara

Diterbitkan oleh:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registered offices Bonn and Eschborn, Germany

Peatland Managment and Rehabilitation Project

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur 75121
Phone +62 (541) 741766

Kantor Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Jl. Agathis, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor
Provinsi Kalimantan Utara 77216
Phone +62 (552) 203388

Bekerjasama sama dengan:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

Tim Peneliti:

Universitas Mulawarman
Universitas KALTARA
Universitas Borneo Tarakan

Tim Peneliti:

Kartika Karlina
Nessy Rosdiana

Kredit Foto

Donny Fernando, National Geographic Indonesia (Cover)

Dicetak dan didistribusikan oleh: PROPEAT, Mei 2022

PROPEAT merupakan program yang dilaksanakan bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dengan didanai Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)

Penafian: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah dari penulis dan tidak selalu menggambarkan kebijakan resmi atau posisi GIZ atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Studi Pengembangan Data Dasar Sosial Ekonomi Di Delta Kayan Sembakung Provinsi Kalimantan Utara

Mei 2022

KATA PENGANTAR

GIZ PROPEAT merupakan kerjasama antara Pemerintah Federal Jerman dengan Pemerintah Indonesia, dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Kalimantan Utara dalam Mendorong Tata guna (pengelolaan) lahan pada ekosistem gambut dan lahan basah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara lebih berkelanjutan secara ekologis melalui perencanaan integratif, mempromosikan prinsip pengelolaan dan perlindungan berkelanjutan, pengembangan kapasitas dan mendiseminasikan pembelajaran dan praktik baik ke semua kalangan.

Lingkup dukungan dari GIZ PROPEAT pada dasarnya mulai dari pengembangan informasi dasar, fasilitasi pengembangan kebijakan, dukungan terhadap implementasi pengelolaan konsep tata guna lahan berkelanjutan, pengembangan ekonomi alternatif dan mata pencaharian dengan konsep ramah lingkungan, riset aksi, dan diseminasi berbagai pengetahuan terkait perlindungan dan pengelolaan gambut berkelanjutan.

Lanskap Delta Kayan Sembakung merupakan kawasan yang sangat unik karena mempunyai dua ekosistem gambut dan mangrove yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat di wilayah ini yang melintasi beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian, masyarakat sudah memiliki keterkaitan sosial, budaya dan ekonomi dengan sumberdaya alam khususnya yang telah disediakan oleh ekosistem mangrove.

Studi ini bertujuan untuk menyusun database tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di desa-desa yang berada di lanskap Delta Kayan Sembakung. Delta Kayan Sembakung berada di Provinsi Kalimantan Utara, merupakan lanskap yang unik karena memiliki ekosistem gambut dan juga ekosistem mangrove dan melintasi beberapa wilayah administratif. Potensinya yang besar dan dimanfaatkan dalam berbagai sektor khususnya pertanian, perkebunan serta perikanan menjadi salah satu penyumbang yang terbesar untuk perekonomian warga masyarakat lokal.

Tetapi daya dukung lingkungan dan sumber daya alam di lanskap Delta Kayan Sembakung harus dilindungi dan dikelola dengan prinsip-prinsip yang berkelanjutan, sehingga pelaksanaan studi yang telah menyusun data dasar dari warga masyarakat lokal di Kabupaten Tana Tidung, Nunukan dan Bulungan ini sangat penting. Data dasar ini akan dapat menjadi input dan masukan untuk pengembangan intervensi program dan kegiatan di lanskap Delta Kayan Sembakung, dalam rangka mempromosikan perlindungan dan pengelolaan lahan gambut dan mangrove yang berkelanjutan.

Selain berbagai data terkait aspek sosial, budaya dan ekonomi maka studi ini juga melaksanakan pendataan terkait persepsi dan motivasi masyarakat terkait dengan berbagai mata pencaharian alternatif yang mengedepankan perlindungan dan pengelolaan gambut/mangrove yang berkelanjutan. Sehingga ini dapat menjadi input dan masukan untuk penguatan kelembagaan dan kebijakan mulai dari lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan komunitas masyarakat lokal.

Publikasi ini diharapkan akan dapat menjadi referensi dari berbagai kalangan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mempromosikan perlindungan dan pengelolaan gambut dan mangrove yang berkelanjutan.

Samarinda, Mei 2022

Tunggul Butarbutar
Principal Advisor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
Daftar Gambar		vii
Daftar Istilah		viii
Bab I: Pendahuluan		
I.1. Gambaran Umum		1
I.2. Tujuan		2
I.3. Tentang Wilayah Studi		3
Bab II: Metodologi Survei		
II.1. Pendekatan		4
II.2. Metode Survei		11
Bab III: Informasi Ringkas Lokasi Penelitian		
III.1. Populasi dan Demografi		14
III.2. Dimensi Sosial Budaya		17
Bab IV: Hasil Penelitian – Orientasi Budaya		
IV.1. Tolong Menolong dan Menjaga Silaturahmi Baik Dengan Sesama		20
IV.2. Pelaksanaan Upacara Adat dan Sanksi Adat		24
IV.3. Hubungan Dengan Alam dan Hakikat Hidup		26
IV.4. Pandangan Terhadap Pekerjaan dan Barang Yang Dihasilkan		28
IV.5. Pandangan Terhadap Waktu		31
Bab V: Hasil Penelitian – Gender		
V.1. Kegiatan Domestik Dalam Rumah Tangga		33
Bab VI: Hasil Penelitian – Peran Produktif		
VI.1. Pencari Nafkah		40
VI.2. Akses Air Rumah Tangga		41
VI.3. Pengambil Kayu Bakar		42
VI.4. Penentu Jenis Komoditas Pertanian		44
VI.5. Penentu Jenis Usaha Diluar Pertanian		45
VI.4. Penentu Jenis Komoditas Pertanian		44
Bab VII: Hasil Penelitian – Aspek Sosial dan Politik		
VII.1. Anak Perempuan Yang Tidak Sekolah		48

VII.2. Wakil Dalam Musyawarah Desa	49
VII.3. Wakil Penyuluhan Pertanian/Perkebunan/ Kehutanan	50
VII.4. Wakil Dalam Penyuluhan Kesehatan	51
VII.5. Keputusan Keikutsertaan Dalam Keluarga Berencana	53
VII.6. Keputusan Pendidikan Anak	54
VII.7. Memutuskan Perkawinan Anak	55
VII.8. Prioritas Sekolah (Keadaan Terbatas)	57
	
Bab VIII: Indeks Kesejahteraan dan Kemiskinan	58
	
Bab IX: Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Mangrove dan Gambut	
IX.1. Deskripsi Hutan Mangrove dan Gambut	61
	
Bab X: Persepsi dan Motivasi	
X.1. Persepsi	87
X.2. Motivasi	94
	
Bab XI: Analisis Tentang Pendapatan Rumah Tangga dan Kemiskinan	101
	
Bab XII: Kesimpulan	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Variabel dan Indikator untuk Indeks Kesejahteraan Masyarakat.	5
Tabel 2. Nilai dan Kriteria Indeks	7
Tabel 3. Variabel dan Indikator Dimensi Sosial Budaya	7
Tabel 4. Variabel dan Indikator untuk Pemahaman Gender	8
Tabel 5. Variabel dan Indikator Pengetahuan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Mangrove Dan Gambut.	9
Tabel 6. Variabel dan Indikator untuk Persepsi dan Motivasi.	10
Tabel 7. Variabel dan Indikator untuk Pendapatan Rumah Tangga.	11
Tabel 8. Sampel Desa dan Jumlah Responden.	13
Tabel 9. Indikator Populasi di Wilayah Studi	14
Tabel 10. Potensi Hutan Mangrove dan Gambut di Delta Kayan Sembakung.	94
Tabel 11. Tingkat Pendapatan Rumah Tangga Delta Kayan Sembakung	104
Tabel 12. Kondisi Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Delta Kayan Sembakung	104
Tabel 13. Distribusi Pendapatan Penduduk Delta Kayan Sembakung	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Desa di Kawasan Delta Kayan dan Delta Sembakung Desa-desa Tersebut Terletak Pada 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan.	3
Gambar 2	Model <i>Nested Spheres of Poverty</i> (NESP)	4
Gambar 3	Lokasi Pelaksanaan Survei	12
Gambar 4	Jumlah Penduduk di 22 Desa Yang Menjadi Lokasi Survey Penelitian	14
Gambar 5	Jumlah Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²) di 22 Desa yang Menjadi Lokasi Survey Penelitian	15
Gambar 6	Komposisi Etnis di Kawasan Delta Kayan Sembakung	18
Gambar 7	Komposisi Etnis di Kawasan Delta Kayan-Sembakung Berdasarkan Wilayah Administratif	19
Gambar 8	Membantu <i>Hajatan</i> Masyarakat Desa di Kawasan Delta Kayan-Sembakung	21
Gambar 9	Membantu <i>Hajatan</i> Masyarakat Desa di Tiga Wilayah Studi	22
Gambar 10	Keterlibatan dalam Gotong Royong di Kawasan Delta Kayan Sembakung	22
Gambar 11	Keterlibatan dalam Gotong Royong Berdasarkan Wilayah Studi	23
Gambar 12	Menjalin Hubungan Baik dengan Sesama Warga	24
Gambar 13	Tingkat Tolong Menolong Masyarakat di Kawasan Delta Kayan-Sembakung	25
Gambar 14	Tingkat Tolong Menolong Masyarakat Berdasarkan Wilayah Studi	25
Gambar 15	Pelaksanaan Upacara Adat	27
Gambar 16	Sanksi Adat	28
Gambar 17	Hubungan dengan Alam	29
Gambar 18	Peran Alam/Lingkungan dalam Mendukung Kehidupan Keluarga	29
Gambar 19	Peran Alam/Lingkungan dalam Mendukung Kehidupan Rumahtangga	30
Gambar 20	Hakikat Hidup	31
Gambar 21	Hakikat Hidup Masyarakat pada Masing-masing Wilayah Studi	31
Gambar 22	Pandangan terhadap Pekerjaan, Perilaku dan Benda	32
Gambar 23	Pandangan terhadap Pekerjaan, Perilaku dan Benda	33
Gambar 24	Penghargaan terhadap Barang yang Dibuat	33
Gambar 25	Penghargaan terhadap Barang	34
Gambar 26	Pandangan Hidup terhadap Waktu di Kawasan Delta Kayan Sembakung	34

Gambar 27	Pandangan Hidup terhadap Waktu pada Masing-masing Wilayah Studi	35
Gambar 28	Usia Suami Menikah di Kawasan Delta Kayan Sembakung	36
Gambar 29	Usia Suami Menikah di Wilayah Studi	37
Gambar 30	Usia Istri Menikah di Kawasan Delta Kaya Sembakung	37
Gambar 31	Usia Istri Menikah di Wilayah Studi	38
Gambar 32	Pengasuh Balita dalam Rumahtangga di Kawasan Delta Kayan Sembakung	39
Gambar 33	Pengasuh Balita dalam Rumahtangga di Wilayah Studi	40
Gambar 34	Yang Bertugas Membersihkan Rumah di Kawasan Delta Kayan Sembakung	40
Gambar 35	Yang Bertugas Membersihkan Rumah di Wilayah Studi	41
Gambar 36	Pengatur Menu Masakan dalam Rumahtangga	41
Gambar 37	Pengatur Menu Masakan dalam Rumahtangga di Wilayah Studi	42
Gambar 38	Urutan Pembagian Makan dalam Rumahtangga	43
Gambar 39	Urutan Pembagian Makan dalam Rumahtangga	44
Gambar 40	Pencari Nafkah dalam Rumahtangga	44
Gambar 41	Pencari Nafkah dalam Rumahtangga di wilayah studi	45
Gambar 42	Akses Memperoleh Air untuk Rumahtangga	46
Gambar 43	Akses Memperoleh Air di Wilayah Studi	47
Gambar 44	Pengambil Kayu Bakar	47
Gambar 45	Pengambil Kayu Bakar di Wilayah Studi	48
Gambar 46	Penentu Jenis Komuditas Pertanian	49
Gambar 47	Penentu Jenis Komuditas Pertanian di Wilayah Studi	50
Gambar 48	Penentu Jenis Usaha diluar Sektor Pertanian	50
Gambar 49	Penentu Jenis Usaha diluar Sektor Pertanian di Wilayah Studi	51
Gambar 50	Anak Perempuan Usia 7 Sampai 9 yang Tidak Sekolah	52
Gambar 51	Anak Perempuan Usia 7 Sampai 9 yang Tidak Sekolah di Wilayah Studi	53
Gambar 52	Wakil dalam Musyawarah Desa	53
Gambar 53	Wakil dalam Musyawarah Desa di Wilayah Studi	54
Gambar 54	Wakil Penyuluhan Pertanian/ Kehutanan/ Perkebunan	55
Gambar 55	Wakil Penyuluhan Pertanian/ Kehutanan/ Perkebunan di Wilayah Studi	55
Gambar 56	Wakil dalam Penyuluhan kesehatan	56
Gambar 57	Wakil dalam Penyuluhan kesehatan di Wilayah Studi	57
Gambar 58	Keputusan keikutsertaan Keluarga Berencana	57
Gambar 59	Keputusan keikutsertaan Keluarga Berencana di Wilayah Studi	58
Gambar 60	Keputusan Pendidikan Anak	59
Gambar 61	Keputusan Pendidikan Anak di Wilayah Studi	59
Gambar 62	Keputusan Perkawinan Anak di Wilayah Studi	61
Gambar 63	Prioritas Sekolah (keadaan terbatas)	61

Gambar 64	Prioritas Sekolah (keadaan terbatas) di Wilayah Studi	63
Gambar 65	Model Kesejahteraan Masyarakat Delta Kayan Sembakung	64
Gambar 66	Model Kesejahteraan pada Kabupaten Bulungan, Tana Tidung dan Nunukan	65
Gambar 67	Kondisi Lingkungan Ekonomi Desa-Desa Survei	65
Gambar 68	Model NESP Lingkungan Alam	67
Gambar 69	Model NESP Lingkungan Politik	68
Gambar 70	Model NESP Sarana dan Pelayanan	69
Gambar 71	Pengetahuan Masyarakat mengenai Keberadaan Mangrove/ Gambut di Delta Kayan Sembakung	72
Gambar 72	Perbandingan Pengetahuan Tentang Keberadaan Hutan Mangrove/ Gambut di Tiga Kabupaten Penelitian	72
Gambar 73	Pengetahuan Masyarakat mengenai Fungsi Hutan Mangrove/ Gambut di Delta Kayan Sembakung	73
Gambar 74	Pengetahuan Masyarakat mengenai Fungsi Hutan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung di Tiga Kabupaten Penelitian	73
Gambar 75	Intensitas Kunjungan Kehutan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung	74
Gambar 76	Intensitas Kunjungan Kehutan Mangrove/Gambut di Tiga Kabupaten Penelitian	74
Gambar 77	Pengetahuan Masyarakat tentang Jenis Hutan Mangrove/ Gambut di Delta Kayan Sembakung	75
Gambar 78	Pengetahuan Masyarakat tentang Jenis Hutan Mangrove/ Gambut di Delta Kayan Sembakung	75
Gambar 79	Pengetahuan Masyarakat mengenai manfaat keberadaan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung	76
Gambar 80	Perbandingan Pengetahuan Tentang manfaat keberadaan Hutan Gambut/Mangrove di Tiga Kabupaten Penelitian	76
Gambar 81	Dukungan terhadap pelestarian Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung	77
Gambar 82	Perbandingan Dukungan terhadap pelestarian Hutan Gambut/Mangrove di Tiga Kabupaten Penelitian	77
Gambar 83	Kegiatan Pengelolaan Mangrove/ Gambut di Delta Kayan Sembakung	78
Gambar 84	Perbandingan Kegiatan Pengelolaan Hutan Gambut/Mangrove di tiga Kabupaten Penelitian	78
Gambar 85	Pelaksana Kegiatan terkait Pengelolaan Hutan Gambut/Mangrove	79
Gambar 86	PelaksanaKegiatan terkait Pengelolaan Hutan Gambut/Mangrove di Tiga Kabupaten Penelitian	79
Gambar 87	Bentuk Kegiatan Terkait Pengelolaan Mangrove/Gambut	79
Gambar 88	Keterlibatan dalam Kegiatan terkait Pengelolaan Hutan Gambut/ Mangrove	80
Gambar 89	Keterlibatan dalam Kegiatan terkait Pengelolaan Hutan Gambut/ Mangrove di Tiga Kabupaten Penelitian	80

Gambar 90	Bentuk Keterlibatan dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan Gambut/ Mangrove	81
Gambar 91	Bentuk Keterlibatan dalam Kegiatan Pengelolaan Hutan Gambut/ Mangrove di Tiga Kabupaten	81
Gambar 92	Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Hutan Gambut/Mangrove	82
Gambar 93	Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan di Tiga Kabupaten Penelitian	82
Gambar 94	Manfaat Hutan bagi Kesejahteraan Masyarakat	82
Gambar 95	Manfaat Hutan bagi Kesejahteraan Masyarakat di Tiga Kabupaten Penelitian	82
Gambar 96	Manfaat Hutan bagi Kelestarian	83
Gambar 97	Manfaat Hutan bagi Kelestarian di Tiga Kabupaten Penelitian	83
Gambar 98	Bentuk Kegiatan Terkait Pengelolaan Mangrove/Gambut	84
Gambar 99	Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Gambut dan Mangrove	84
Gambar 100	Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Gambut dan Mangrove di Tiga Kabupaten Penelitian	84
Gambar 101	Pemanfaatan Mangrove dan Gambut Sebagai Sumber Pendapatan Utama Masyarakat	86
Gambar 102	Pemanfaatan Mangrove dan Gambut Sebagai Sumber Pendapatan Utama Masyarakat di Tiga Kabupaten Penelitian	86
Gambar 103	Sebagai Sumber Penghasilan Sampingan	87
Gambar 104	Sebagai Sumber Penghasilan Sampingan di Tiga Kabupaten Penelitian	87
Gambar 105	Produktivitas Sumber Daya Hutan Gambut/Mangrove di Delta Kayan Sembakung	87
Gambar 106	Produktivitas Sumber Daya Hutan Gambut/Mangrove di Tiga Kabupaten Penelitian	87
Gambar 107	Pemilikan/Penguasaan/ Pengelolaan Hutan/Lahan Gambut di Delta Kayan Sembakung	88
Gambar 108	Pemilikan/Penguasaan/ Pengelolaan Hutan/Lahan Gambut di Delta Kayan Sembakung di tiga Kabupaten Kota	88
Gambar 109	Luas Lahan Gambut yang dikuasai di Delta Kayan Sembakung	89
Gambar 110	Luas Lahan Gambut yang dikuasai di Delta Kayan Sembakung pada Tiga Kabupaten Penelitian	89
Gambar 111	Kepemilikan/ Penguasaan/Dan Pengelolaan Lahan Mangrove di Delta Kayan Sembakung	89
Gambar 112	Kepemilikan/ Penguasaan/Dan Pengelolaan Lahan Mangrove di Delta Kayan Sembakung pada Tiga Kabupaten	89
Gambar 113	Luas Lahan Mangrove yang dimiliki Masyarakat	90
Gambar 114	Luas Lahan Mangrove yang dimiliki Masyarakat di Tiga Kabupaten Penelitian	90
Gambar 115	Lama memiliki/ Menguasai/Mengelola Lahan Gambut/ Mangrove di Delta Kayan Sembakung	90
Gambar 116	Lama Memiliki/ Menguasai/ Mengelola Lahan Gambut/Mangrove di Tiga Kabupaten Penelitian	90

Gambar 117	Luasan Total Kepemilikan/ Menguasai/ Mengelola Lahan Gambut/ Mangrove di Tiga Kabupaten Penelitian	91
Gambar 118	Pemanfaatan Lahan Gambut di Delta Kayan Sembakung	91
Gambar 119	Pemanfaatan Lahan Gambut di Delta Kayan Sembakung di Tiga Kabupaten Penelitian	92
Gambar 120	Pemanfaatan Lahan Mangrove di Delta Kayan Sembakung	92
Gambar 121	Pemanfaatan Lahan Mangrove di Tiga Kabupaten Penelitian	92
Gambar 122	Pemanfaatan Lahan Gambut yang Paling Luas di Delta Kayan Sembakung	92
Gambar 123	Pemanfaatan Lahan Gambut yang Paling Luas Di Tiga Kabupaten Penelitian	93
Gambar 124	Pemanfaatan Komoditas Pertanian yang dibudidayakan di Delta Kayan Sembakung	93
Gambar 125	Pemanfaatan Komoditas Pertanian yang dibudidayakan di Delta Kayan Sembakung di Tiga Kabupaten Penelitian	94
Gambar 126	Pemanfaatan Lahan Mangrove yang Paling Luas di Delta Kayan Sembakung	94
Gambar 127	Pemanfaatan lahan Mangrove yang Paling Luas di Delta Kayan Sembakung di Tiga Kabupaten Penelitian	94
Gambar 128	Pemanfaatan Gambut Yang Paling Menguntungkan dan Dampak Rendah (3 Jawaban Terbaik)	94
Gambar 129	Pemanfaatan Gambut Yang Paling Menguntungkan dan Dampak Rendah (3 Jawaban Terbaik) di Tiga Kabupaten Penelitian	95
Gambar 130	Pemanfaatan Mangrove Yang Paling Menguntungkan dan Dampak Rendah (3 Jawaban Terbaik)	89
Gambar 131	Pemanfaatan Mangrove Yang Paling Menguntungkan dan Dampak Rendah (3 Jawaban Terbaik) Di Tiga Kabupaten Penelitian	95
Gambar 132	Hal Penting Yang Dilakukan Agar Produksi Tinggi Berdasarkan Pengalaman di Delta Kayan Sembakung	96
Gambar 133	Hal Penting Yang Dilakukan Agar Produksi Tinggi Berdasarkan Pengalaman di Delta Kayan Sembakung (3 Kabupaten Penelitian)	96
Gambar 134	Persepsi Sumberdaya Mangrove/Gambut sebagai Garapan Budidaya Pertanian dan Perikanan	97
Gambar 135	Persepsi Sumberdaya Mangrove/Gambut sebagai Sumber Hasil Hutan Kayu	98
Gambar 136	Persepsi Sumberdaya Mangrove/Gambut sebagai Sumber Hasil Hutan Non Kayu	98
Gambar 137	Persepsi Sumberdaya Mangrove/Gambut sebagai Sumber Air	99
Gambar 138	Persepsi Sumberdaya Mangrove/Gambut dalam Perlindungan Terhadap Angin	99
Gambar 139	Persepsi Sumberdaya Mangrove/Gambut dalam Mencegah Banjir	100
Gambar 140	Persepsi Sumberdaya Mangrove/Gambut dalam Mencegah Erosi dan Sedimentasi	100
Gambar 141	Persepsi Sumberdaya Mangrove/Gambut sebagai Pengatur Tata Air	101

Gambar 142	Persepsi Terhadap Mangrove/Gambut sebagai Pelestarian Plasma Nutfah	101
Gambar 143	Persepsi terhadap Mangrove/Gambut sebagai Tempat Olahraga	102
Gambar 144	Persepsi Sumberdaya Mangrove/Gambut sebagai Tempat Rekreasi	103
Gambar 145	Persepsi Sumberdaya Mangrove/Gambut sebagai Tempat Pelaksanaan Upacara Adat	103
Gambar 146	Persepsi Sumberdaya Mangrove/Gambut sebagai Keindahan Pemandangan	104
Gambar 147	Persepsi Sumberdaya Mangrove/Gambut sebagai Habitat Berbagai Jenis Tumbuhan	105
Gambar 148	Persepsi Sumberdaya Mangrove/Gambut sebagai Habitat Berbagai Jenis Hewan	105
Gambar 149	Persepsi Sumberdaya Mangrove/Gambut sebagai Habitat Tumbuhan dan Hewan	106
Gambar 150	Kebutuhan Memperoleh Pendapatan dari Pemanfaatan Lahan (Tanah)	107
Gambar 151	Kebutuhan Memperoleh Pendapatan dari Hasil Hutan Kayu	107
Gambar 152	Kebutuhan Memperoleh Pendapatan dari Hasil Hutan Non Kayu	108
Gambar 153	Kebutuhan Memperoleh Pendapatan dari Pemanfaatan Air	108
Gambar 154	Kebutuhan Memperoleh Insentif Pemerintah	109
Gambar 155	Kebutuhan Memperoleh Insentif Pemerintah	109
Gambar 156	Kebutuhan Akan Pengakuan dari Pihak Lain (Kebanggaan Sosial)	110
Gambar 157	Kebutuhan Berkontribusi pada Komunitas	110
Gambar 158	Kebutuhan Memperoleh Eksistensi Konservasi SDA	111
Gambar 159	Kebutuhan untuk Menjalankan Ajaran Agama	111
Gambar 160	Kebutuhan untuk Mengurangi Banjir	112
Gambar 161	Kebutuhan untuk Mengurangi Erosi (Konservasi Tanah/Lahan)	112
Gambar 162	Kebutuhan untuk Memperoleh Daerah Tangkapan Air (Sumber Air)	113
Gambar 163	Kebutuhan untuk Pengembangan Ekowisata (wisata Lingkungan)	113
Gambar 164	Kebutuhan untuk Memperbaiki Kualitas Sumberdaya Hutan Tumbuhan, Hewan, dan Lingkungan	115
Gambar 165	Pendapatan Rumah Tangga Delta Kayan Sembakung	116
Gambar 166	Pendapatan Rumah Tangga dan Garis Kemiskinan Delta Kayan Sembakung	116

DAFTAR SINGKATAN

BAPPEDALitbang	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPS	Biro Pusat Statistik
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
KKMsB	Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
LPMD	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
NGO	<u><i>Non Government Organization</i></u>
PERDA	Peraturan Daerah
PERDES	Peraturan Desa
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
Pokdarwis	Kelompok Sadar Wisata
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah

BAGIAN I: PENDAHULUAN

I.1. GAMBARAN UMUM

Lahan basah merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki ekosistem produktif dan keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Lahan basah ini memiliki banyak fungsi mulai dari menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi emisi gas rumah kaca, menyediakan mata pencaharian sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar, dan melindungi daratan dari bencana alam. Lahan basah dalam terminologi Konvensi Ramsar (2 Februari 1971) merupakan daerah rawa (termasuk rawa bakau/mangrove), payau, lahan gambut, dan perairan, baik alami atau buatan dengan air yang tergenang atau mengalir berupa air tawar, payau atau asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu surut.

Hutan mangrove adalah salah satu jenis lahan basah yang banyak terdapat di Indonesia, yang juga memiliki banyak fungsi untuk lingkungannya. Mulai dari fungsi ekologis untuk menjaga garis pantai tetap stabil, melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi dan abrasi, menahan badai atau angin kencang dari laut, menahan hasil proses penimbunan lumpur, menyerap karbondioksida dan menghasilkan oksigen. Dalam konteks ekonomi maka hutan mangrove juga berperan sebagai sumber pangan seperti ikan, udang, kerang, kepiting, udang. Bahkan potensi satwa, kerajinan dari bahan mangrove maupun ekowisata berbasis mangrove merupakan salah satu sumberdaya ekonomi.

Kategori lahan basah lainnya yang juga banyak terdapat di wilayah Indonesia adalah lahan gambut yang memiliki banyak istilah padanan dalam bahasa asing antara lain yaitu *peat*, *bog*, *moor*, *mire*, atau *fen*. Gambut adalah material ataupun bahan organik yang tertimbun secara alami dalam keadaan basah berlebihan, bersifat tidak mampat dan relatif tidak atau hanya sedikit mengalami perombakan. Gambut terbentuk dari timbunan sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Timbunan ini terus bertambah karena proses dekomposisi terhambat oleh kondisi *anaerob* dan/atau kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan biota pengurai.

Pembentukan dari tanah gambut merupakan proses *geogenik*, yaitu pembentukan tanah yang disebabkan oleh proses deposisi dan transportasi yang berbeda dengan pembentukan tanah mineral yang umumnya melalui proses *pedogenik*. Gambut menyimpan cadangan karbon lebih banyak dibandingkan dengan hutan atau jenis tanah lainnya, sehingga upaya kelestariannya akan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Pada musim hujan, maka gambut menyimpan banyak air. Sementara di musim kemarau, maka tanah gambut melepaskan air secara perlahan-lahan untuk pasokan air yang menjadi tempat tinggal ikan sebagai sumber makanan dan pendapatan.

Delta Kayan Sembakung di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) adalah ekosistem lahan basah yang terdiri dari lahan gambut dan hutan mangrove serta secara fisik didominasi oleh unit fisiografi rawa pasang surut. Saat ini, kawasan tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas manusia khususnya aktivitas budidaya pertanian dan budidaya perikanan. Konsekuensi kegiatan budidaya pada lahan gambut dan hutan mangrove ini adalah pembukaan lahan (hutan), sehingga mendorong penurunan luasan ekosistem lahan gambut dan hutan mangrove. Konversi ini berdampak kepada menurunnya peranan ekosistem lahan gambut dan hutan mangrove bagi keseimbangan lingkungan dan fungsinya penyangga kehidupan.

Sebelum tahun 2011, kawasan Delta Kayan Sembakung memiliki kawasan mangrove terluas di Provinsi Kalimantan Utara. Kawasan ini bernilai ekonomi tinggi bagi warga masyarakat dengan pemanfaatannya sebagai areal tambak terutama untuk pengusahaan udang windu. Sampai tahun 2016,

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara mencatat luasan lahan tambak di Provinsi Kalimantan Utara tersebut telah mencapai 149.958 hektar. Tambak tersebut sebagian besar berada di dalam kawasan mangrove Delta Kayan Sembakung, yang kepemilikannya telah diklaim sebagai kepemilikan pribadi oleh beberapa oknum masyarakat. Fenomena ini menunjukkan terjadi pembukaan hutan mangrove yang mengarah kepada deforestasi dan degradasi kawasan mangrove, yang pada akhirnya dapat memicu konsekuensi ekologis berupa penurunan fungsi lindung dan fragmentasi habitat secara masif.

Menyusutnya ekosistem lahan gambut dan hutan mangrove telah menyebabkan terjadinya penyempitan habitat, sehingga mengancam kelestarian satwa-satwa liar. Selain itu, degradasi lahan gambut dan hutan mangrove juga berakibat kepada menurunnya kualitas lingkungan kawasan Delta Kayan Sembakung. Kondisi ini kemudian berdampak buruk terhadap produktivitas pertanian dan hasil perikanan itu sendiri. Sebagai contoh kasus, adalah penurunan kualitas ekosistem akibat praktik budidaya perikanan yang tidak ramah lingkungan adalah kecenderungan terancamnya pemasaran produk udang windu di pasar Internasional karena tidak memenuhi persyaratan sertifikasi produk budidaya perikanan berkelanjutan.

Berbagai permasalahan dalam pemanfaatan lahan basah (lahan gambut dan hutan mangrove) memunculkan kebutuhan terhadap sebuah studi ilmiah yang akan dapat menjadi rekomendasi bagi pengelolaan berkelanjutan untuk lahan gambut dan hutan mangrove di Delta Kayan Sembakung.

1.2. TUJUAN

Kegiatan studi ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data akurat yang mencakup sosial, ekonomi, budaya, lingkungan masyarakat, serta praktik-praktik pemanfaatan lahan gambut dan mangrove di daerah Delta Kayan-Sembakung.

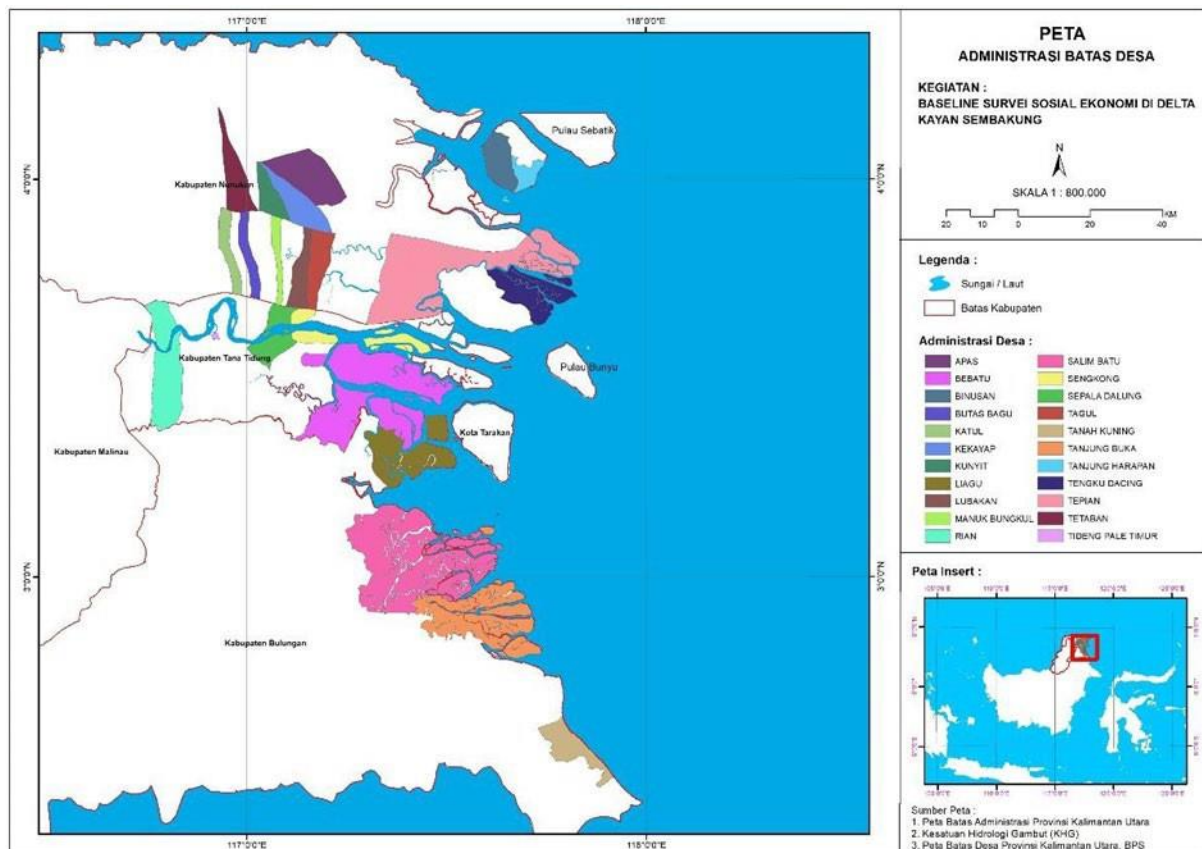
Secara khusus, tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Membuat data dasar sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan masyarakat yang berlokasi disekitar Delta Kayan-Sembakung;
- b. Menganalisis indeks kesejahteraan masyarakat di sekitar Delta Kayan- Sembakung;
- c. Mengidentifikasi praktik-praktik pemanfaatan lahan gambut dan mangrove di Delta Kayan-Sembakung;
- d. Menganalisis persepsi dan motivasi masyarakat terhadap pengelolaan lahan gambut dan mangrove yang berkelanjutan di Delta Kayan-Sembakung;
- e. Mendesain rencana program dan kegiatan pengelolaan gambut dan mangrove yang berkelanjutan di Delta Kayan-Sembakung.

1.3. TENTANG WILAYAH STUDI

Lanskap Delta Kayan Sembakung adalah satu kesatuan ekosistem mangrove yang secara fisik didominasi oleh unit fisiografi rawa pasang surut dengan luas mencapai 581.529, 14 Ha yang meliputi 4 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan.

Fokus utama dalam studi ini adalah desa-desa yang berada disekitar Delta Kayan Sembakung, yang dapat ditunjukkan melalui gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Desa di Kawasan Delta Kayan dan Delta Sembakung yang terletak di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan.

BAGIAN II: METODOLOGI

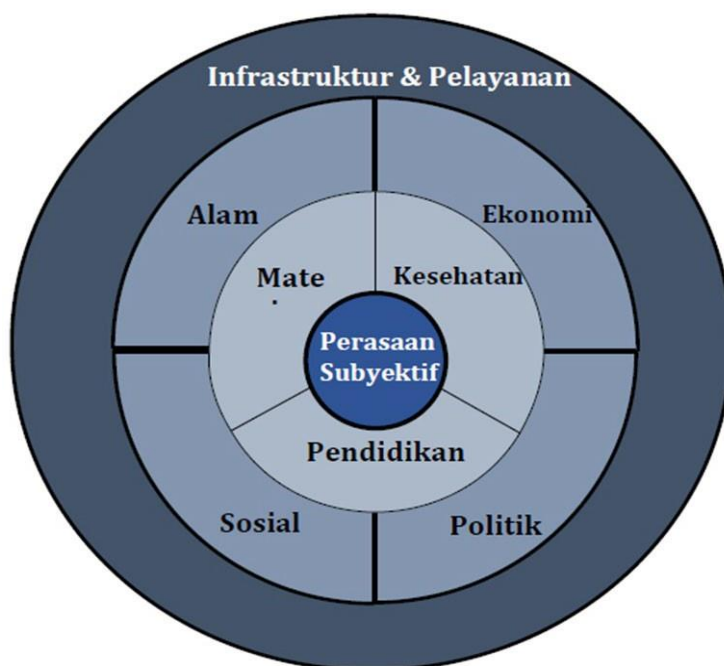
II.1. PENDEKATAN

II.1.1. Konsep dan Terminologi

Kajian yang dilakukan mencakup keadaan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan masyarakat, dan praktik pemanfaatan lahan gambut dan mangrove di Delta Kayan-Sembakung. Untuk mencapai tujuan ini maka digunakan beberapa pendekatan, dimana salah satunya adalah metode untuk dapat memahami kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan masyarakat di Delta Kayan Sembakung. Pendekatan utama adalah *Nested Sphere of Poverty* (NESP), yakni sebuah pendekatan survei untuk Pemahaman Kesejahteraan masyarakat di Delta Kayan dan Sembakung, yang menjelaskan bahwa kesejahteraan dipengaruhi oleh berbagai lingkungan beserta aspek kehidupan yang ada di dalamnya.

Menurut model NESP, maka kesejahteraan akan terdiri dari berbagai lingkungan dan aspek kehidupan sehari-hari yang berbeda-beda. Lingkungan tengah dalam model ini adalah kesejahteraan subjektif, sementara lingkungan inti yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif adalah kesehatan, kekayaan materi dan pengetahuan. Ketiga hal ini secara tidak langsung mendorong kesejahteraan subjektif dipengaruhi lingkungan konteksnya. Yang dimaksud dengan lingkungan konteks adalah terkait alam, ekonomi, sosial dan politik kehidupan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi lingkungan inti.

Dalam konteks ini, maka lingkungan konteks akan dipengaruhi oleh prasarana dan layanan. Kategori-kategori yang disajikan dalam model NESP ini bersifat komprehensif, mencakup kebutuhan dasar dan juga kondisi lingkungan pendukung. Ilustrasi tentang model NESP adalah sebagaimana disajikan dalam Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Model *Nested Spheres of Poverty* (NESP).

Keberadaan warga masyarakat di sekitar hutan mangrove/gambut akan memberi pengaruh terhadap kondisi sumberdaya alam tersebut, terutama berkaitan dengan upaya pemanfaatannya. Oleh karena itu, maka kajian ini juga ditujukan untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan, praktik-praktik pemanfaatan, persepsi dan motivasi pemanfaatan maupun penilaian masyarakat terhadap kondisi eksisting sumberdaya hutan mangrove/ gambut.

II.1.2. Indikator dan Analisis Data

Untuk dapat menjawab beberapa tujuan dalam kegiatan ini, maka telah disusun indikator-indikator yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.

II.1.2.A. Indeks Kesejahteraan Masyarakat dan Status Kemiskinan

Indikator adalah elemen penting dari proses pemantauan yang akan menentukan kualitas pemantauan. Untuk memperoleh informasi kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan NESP ini, maka digunakan indikator yang telah disusun dalam Cahyat *et.al*(2007).

Indikator kemiskinan menyampaikan informasi tentang aspek kemiskinan yang mungkin berubah seiring waktu sebagai contohnya adalah indikator kesehatan membawa informasi tentang kesehatan orang, sementara indikator kemiskinan komposit akan mencerminkan situasi kemiskinan rumah tangga secara keseluruhan pada waktu tertentu.

Tabel 1. Variabel dan Indikator untuk Indeks Kesejahteraan Masyarakat.

Variabel	Indikator
Gizi dan Kesehatan	13. Sakit Parah
	14. Pelayanan Medis
	15. Pemeriksaan Medis Ibu Hamil
	16. Pertolongan Ibu Melahirkan
	17. Pemenuhan Kebutuhan
	18. Konsumsi Daging/ Telur/ Ikan/ Ayam
	19. Sumber Air Minum
Pengetahuan	21. Tingkat Pendidikan
	22. Anak Usia 7 - 18 Tahun yang Bersekolah
	23. Buta Huruf
	24. Tidak Dapat Berbahasa Indonesia
	25. Keterampilan dan Pengetahuan di Luar Pertanian dan Nelayan
	26. Akses Informasi
Kepemilikan Materi	27. Kondisi Fisik Rumah
	28. Kepemilikan Pakaian Untuk Kepentingan Sehari-Hari dan Acara Khusus
	29. Kepemilikan (sepeda motor, TV, Lemari Es, Chainsaw, Wc dalam Rumah)
	30. Listrik
	31. Bahan Bakar Memasak
	33. Kesejahteraan RT Dibandingkan dengan RT Lain
	34. Kondisi RT Di Masa Mendatang

Variabel	Indikator
Lingkungan Ekonomi	41. Kesulitan Membeli Gula Pasir (Dalam 12 Bulan Terakhir)
	42. Sumber Pendapatan
	43. a. Jumlah Sumber Pendapatan b. Sumber Pendapatan Tetap
	44. Peluang Mencari Nafkah
	45. Kemampuan Menabung (12 Bulan Terakhir)
	46. Kepemilikan Sawah/ Ladang/ Kebun
Lingkungan Politik	47. Keterlibatan/ Keterwakilan Dalam Pengambilan Keputusan Desa
	48. Kepastian Penguasaan Lahan Di Desa
	49. Penerapan Aturan Lokal
Lingkungan Sosial	50. Sengketa Lahan/ Konflik Lainnya
	51. Tingkat Kepercayaan Antar Warga
	52. Keterlibatan RT Dalam Gotong Royong Di Desa
	53. Persahabatan Anak Dengan Suku Yang Berbeda
	54. Persahabatan Anak Dengan Agama Yang Berbeda
Lingkungan Alam	55. Keadaan Alam Saat Ini
	56. Banjir/ Longsor/ Kebakaran Hutan/ Serangan Hama (12 Bulan Terakhir)
	57. Kualitas Air Sungai, Danau Dan Mata Air
	58. Keberadaan Bekantan/ Burung Enggang/ Gajah Pigma
	59. Jumlah Kayu Dan Tumbuhan Di Hutan
	60. Penebangan Liar/ Penebangan Yang Merusak Hutan
Sarana dan Pelayanan	61. Akses Menuju SMP Terdekat
	62. Kegiatan Belajar Mengajar Di Sekolah
	63. Pelayanan Kesehatan Yang Biasa Dikunjungi Masyarakat
	64. Kondisi Jalan/ Jembatan
	65. Pelatihan, Penyuluhan, Kursus Dan Pendampingan Usaha (12 Bulan Terakhir)
	66. Pelaksanaan Program Pembangunan Dari Pemkab (1 Tahun Terakhir)
	67. Pelaksanaan Program Pembangunan Desa (5 Tahun Terakhir)
Kesejahteraan Subyektif	68. Perasaan Sejahtera
	69. Perasaan Miskin
	70. Perasaan Bahagia

Sumber: Cahyat, et.al (2007).

Setelah proses pengumpulan data berdasarkan indikator tersebut diatas selesai dilakukan, maka dilakukan perhitungan terhadap sembilan indeks dasar yang terdiri dari:

- a. Kesejahteraan subyektif,
- b. Kekayaan materi,
- c. Kesehatan,
- d. Pendidikan,
- e. Lingkungan ekonomi,
- f. Lingkungan alam,

- g. Lingkungan politik,
- h. Lingkungan sosial,
- i. Sarana dan Pelayanan.

Nilai indeks dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh} - \text{Jumlah skor minimum}}{\text{Jumlah skor maksimum} - \text{Jumlah skor minimum}} \times 100$$

Berikut adalah contoh perhitungan menggunakan Nilai indeks:

Tabel 2. Nilai dan Kriteria Indeks

Kode Indikator	Uraian	Skor yang dipilih	Skor Minimum	Skor Maksimum
12	Perasaan sejahtera	2	1	3
20	Perasaan miskin	1	1	3
32	Perasaan bahagia	3	1	3
	Jumlah	6	3	9

Maka nilai indeks kesejahteraan subyektif adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks} = \frac{6 - 3}{9 - 3} \times 100 = 50$$

Penentuan klasifikasi setiap orang/desa akan ditentukan dengan kategorisasi sebagai berikut:

Kritis	=	0 - 45
Sedang	=	46 - 54
Baik	=	55 - 100

II.1.2.8. Dimensi Sosial dan Budaya

Dimensi sosial budaya akan memberi gambaran terhadap karakteristik dasar rumah tangga, etnis, bahasa, dan kehidupan sosial budaya dari warga masyarakat.

Gambaran terhadap sosial budaya dari masyarakat diukur dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 3. Variabel dan Indikator Dimensi Sosial Budaya

Variabel	Indikator
Data dasar RT	3. Jumlah Anggota Rumahtangga 4. Jumlah Keluarga 5. Jumlah Laki-Laki Dewasa Usia ≥ 17 Tahun 6. Jumlah Perempuan Dewasa Usia ≥ 17 Tahun 7. Jumlah Anak Laki-Laki Usia < 17 Tahun 8. Jumlah Anak Perempuan Usia < 17 Tahun 9. Suku Mayoritas Keluarga 10. Yatim Piatu/ Janda/ Cacat 11. Masa tinggal
Budaya	87. Datang Membantu Acara Hajatan Masyarakat Desa 88. Apakah Warga Desa Saling Tolong Menolong 89. Ikut Terlibat Kegiatan Gotong Royong 90. Upacara Adat Di Desa 91. Sanksi Yang Berlaku Di Desa 92. Seberapa Penting Barang-Barang Yang Dibuat 93. Seberapa Penting Peran Alam/ Lingkungan untuk Mendukung Kehidupan Keluarga 94. Seberapa Penting Menjalin Hubungan Baik Dengan Sesama Warga 95. Hakikat (Sifat) Hidup Rumah Tangga 96. Pekerjaan, Perilaku, Dan Benda 97. Pandangan Hidup Terhadap Waktu 98. Hubungan Dengan Alam 99. Hubungan Dengan Manusia Lainnya

Sumber: GIZ Forclime, 2013

Analisa data untuk hasil-hasil yang diperoleh menggunakan analisis statistik deskriptif yaitu dengan perhitungan frekuensi, persentase dan perbandingan hasil dalam bentuk grafik.

II.1.2.C. Gender

Studi terhadap dimensi gender ditujukan untuk memperoleh gambaran keseimbangan dan kesetaraan gender. Dalam konteks ini, maka indikator yang digunakan akan memberi gambaran adalah tentang pembagian kerja, kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Analisa data untuk hasil studi yang diperoleh menggunakan analisis statistik deskriptif yaitu menggunakan perhitungan frekuensi, persentase dan perbandingan hasil dalam bentuk grafik.

Tabel 4. Variabel dan Indikator untuk Pemahaman Gender

Variabel	Indikator
Gender	62. Pencari Nafkah Di RT 63. Pengasuh Balita Di RT 64. Akses Air Untuk RT 65. Pengambil Kayu Bakar Di RT 66. Yang Membersihkan Rumah 67. Pengatur Menu Masakan Di RT 68. Wakil RT Dalam Musyawarah Desa 69. Wakil RT Dalam Penyuluhan Pertanian/ Kehutanan/ Perkebunan 70. Wakil RT Dalam Penyuluhan Kesehatan 71. Yang Memutuskan Keikutsertaan KB 72. Yang Memutuskan Pendidikan Anak 73. Yang Memutuskan Perkawinan Anak

74.	Anak Perempuan Usia 7 s/d 19 Tahun Tidak Bersekolah
75.	Usia Suami Pertama Kali Menikah
76.	Usia Istri Pertama Kali Menikah
77.	Penentu Jenis Komoditi Pertanian
78.	Keputusan Jenis Usaha Di Luar Sektor Pertanian Yang Akan Dikembangkan
79.	Prioritas Sekolah Untuk Anak Di Saat Kondisi Keuangan Terbatas
80.	Urutan Pembagian Makanan Dalam Rumah Tangga

Sumber: GIZ Forclime, 2013

Analisa data untuk hasil studi yang diperoleh ini menggunakan analisis statistik deskriptif menggunakan perhitungan frekuensi, persentase dan perbandingan hasil dalam bentuk grafik.

II.1.2.D. Pengetahuan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Mangrove – Gambut

Informasi tentang aspek pengetahuan, pengelolaan dan praktik-praktik pemanfaatan hutan mangrove-gambut oleh masyarakat di lokasi survei dengan menggunakan indikator sebagai berikut.

Tabel 5. Variabel dan Indikator Pengetahuan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Mangrove Gambut.

Variabel	Indikator
Pengetahuan tentang Mangrove/ gambut	81. Pengetahuan Tentang Keberadaan Mangrove/Gambut
	82. Pengetahuan Tentang Fungsi Hutan
	83. Intensitas Kunjungan Ke Hutan
	84. Jenis Hutan Di Desa
	85. Manfaat Keberadaan Hutan
	86. Dukungan Kegiatan Pelestarian Hutan (Konservasi)
Pengelolaan Mangrove/ Gambut	108. Kegiatan Terkait Pengelolaan Hutan Gambut/ Mangrove
	109. Pelaksana Kegiatan Terkait Pengelolaan Hutan Gambut/ Mangrove
	110. Bentuk Kegiatan Terkait Pengelolaan Hutan Gambut/ Mangrove
	111. Keterlibatan Dalam Kegiatan Terkait Pengelolaan Hutan Gambut/ Mangrove
	112. Bentuk Keterlibatan Dalam Kegiatan Terkait Pengelolaan Hutan Gambut/ Mangrove
	113. Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Perlindungan Dan Pemanfaatan Hutan Gambut/ Mangrove
	114. Manfaat Pengelolaan Hutan Gambut/ Mangrove Bagi Kesejahteraan Masyarakat
	115. Manfaat Pengelolaan Hutan Gambut/ Mangrove Bagi Kelestarian
	116. Permasalahan Yang Dapat Menggagalkan Pengelolaan Hutan Gambut/ Mangrove
	117. Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Hutan Gambut/ Mangrove Bagi Kelestarian

Praktik Pemanfaatan Mangrove/ Gambut	118.	Sumberdaya Yang Dimanfaatkan Dari Hutan Gambut/ Mangrove
	119.	Apakah Pemanfaatan Tersebut Menjadi Sumber Penghasilan Utama
	120.	Apakah Sumber Penghasilan Sampingan
	121.	Produktivitas Sumberdaya Hutan Gambut/ Mangrove
	122.	Memiliki/ Menguasai/ Mengelola Hutan/ Lahan Gambut
	123.	Luas Lahan Gambut
	124.	Memiliki/ Menguasai/ Mengelola Lahan Mangrove
	125.	Luas Lahan Mangrove
	126.	Lama Memiliki/ Menguasai/ Mengelola Gambut/ Mangrove
	127.	Pemanfaatan Lahan Gambut
	128.	Pemanfaatan Lahan Mangrove
	129.	Pemanfaatan Lahan Gambut Yang Paling Luas
	130.	Komoditas Pertanian Yang Dibudidayakan
	131.	Pemanfaatan Lahan Mangrove Yang Paling Luas
	132.	Pemanfaatan Gambut Yang Paling Menguntungkan dan Dampak Rendah (3 Jawaban Terbaik)
	133.	Pemanfaatan Mangrove Yang Paling Menguntungkan dan Dampak Rendah (3 Jawaban Terbaik)
	134.	Hal Penting Yang Dilakukan Agar Produksi Tinggi Berdasarkan Pengalaman

Sumber: GIZ Forclime, 2013 (dimodifikasi)

Analisa data untuk hasil studi yang diperoleh menggunakan analisis statistik deskriptif yaitu perhitungan frekuensi, persentase dan perbandingan hasil dalam bentuk grafik.

II.1.2.E. Persepsi dan Motivasi

Persepsi dan motivasi dalam studi ini adalah informasi tentang persepsi dan motivasi warga masyarakat terhadap keberadaan hutan mangrove-gambut. Adapun variabel dan indikator yang digunakan adalah seperti yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Variabel dan Indikator untuk Persepsi dan Motivasi.

Variabel	Indikator
Persepsi terhadap Mangrove/ Gambut	100. Nilai Manfaat Penggunaan
	101. Nilai Manfaat Fungsional
	102. Nilai Manfaat Pilihan
	103. Nilai Manfaat Keberadaan
	104. Nilai Manfaat Lain
Motivasi terhadap Mangrove/ Gambut	105. Motivasi Ekonomi
	106. Motivasi Sosial
	107. Motivasi Lingkungan

Sumber: GIZ Forclime, 2013 (dimodifikasi)

Analisa data yang akan digunakan adalah statistik deskriptif dan analisa skoring dengan menggunakan skala likert, untuk mengetahui tingkat persepsi dan motivasi masyarakat terhadap sumberdaya hutan mangrove dangambut.

II.1.2.F. Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga

Informasi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga disajikan variabel dan indikator dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Variabel dan Indikator untuk Pendapatan Rumah Tangga.

Variabel	Indikator
Pendapatan dan Pengeluaran RT	135. Memiliki Pendapatan Dari Memanfaatkan Hutan Mangrove/ Gambut
	136. Jumlah pendapatan keluarga dari Memanfaatkan Hutan Mangrove/ Gambut
	137. Memiliki Pendapatan Selain Dari Memanfaatkan Hutan Mangrove/ Gambut
	138. Jumlah pendapatan keluarga dari selain Memanfaatkan Hutan Mangrove/ Gambut
	139. Bagaimana Pendapatan RT (Dalam 5 Tahun Terakhir)
	140. Memiliki Pinjaman/ Kredit
	141. Sumber Pinjaman/ Kredit
	142. Jumlah Nilai Pinjaman dan Besar Cicilan
	143. Pengeluaran rata-rata per Bulan

Sumber: GIZ Forclime, 2013 (dimodifikasi)

Analisa data akan menggunakan statistik deskriptif dengan analisa perbandingan untuk memperoleh gambaran kemiskinan rumah tangga dari pendapatan dan pengeluaran.

II.2. METODE

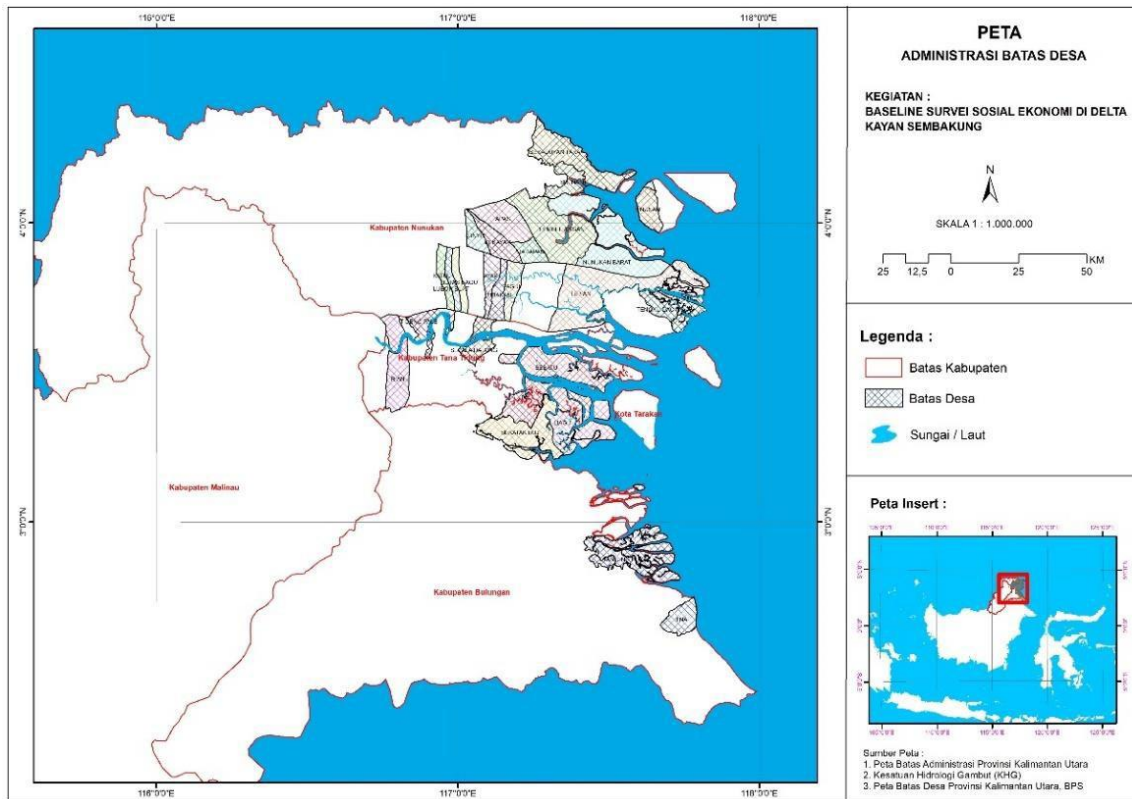
II.2.1. Rancangan Survei dan Lokasi

Survei dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kajian ini, yaitu pengumpulan data kualitatif maupun kuantitatif terkait dengan rumah tangga. Sebagai narasumber informasi utama dan individu terpilih sebagai informan kunci adalah Kepala Desa, Ketua Adat, individu atau orang yang telah berhasil dalam memanfaatkan dan mengelola kawasan gambut dan mangrove. Metode yang digunakan dalam penentuan informan kunci adalah metode *snowball sampling*.

Pemahaman terhadap berbagai kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan masyarakat harus didukung dengan data/informasi yang komprehensif, oleh karenanya data/informasi yang dikumpulkan dalam survei ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. data sosial, ekonomi dan budaya yang terdiri atas data sosial demografi, data sosial budaya dan politik, data ekonomi (kemiskinan dan mata pencaharian), dan data isolasi dan akses;
2. data-data lingkungan, yang terdiri atas data kondisi biofisik dan data komoditas yang diusahakan masyarakat, hewan ternak dan hewan buruan.
3. Data dan informasi praktik-praktik pemanfaatan lahan gambut dan mangrove, serta data pendukung lainnya.

Survei dilaksanakan di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung seperti yang ditunjukkan dalam Gambar dibawah.



Gambar 3. Lokasi Pelaksanaan Survei.

II.2.2. Pelaksanaan

Survei dilaksanakan di 22 desa terpilih yang memiliki kawasan hutan mangrove dan lahan gambut. Desa terpilih ini ditetapkan berdasarkan hasil *overlay* dari Peta Administrasi, Peta Kawasan Hutan Gambut, Peta Kawasan Hutan Mangrove dan Peta Status Kawasan. Agar dapat diperoleh data yang dapat mewakili tiga wilayah kabupaten, maka pemilihan desa ditetapkan secara proporsional.

Responden atau orang yang akan menjadi sumber informasi dalam kegiatan survei ini adalah satuan rumah tangga yang dipilih dari masyarakat desa terpilih berdasarkan prinsip berikut:

- Untuk desa dengan 20 rumah tangga atau kurang, digunakan sistem sensus (seluruh rumah tangga dijadikan sampel);
- Lebih besar 20 tapi lebih kecil dari 100, jumlah responden 20 rumah tangga yang dipilih secara undian namun diupayakan merata;
- Lebih besar atau sama dengan 101, pilih dengan cara lompat empat, jumlah responden sekitar 20% dari jumlah rumah tangga keseluruhan (*systemic random sampling*).

Secara keseluruhan, maka rata-rata dari setiap desa akan diambil 23% rumah tangga sebagai responden atau sumber informasi sehingga total responden dari 22 desa terpilih adalah sejumlah 2005 responden yang perinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 8. Sampel Desa dan Jumlah Responden.

Kecamatan	Desa	Luas Desa (Km ²)	Populasi (Jiwa)	Rumah Tangga (Jiwa)	Responden (Orang)
KABUPATEN NUNUKAN: DESA DENGAN KAWASAN GAMBUT/ MANGROVE					
Sembakung	Tepian	677,85	777	202	25
Sebuku	Apas	67,68	578	158	344
Sembakung	Tagul	157,48	518	126	30
Sembakung	Lubakan	342,50	548	137	32
Sebuku	Kekayap	462,67	569	134	37
Sembakung Atulai	Katul	42,75	351	85	59
Sembakung	Butas Bagu	59,74	347	106	90
Sebuku	Kunyit	346,74	566	152	36
Sembakung	Manuk Bungkul	191,88	417	106	31
Sebuku	Tetaban	0,00	443	127	20
Nunukan	Binusan	96,44	3844	1137	266
Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	16,52	5877	1469	25
TOTAL RESPONDEN					995
KABUPATEN TANAH TIDUNG: DESA DENGAN KAWASAN GAMBUT/ MANGROVE					
Sesayap Hilir	Sepala Dalung	168,79	1434	359	41
Sesayap Hilir	Bebatu	276,62	701	175	351
Sesayap Hilir	Sengkong	118,39	118,39	118,39	40
Sesayap	Tideng Pale	324,06	5997	1499	13
Muruk Rian	Rian	165,15	215	54	84
Tana Lia	Tengku Dacing	110	110	110	19
TOTAL RESPONDEN					548
KABUPATEN BUNYAN: DESA DENGAN KAWASAN MANGROVE					
Tanjung Palas Tengah	Tanjung Buka	199,35	4056	1047	79
Sekatak	Liagu	-	829	173	250
Palas Timur	Tanah Kuning	67,2	1763	425	20
Sekatak	Salimbatu	249,18	1114	313	113
TOTAL RESPONDEN					462
TOTAL					2.005

Sumber: Data Primer (2019)

BAGIAN III: INFORMASI RINGKAS LOKASI AREA STUDI

III.1. POPULASI DAN DEMOGRAFI

III.1.1. Populasi

Desa yang menjadi lokasi survei dalam studi ini ada sebanyak 22 Desa yang tersebar di 3 (tiga) wilayah Kabupaten Nunukan sebanyak 12 desa, Kabupaten Bulungan sebanyak 4 (empat) desa dan Kabupaten Tana Tidung sebanyak 6 (enam) desa. Data jumlah populasi di setiap desa diperoleh dari hasil survei dan juga menggunakan data sekunder yakni dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 yang diterbitkan di tiga Kabupaten dengan informasi data dalam dokumen adalah tahun 2018.

Berdasarkan data BPS (2019), pertumbuhan populasi di Kabupaten Bulungan berkisar dalam kisaran angka 2,40% (tahun 2017-2018), di Kabupaten Tana Tidung berkisar dalam angka 7,56 % (tahun 2018-2019), sedangkan di Kabupaten Nunukan berkisar dalam angka 4,25%. Pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi juga oleh program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sejak menjadi Propinsi Kalimantan Utara dalam tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan adanya proses intervensi dari sisi pembangunan terhadap populasi masyarakat di suatu wilayah.

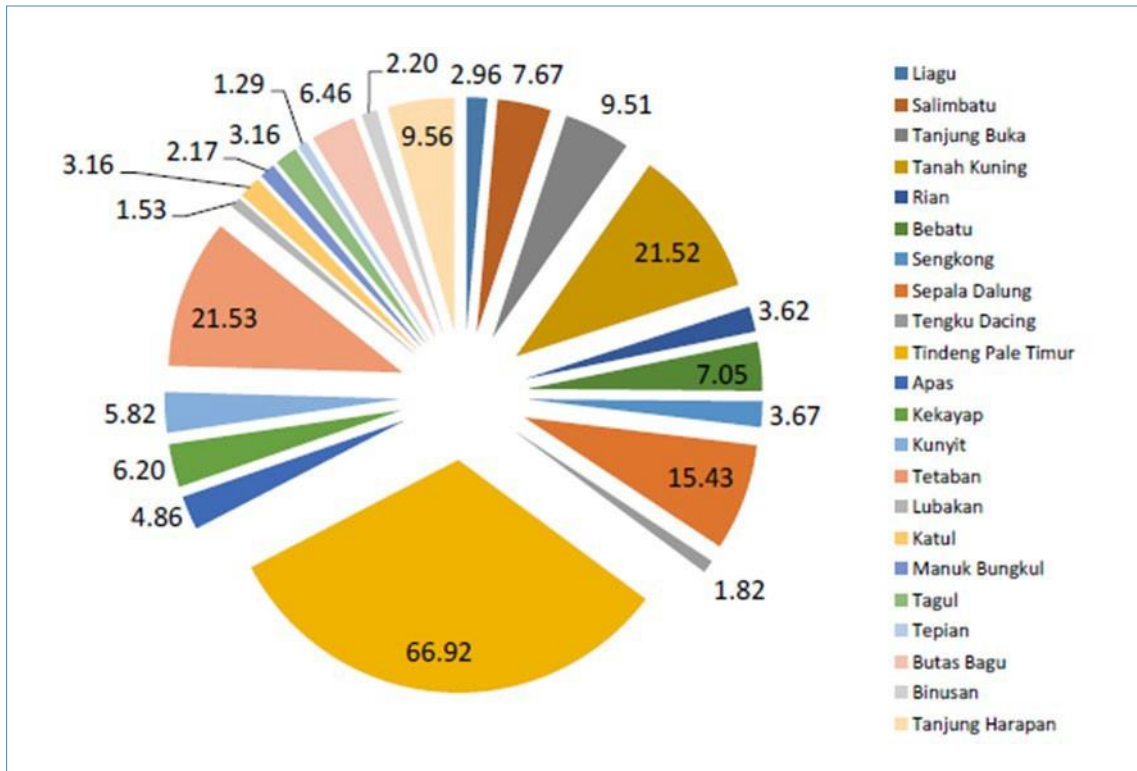
Data jumlah populasi warga penduduk desa yang dipilih dalam studi ini menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan data BPS diperoleh bahwa desa dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan di Kabupaten Nunukan sebesar 5.877 jiwa. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk paling rendah dicatat di Desa Rian Kabupaten Tana Tidung yaitu sebesar 304 jiwa. Data jumlah kepadatan penduduk dalam km^2 dari 22 Desa yang menjadi lokasi studi menunjukkan bahwa Desa Tideng Pale Timur, di Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah kepadatan penduduk yang tertinggi yaitu sebesar 66,92 jiwa/ km^2 dengan jumlah penduduk yaitu 2.282 jiwa.

Sementara desa dengan jumlah kepadatan paling rendah yaitu sebesar 1,29 jiwa/ km^2 adalah Desa Tepian, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan. Ada beberapa desa lainnya yang juga dicatat memiliki jumlah kepadatan yang rendah dibawah 2 jiwa/ km^2 , yaitu Desa Tengku Dacing Kecamatan Tana Lia (1,82 jiwa/ km^2), Desa Lubakan Kecamatan Sembakung (1,53 jiwa/ km^2) dan Desa Tepian Kecamatan Sembakung (1.29 jiwa/ km^2).



Gambar 4. Jumlah Penduduk di 22 Desa yang menjadi lokasi studi

Berikut ini dipresentasikan gambar grafik yang menyajikan data jumlah penduduk (jiwa) dan kepadatan penduduk dalam jiwa/km di 22 Desa yang menjadi lokasi studi ini.



Gambar 5. Jumlah Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) di 22 Desa yang menjadi lokasi survei studi.

III.1.2. Demografi

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2019), bahwa luas wilayah Kabupaten Nunukan adalah 14.247,50 km² dengan jumlah populasi 193.900 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 13,50 jiwa/km². Kabupaten Bulungan memiliki luas 13.181,92 km² dengan jumlah populasi sebanyak 136.204 jiwa dan kepadatan penduduk 10,33 jiwa/km². Sementara di Kabupaten Tana Tidung luas wilayahnya mencapai 4.828,58 km² dengan jumlah populasi mencapai 28.926 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 5,75 jiwa/km².

Tabel dibawah ini menyajikan profil responden dari lokasi survei di 22 desa yang tersebar di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung dan Nunukan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan data yang telah diolah dari 2.005 rumah tangga yang disurvei, maka diperoleh informasi bahwa jumlah rata-rata anggota dalam rumah tangga berkisar antara 3 hingga 6 orang.

Desa yang memiliki jumlah rata-rata anggota rumah tangga terbanyak (6 orang per rumah tangga) telah ditemukan di wilayah Desa Bebatu, Kabupaten Tana Tidung, Desa Kekayap dan Tagul di Kabupaten Nunukan. Hasil survei juga menunjukkan data adanya kondisi dalam 1 (satu) rumah ditempati sebanyak 1 sampai 5 keluarga. Tetapi umumnya responden ini menempati 1 (satu) rumah yang didalamnya dihuni oleh 1 (satu) keluarga yaitu sebanyak 85% responden, dan sebanyak 11,8% responden tinggal dalam satu rumah yang terdiri dari 2 (dua) keluarga.

Dalam struktur keluarga atau rumah tangga ini, ada seseorang yang berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keseluruhan keluarga. Selain itu kepala keluarga juga memiliki

peranan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan keluarga secara umum. Hasil survei di lokasi studi menunjukkan bahwa ada lebih dari >75% rumah tangga dimana yang menjadi kepala keluarga adalah laki-laki (pria) dan umumnya mereka adalah berstatus sebagai suami.

Selanjutnya, untuk wilayah dengan jumlah rata-rata laki-laki terbanyak dalam rumah tangga yang berusia <17 tahun adalah terdapat di Desa Manuk Bungkul di Kabupaten Nunukan yaitu sebesar 78,8%. Hal ini menunjukkan bahwa angka laki-laki usia produktif di desa tersebut masih sedikit yaitu sebesar 21,2%. Namun demikian, ada juga wilayah yang memiliki jumlah laki-laki terendah yang berusia <17 tahun yaitu di Desa Tepian Kabupaten Nunukan dengan persentase sebesar 35,4%.

Dengan kata lain bahwa jumlah laki-laki usia produktif di Desa Tepian adalah yang tertinggi (sebesar 64,6%) bila dibandingkan dengan desa-desa lain yang disurvei. Selain itu, jumlah persen perempuan terendah yang tinggal dalam rumah tangga yaitu sebesar 39,2% yang dicatat di Desa Sengkong di Kabupaten Tana Tidung, sementara tertinggi sebesar 69,5% dicatat di Desa Tepian.

Tabel dibawah ini menyajikan secara lengkap data-data indikator populasi yang diperoleh berdasarkan hasil studi.

Tabel 9. Indikator Populasi di Wilayah Studi

Desa	Kecamatan	Rerata Ukuran Keluarga	Rerata Jumlah Keluarga	% Pria Kepala Keluarga	% Populasi < 17 Tahun	% perempuan yang tinggal dalam RT
Kabupaten Bulungan						
Liagu	Sekatak	5	1	94.7	49.9	47.2
Salimbatu	Tanjung Palas Tengah	5	2	95.0	62.8	48.9
Tanah Kuning	Tanjung Palas Timur	4	1	96.2	59.7	46.0
Tanjung Buka	Tanjung Palas Tengah	4	1	96.4	62.0	46.7
Kabupaten Tana Tidung						
Bebatu	Sesayap Hilir	6	2	100.0	66.1	53.1
Rian	Muruk Rian	5	1	100.0	63.5	50.8
Sengkong	Sesayap Hilir	4	1	100.0	73.4	39.2
Sepala Dalung	Sesayap Hilir	4	1	94.0	67.4	45.6
Tengku Dacing	Tana Lia	5	2	100.0	68.6	39.5
Tideng Pala Timur	Sesayap	3	1	98.6	50.2	44.6
Kabupaten Nunukan						
Apas	Sebuku	5	1	100.0	71.3	51.4
Binusan	Nunukan	5	1	95.9	60.9	49.0
Butas Bagu	Sembakung	5	2	96.0	68.0	49.6
Katul	Sembakung	4	1	75.0	67.1	50.7
Kekayap	Sebuku	6	1	100.0	76.0	51.0
Kunyit	Sebuku	4	2	97.2	61.9	52.4

Lubakan	Sembakung	5	1	93.8	68.8	41.3
Manuk Bungkul	Sembakung	5	1	96.0	78.8	48.7
Tagul	Sembakung	6	2	98.3	66.0	47.6
Tanjung Harapan	Nunukan Selatan	5	1	97.7	62.8	49.6
Tepian	Sembakung	3	1	97.8	35.4	69.5
Tetaban	Sebuku	4	1	100.0	70.5	45.5
Rerata		5	1	96.5	61,7	50,4

Sumber: Data Primer (2019).

III.2. DIMENSI SOSIAL BUDAYA

III.2.1. Kesukuan

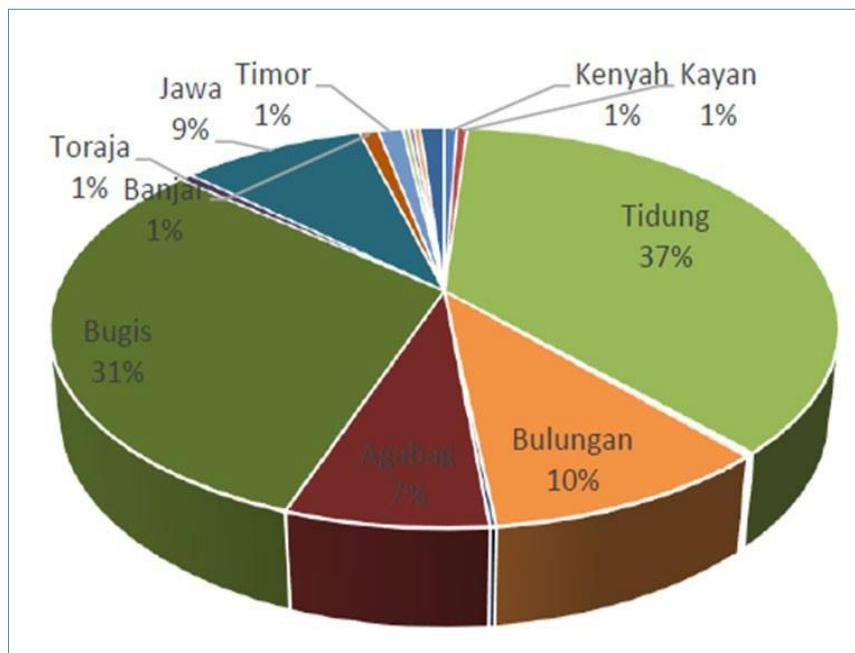
Kawasan Delta Kayan-Sembakung berada pada 3 (tiga) daerah administratif yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Lokasi yang menjadi sampel dari studi ini sebagian besar adalah berada di kawasan pesisir. Seperti umumnya masyarakat pesisir yang ada di Indonesia, maka masyarakat pesisir yang ada di Kawasan Delta Kayan Sembakung juga memiliki ciri-ciri layaknya masyarakat di kawasan pesisir, yaitu menjadi bagian masyarakat yang pluralistik, namun tetap memiliki jiwa kebersamaan (Wahyudin, 2015).

Keberagaman budaya akibat adanya proses akulturasi dari masing-masing komponen yang terbentuk dalam warga masyarakatnya, yang kemudian membentuk sistem dan nilai budaya yang dipatuhi secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) kategori suku besar yang merupakan suku asli yang mendiami wilayah di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Suku Bulungan, Suku Tidung dan Suku Dayak. Ketiga suku besar ini masing-masing tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Utara baik dalam kawasan pegunungan, kawasan hutan, hingga di kawasan pesisir. Masing-masing suku memiliki kekhasan tersendiri sesuai dengan kesetempatannya dan seiring berjalannya waktu, pertumbuhan dan perkembangan wilayah maka beragam etnis diluar 3 (tiga) etnis asli tersebut mulai tinggal di kawasan ini.

Kehadiran suku lain di luar suku asli ini diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, dan akhirnya hidup secara bersama-sama. Bahkan ada beberapa lokasi studi, mayoritas etnis penduduk bukanlah etnis asli, melainkan etnis pendatang yang bermukim dan berkehidupan bersama dengan memanfaatkan seluruh potensi yang terdapat di daerah tersebut.

Lokasi studi dalam Kawasan Delta Kayan-Sembakung jika dilihat dari jenis suku masyarakat yang bermukim adalah didominasi Suku Tidung (37%), diikuti oleh Suku Bugis sebesar 31%, Suku Bulungan 10%, Suku Agabag 7% dan suku-suku lainnya dengan persentase tidak lebih dari 1% dari total keseluruhan masyarakat. Suku-suku lain yang bermukim di Kawasan Delta Kayan Sembakung antara lain suku Kayan, Kenyah, Banjar, Timor, dan Toraja yang secara lengkap akan dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.



Gambar 6. Komposisi Etnis di Kawasan Delta Kayan Sembakung

Hasil studi menunjukkan Suku Tidung yang merupakan etnis asli Provinsi Kalimantan Utara, adalah etnis terbesar yang bermukim di lanskap Delta Kayan-Sembakung tetapi persentasenya tidak jauh berbeda dengan Suku Bugis yang berasal dari Sulawesi. Cukup tingginya persentase Suku Bugis yang bermukim di Kawasan Delta Kayan Sembakung, tidak terlepas dari karakteristik mereka yang dikenal sebagai pelaut ulung. Kebiasaan ‘melaut’ dengan tujuan menangkap ikan serta binatang laut lainnya di daerah tertentu, lambat laun diikuti dengan membawa keluarga mereka untuk bermukim di kawasan yang dinilai mampu menjamin kehidupan.

Selain Suku Tidung maka Suku Bulungan dan Suku Agabag merupakan etnis asli di Provinsi Kalimantan Utara, yang persentasenya cukup kecil jika dibandingkan dengan Suku Tidung dan Suku Bugis. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan dan petani, baik itu petani di daratan maupun petani di perairan. Berdasarkan jumlah sebaran penduduk berdasarkan etnis di Kawasan Delta Kayan Sembakung secara keseluruhan, menunjukkan Suku Tidung memiliki jumlah terbesar, tetapi dilihat berdasarkan wilayah administratif tidak seluruhnya didominasi oleh Suku Tidung.

Di Kabupaten Bulungan, maka lokus studi yang mewakili masyarakat Kawasan Delta Kayan-Sembakung adalah di Desa Liagu, Tanah Kuning, Tanjung Buka dan Salimbatu. Berdasarkan hasil studi, ternyata etnis terbesar yang mendiami keempat daerah yang termasuk Kawasan Delta Kayan Sembakung adalah Suku Bugis yaitu sebesar 60%. Populasi terbesar kedua adalah Suku Jawa yaitu sebesar 18%, dan baru suku Tidung sebesar 14%. Tingginya persentase Suku Bugis karena lokasi studi didominasi oleh perkampungan nelayan dan petani tambak.

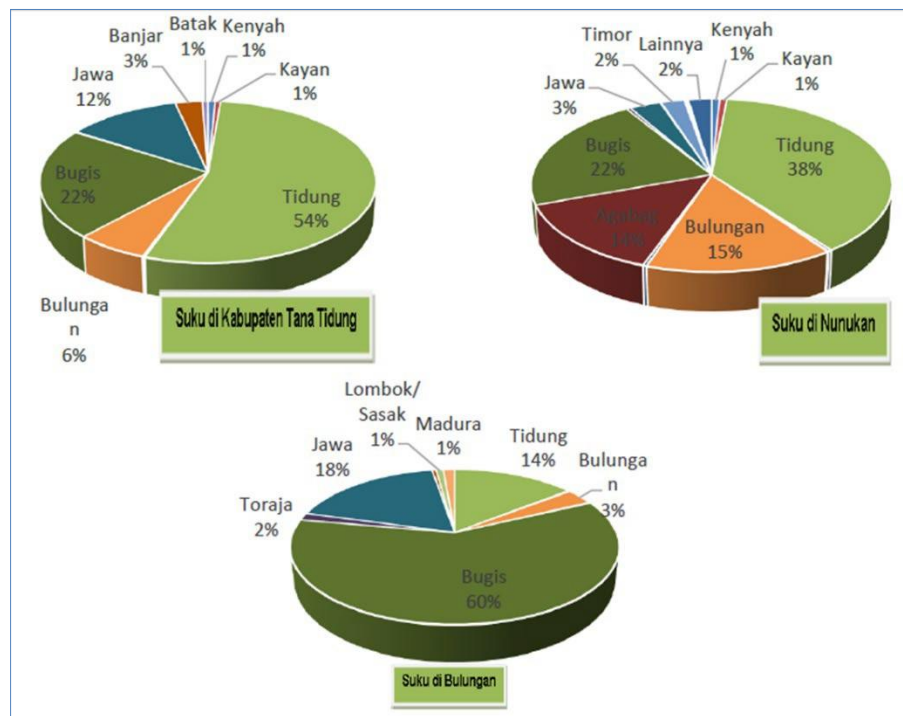
Profesi nelayan dan petani tambak adalah sebagian besar dilakukan oleh masyarakat dengan latar belakang Suku Bugis dan Suku Tidung, mengingat secara tradisi hidup dan pekerjaan kedua etnis ini adalah mayoritas pelaut. Komposisi Suku Jawa yang cukup besar, adalah karena lokasi studi (Tanjung Buka) adalah merupakan daerah transmigrasi dari Provinsi Jawa Tengah dan sebagian dari Provinsi Jawa Timur.

Berbeda halnya dengan Kabupaten Bulungan, maka di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung menunjukkan etnis terbesar adalah Suku Tidung. Sebagai kabupaten dengan jumlah lokus terbesar, yaitu sebanyak 12 (dua belas) desa detail sebaran Etnis yang ada di Nunukan, adalah sebagai berikut. Suku Tidung sebanyak 38%, diikuti Suku Bugis sebanyak 22%. Terdapat suku-suku lain

yang tidak lebih dari 20%. Sedangkan di Wilayah Tana Tidung, dengan 6 (enam) lokus studi.

Berdasarkan hasil studi ini, maka jumlah Suku Tidung yang berada di Kabupaten Tana Tidung adalah sebesar 54% yang artinya lebih dari separuh jumlah penduduk yang berada di lanskap Delta Kayan Sembakung. Terbesar kedua adalah Suku Bugis, diikuti oleh Suku Jawa dan Bulungan. Memang ada suku lain namun persentasenya tidak lebih dari 5%.

Detail persebaran etnis berdasarkan kepada wilayah administratif dapat dilihat pada Gambar 7 berikut.



Gambar 7. Komposisi Etnis di Kawasan Delta Kayan-Sembakung berdasarkan Wilayah Administratif

BAGIAN IV: HASIL STUDI – ORIENTASI BUDAYA

IV.1. TOLONG MENOLONG DAN MENJALIN SILATURAHMI BAIK DENGAN SESAMA

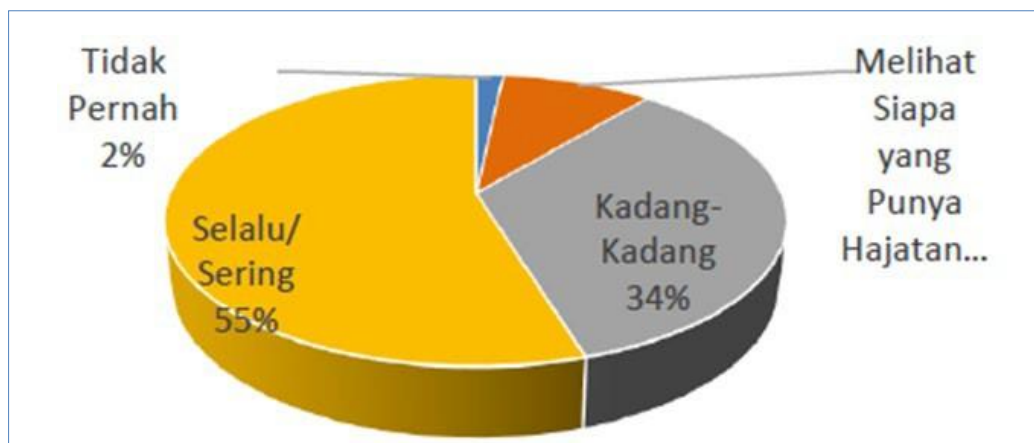
Hidup bersama dalam suatu lingkungan dengan berbagai latar belakang etnis yang berbeda tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan potensi konflik. Namun kesamaan karakteristik masyarakat yang hidup di kawasan pesisir, mampu menjadikan beragam etnis dapat hidup secara harmonis di lanskap Delta Kayan-Sembakung.

Beberapa sifat dan karakteristik masyarakat kawasan pesisir di antaranya adalah tergantung kepada kondisi lingkungan dan tergantung kepada musim (Wahyudin, 2015). Kondisi ini akhirnya menciptakan aturan baik itu secara tidak tertulis, namun dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut. Pada lanskap Delta Kayan Sembakung, maka tingkat kebersamaan dan kepedulian masyarakat terhadap sesama anggota masyarakatnya masih cukup tinggi.

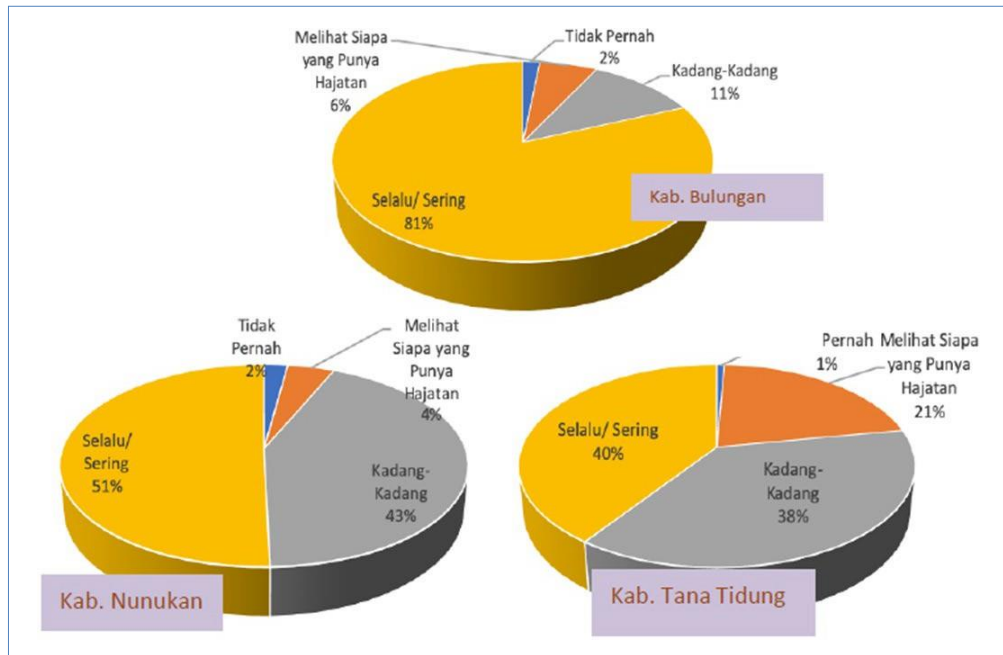
Hasil studi ini menunjukkan lebih dari 50% anggota masyarakat ikut membantu ketika salah satu anggota masyarakat lain yaitu melaksanakan *hajatan*. Kegiatan membantu ketika ada anggota masyarakat yang melaksanakan *hajatan* juga terjadi di Kabupaten Bulungan dengan persentase 81%, dimana masyarakat menyatakan turut membantu tanpa memandang siapa yang melaksanakan kegiatan. Masyarakat di Kabupaten Bulungan merupakan masyarakat dengan persentase terbesar yang memberikan bantuan kepada anggota masyarakat lain ketika *hajatan* ini dilaksanakan.

Di Kabupaten Nunukan, maka keterlibatan anggota masyarakat dalam membantu tetangga yang memiliki *hajatan* masih berada di atas angka 50% tetapi jauh di bawah masyarakat Kabupaten Bulungan. Angka terendah membantu *hajatan* berada di Kabupaten Tana Tidung yaitu hanya sebesar 40% saja. Sebagian saja masyarakat yang menyatakan kadang-kadang saja membantu, dan perbedaan yang cukup signifikan terlihat mengingat hanya sebanyak 21% saja masyarakat dari Kabupaten Tana Tidung yang menyatakan memberikan bantuan dengan melihat siapa yang melaksanakan *hajatan*.

Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan Kabupaten Bulungan dan Nunukan, sebagaimana pernyataan untuk membantu dengan melihat siapa yang melaksanakan *hajatan* berada dibawah 10% menurut data dari Gambar 8 dan Gambar 9.

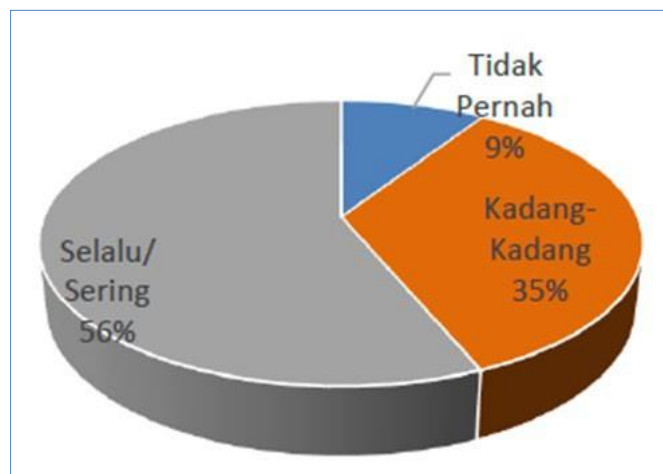


Gambar 8. Membantu *Hajatan* Masyarakat Desa di Kawasan Delta Kayan Sembakung



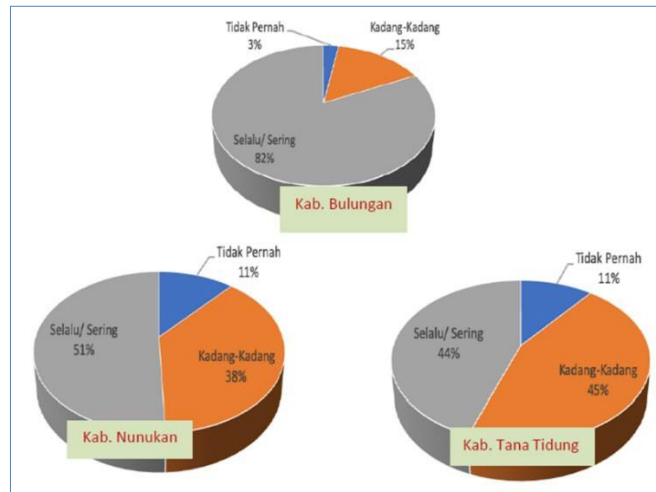
Gambar 9. Membantu Hajatan Masyarakat Desa di Tiga Wilayah Studi

Gotong-royong yang menjadi salah satu ciri kebersamaan masyarakat Indonesia masih cukup kuat di jumpai di Kawasan Delta Kayan-Sembakung. Sebesar 56% masyarakat menyatakan ikut serta jika dilakukan kegiatan gotong-royong Gambar 3.7.



Gambar 10. Keterlibatan dalam Gotong Royong di Kawasan Delta Kayan-Sembakung

Sama halnya dengan kegiatan membantu ketika ada kegiatan *hajatan*, maka sebanyak 82% masyarakat di Kabupaten Bulungan yang berada di lanskap Delata Kayan Sembakung menyatakan selalu ikut serta ketika dilaksanakan gotong-royong di lingkungan tempat tinggalnya. Di Kabupaten Nunukan, nilai tingkat gotong-royong masyarakat masih di atas 50% yaitu sebesar 51%, sementara di Kabupaten Tana Tidung merupakan masyarakat dengan tingkat gotong royong terendah yaitu hanya sebesar 44% sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 11.

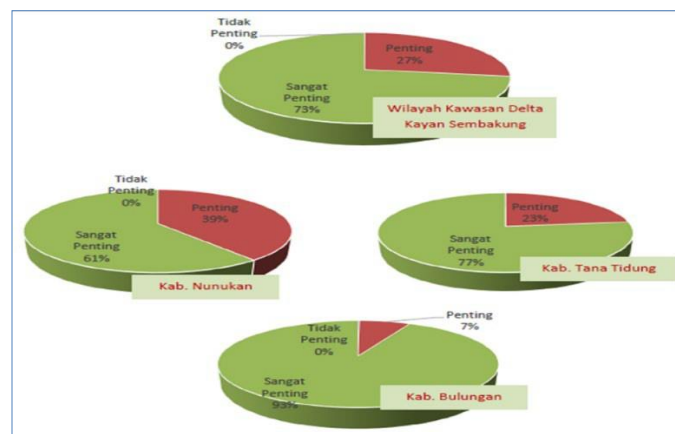


Gambar 11. Keterlibatan dalam Gotong Royong Berdasarkan Wilayah Studi

Cukup tingginya persentase yang berhubungan dengan kegiatan yang melibatkan banyak pihak di suatu lingkungan sejalan dengan pandangan masyarakat yang menyatakan, bahwa menjalin hubungan dengan sesama warga sangat penting untuk dilakukan. Sebanyak 73% masyarakat yang bermukim di kawasan Delta Kayan Sembakung menyatakan hal tersebut sangat penting. Mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki ketergantungan dengan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan.

Hasil survei terkait menjalin hubungan baik dengan sesama warga di kalangan masyarakat dari Kabupaten Bulungan mencapai angka 93%, yang sejalan dengan pernyataan masyarakat di Kabupaten Bulungan untuk membantu anggota masyarakat ketika melaksanakan *hajatan* serta terlibat di kegiatan gotong-royong. Kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud kebersamaan dan kepedulian antar sesama anggota warga masyarakat, dengan harapan agar sikap kepedulian dapat berdampak pada hubungan yang baik dengan seluruh warga.

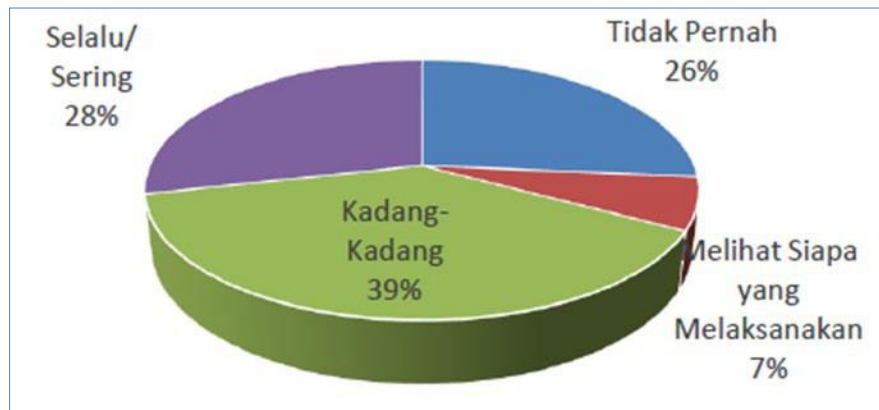
Di Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung keinginan masyarakat untuk menjalin hubungan baik dengan sesama warga juga cukup tinggi. Lebih dari 50% masyarakat menyatakan hal ini sangat penting, dan tidak ada satupun warga yang menyatakan tidak perlu menjalin hubungan baik dengan anggota masyarakat lainnya. Persentase hasil studi tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama warga dapat dilihat dalam Gambar 12.



Gambar 12. Menjalin Hubungan Baik dengan Sesama Warga

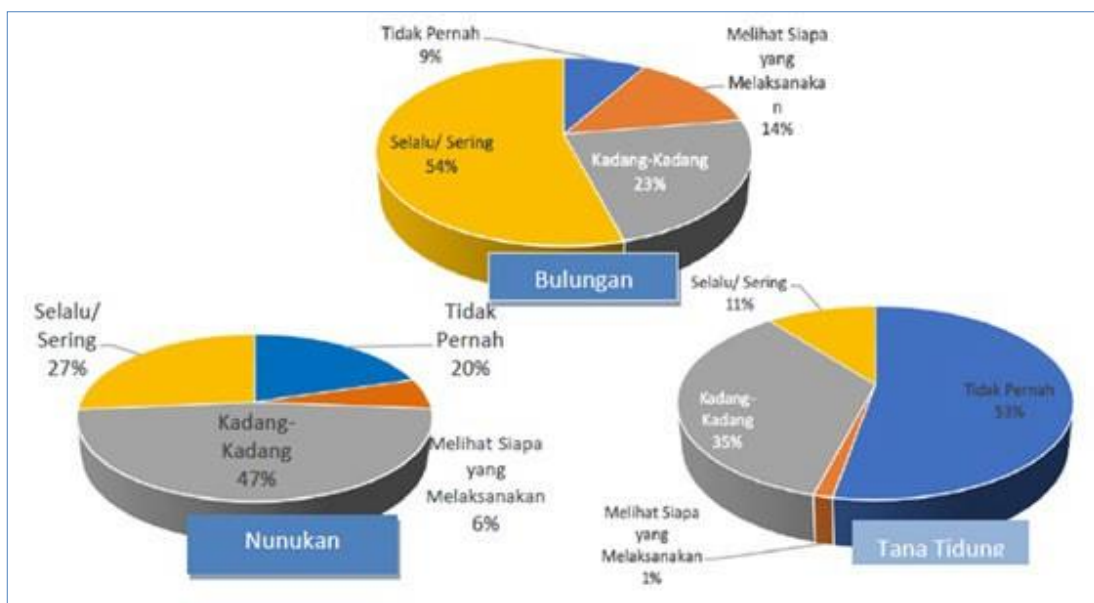
Namun ada hal yang menarik, terkait dengan tingkat kebersamaan dan kepedulian antar sesama yang cukup tinggi (dilihat dari indikator keinginan untuk membantu ketika ada anggota masyarakat yang akan melaksanakan *hajatan*, keikutsertaan dalam kegiatan gotong-royong, dan keinginan menjalin hubungan yang baik dengan sesama warga).

Tingkat persentase untuk tolong menolong antar warga secara keseluruhan di kawasan Delta Kayan Sembakung berada dalam kisaran angka 28%, dimana sebagian besar menyatakan (39%) hanya pada saat-saat tertentu saja memberikan pertolongan dan 26% menyatakan tidak pernah.



Gambar 13. Tingkat Tolong Menolong Masyarakat di Kawasan Delta Kayan-Sembakung

Kondisi cukup rendahnya tingkat tolong menolong masyarakat secara keseluruhan di Kawasan Delta Kayan-Sembakung, secara detail tiap wilayah dapat dilihat dalam presentasi Gambar 13 dan Gambar 14.



Gambar 14. Tingkat Tolong Menolong Masyarakat Berdasarkan Wilayah Studi

Di Kabupaten Bulungan, masyarakat responden studi secara konsisten menyatakan bahwa membantu *hajatan*, gotong royong, menjalin hubungan yang baik dengan sesama warga, dan tolong menolong antara anggota masyarakat perlu dilakukan. Berbeda halnya hasil survei dari Kabupaten

Nunukan dan Tana Tidung dimana responden berpendapat gotong-royong, membantu *hajatan*, dan menjalin hubungan baik antar sesama anggota masyarakat penting dilakukan. Tetapi untuk tolong menolong antar anggota masyarakat di kedua wilayah ini persentasenya cukup rendah.

Kondisi ini dapat dikaitkan dengan karakteristik sebaran etnis yang ada di masing-masing wilayah studi. Di Kabupaten Bulungan, etnis terbesar adalah Suku Bugis yang diikuti oleh Suku Jawa dengan suku asli dari Kalimantan hanya berjumlah kurang dari 20%. Berbeda dengan 2 (dua) wilayah studi lainnya yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung yang masih di dominasi oleh suku asli dari Kalimantan yaitu Suku Tidung.

Perbedaan karakter budaya warga masyarakat dalam menjalin hubungan antara anggota mempengaruhi tingkat keinginan untuk tolong-menolong. Masyarakat pendatang yang umumnya memiliki pengalaman yang lebih luas dari masyarakat setempat, berpengaruh kepada cara pandang dalam tindakan tolong menolong yang bersifat individu. Sementara kebiasaan masyarakat asli masih sangat menghargai keprivasian dari anggota masyarakat yang lain, dan cenderung tertutup dengan masyarakat lain diluar keluarga dekat.

Mereka akan dengan tangan terbuka memberikan bantuan jika diminta secara langsung dan berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Namun sebaliknya jika berhubungan dengan hal-hal yang bersifat personal, maka warga baru akan menolong jika memang dibutuhkan dan disampaikan secara langsung.

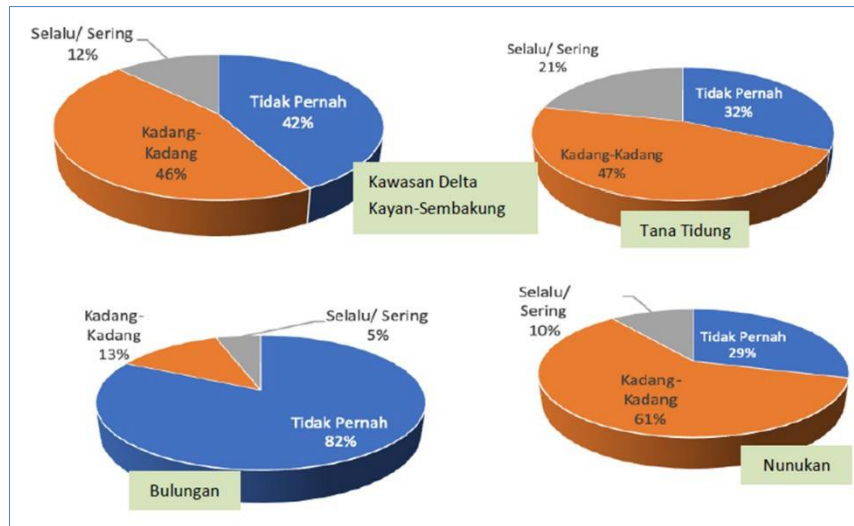
Tingginya pernyataan responden di Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung yang mengatakan tidak pernah dan hanya kadang-kadang saja membantu anggota masyarakat lain (diluar keluarga dekat), kemudian berpengaruh kepada rendahnya tingkat tolong menolong antar warga di kawasan Delta Kayan Sembakung secara keseluruhan.

III.2. PELAKSANAAN UPACARA ADAT DAN SANKSI ADAT

Meskipun berasal dari beragam etnis dan masih cukup tingginya masyarakat asli daerah di wilayah Delta Kayan-Sembakung, tetapi tidak berarti pelaksanaan upacara adat dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat setempat. Hanya 12% masyarakat yang menyatakan selalu melakukan upacara adat, sedangkan sebagian besar menyatakan hanya dalam waktu tertentu saja melaksanakan upacara adat dan bahkan 42% masyarakat menyatakan tidak pernah melakukannya.

Pelaksanaan upacara adat secara rutin umumnya dilakukan secara personal oleh para tetua yang masih memegang teguh tradisi, sedangkan warga masyarakat yang menyatakan kadang-kadang melaksanakan upacara adat adalah mengikuti kegiatan upacara adat yang bersifat masal ataupun menjadi agenda desa. Jika tidak ada agenda resmi, maka warga masyarakat memilih untuk tidak melaksanakan upacara tersebut.

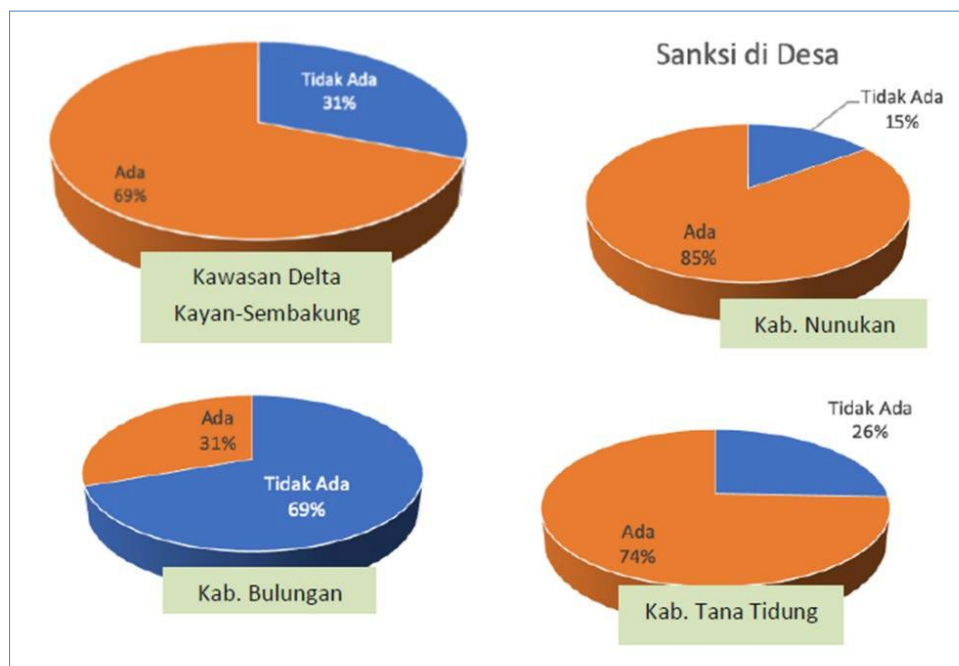
Gambar 3.12 menunjukkan persentase pelaksanaan upacara adat yang ada di kawasan Delta Kayan Sembakung dan masing-masing wilayah studi ini.



Gambar 15. Pelaksanaan Upacara Adat

Salah satu cara untuk menjaga keharmonisan hidup antar anggota masyarakat dan mengatur kehidupan bersama, adalah adanya aturan-aturan yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat. Aturan yang berlaku di masyarakat ada yang memiliki kekuatan hukum dan diatur oleh negara, dan ada yang bersifat kesepakatan bersama antar sesama warga. Aturan yang disepakati bersama oleh seluruh anggota masyarakat, pada akhirnya akan menjadi hukum yang wajib ditaati dan dipatuhi dan terdapat sanksi yang menjadi hukuman jika terjadi pelanggaran atas kesepakatan tersebut.

Di kawasan Delta Kayan Sembakung, hasil studi menunjukkan 69% masyarakat menyatakan terdapat sanksi yang dikenakan kepada anggota masyarakat jika terjadi pelanggaran sementara 31% menyatakan tidak terdapat sanksi adat. Untuk mengetahui persepsi masyarakat dari masing-masing wilayah studi terhadap sanksi adat yang ada, maka dapat dilihat dalam Gambar 16 berikut ini.

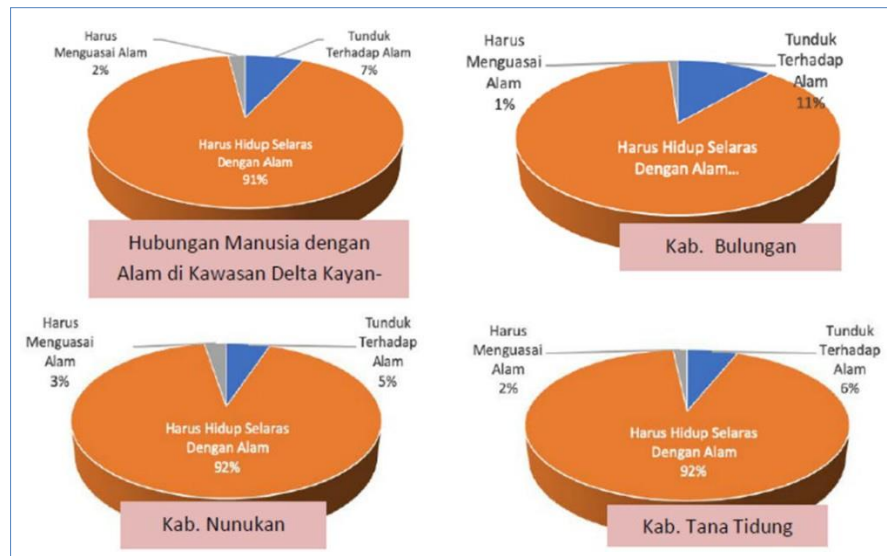


Gambar 16. Sanksi Adat

III.3. HUBUNGAN DENGAN ALAM DAN HAKIKAT HIDUP

Berdasarkan hasil studi, maka terdapat 91% masyarakat di kawasan Delta Kayan Sembakung yang menyatakan, bahwa dalam menjalankan kehidupan harus hidup selaras dengan alam. Kondisi ini menunjukkan, bahwa kedekatan masyarakat yang berada di kawasan Delta Kayan Sembakung dengan alam masih sangat erat. Masyarakat yang masih sangat merasakan manfaat alam dalam mendukung kehidupan mereka, sehingga mereka berpandangan bahwa keselarasan hidup dengan alam perlu untuk terus dijaga.

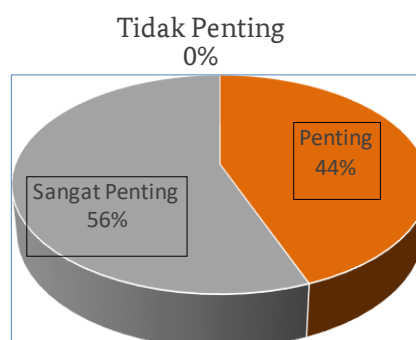
Secara detail pendapat masyarakat berdasarkan masing-masing wilayah studi dapat dilihat dalam Gambar 17 berikut ini.



Gambar 17. Hubungan dengan Alam

Tingginya keinginan dari masyarakat di kawasan Delta Kayan Sembakung untuk menjaga keharmonisan hidup dengan alam ini, tidak terlepas dari besarnya manfaat alam yang dirasakan dalam menunjang dan mendukung kehidupan mereka. Sebagai masyarakat yang masih digolongkan dalam masyarakat tradisional, yang salah satu karakteristiknya adalah ketergantungan yang cukup tinggi terhadap alam.

Hasil studi ini menunjukkan sekitar 56% masyarakat di kawasan Delta Kayan Sembakung menyatakan bahwa alam berperan sangat penting dalam mendukung kehidupan, 44% menyatakan penting dan tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa alam tidak berperan dalam mendukung kehidupan sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 18.

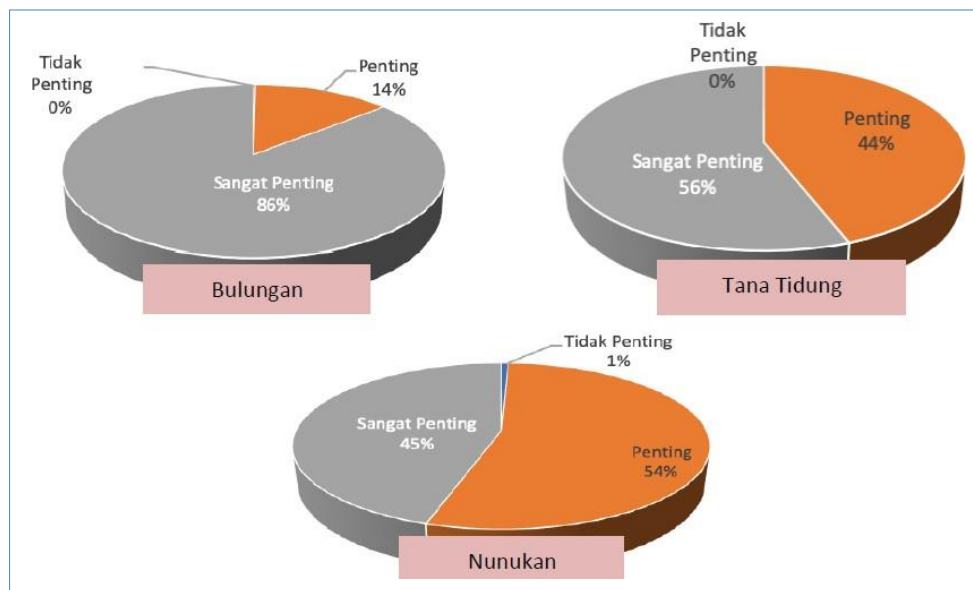


Gambar 18. Peran Alam/Lingkungan dalam Mendukung Kehidupan Keluarga

Demikian pula persepsi warga masyarakat berdasarkan wilayah studi, mengenai peran alam dalam mendukung kehidupan keluarga. Di Kabupaten Bulungan, 86% masyarakat responden telah menyatakan bahwa alam berperan sangat penting dalam mendukung kehidupan mereka. Tidak ada masyarakat yang menyatakan alam tidak memegang peranan dalam mendukung kehidupan.

Hal ini juga serupa dalam kasus di Kabupaten Tana Tidung, bahwa alam sangat berperan dalam mendukung kehidupan warga masyarakat. Sementara di Kabupaten Nunukan, meskipun persepsi masyarakat masih sangat tinggi tetapi ada masyarakat yang berpendapat alam tidak penting dalam mendukung kehidupan.

Gambar 19 berikut menunjukkan tentang persepsi masyarakat terhadap peran alam dalam mendukung kehidupan masyarakat di tiga wilayah studi ini.



Gambar 19. Peran Alam/Lingkungan dalam Mendukung Kehidupan Rumahtangga

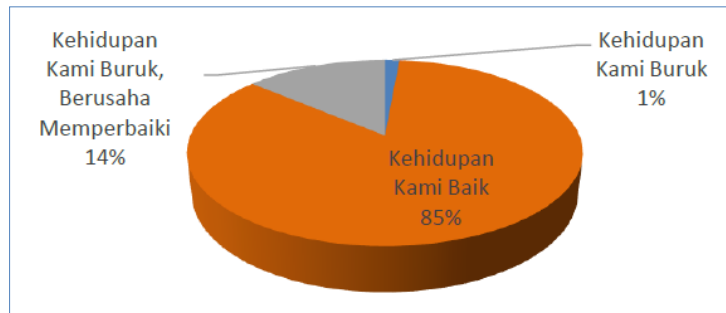
Kondisi alam yang masih cukup baik dalam mendukung kehidupan masyarakat yang ada di kawasan Delta Kayan Sembakung, adalah berbanding lurus dengan pendapat masyarakat terhadap peranan alam dalam mendukung kehidupan. Bagi warga masyarakat khususnya di pedalaman Pulau Kalimantan, maka pemaknaan terhadap kesejahteraan hidup sangat tergantung kepada ketersediaan alam dalam memenuhi kehidupan mereka (Haba, 2012).

Dalam studi yang lain disebutkan bahwa konsep 'sejahtera' bagi masyarakat ini, adalah jika sungai atau laut memiliki ketersediaan ikan, hutan dengan ketersediaan hewan-hewan buruan dan kekayaan hayati lainnya, bercocok tanam yang menghasilkan, kondisi bebatuan yang tidak berubah, gunung masih pada kondisi dan posisinya, dan keberadaan tanaman yang ada masih berbuah sesuai dengan harapan (Djuweng, 1999).

Berdasarkan pemahaman warga masyarakat tentang makna sejahtera dalam kehidupan tidak terlepas dari keutamaan dalam menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam, maka konsep pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan adalah dengan menjaga alam maupun lingkungan dengan tidak mencemari sungai atau laut, dan hanya menebang pohon sesuai dengan kebutuhan saja (Haba, 2012).

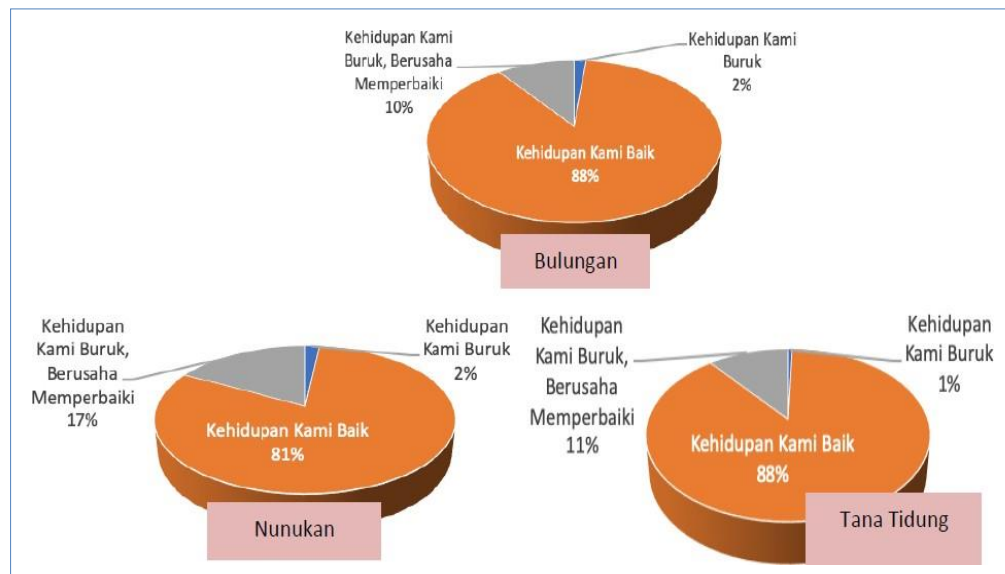
Pemaknaan sejahtera masyarakat pedalaman ini sejalan dengan hasil studi ini, yaitu tentang hakikat makna hidup yang dijalani masyarakat yang ada di kawasan Delta Kayan Sembakung bahwa

sekitar 85% masyarakat menyatakan bahwa kehidupan mereka baik. Dari 2002 responden, hanya 15% masyarakat yang beranggapan, bahwa kehidupan yang sedang dijalani dalam kondisi yang buruk sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 20.



Gambar 20. Hakikat Hidup

Pemaknaan hakikat hidup untuk masing-masing wilayah studi yang berada di kawasan Delta Kayan Sembakung dapat ditampilkan melalui Gambar 21 sebagai berikut:



Gambar 21. Hakikat Hidup Masyarakat pada Masing-masing Wilayah Studi

III.4. PANDANGAN TERHADAP PEKERJAAN DAN BARANG YANG DIHASILKAN

Ciri lain dari masyarakat tradisional terkait dengan pandangan dalam mencari nafkah, adalah masih sangat dominan dijumpai di warga masyarakat dari lokasi studi ini. Kegiatan mencari nafkah yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Delta Kayan Sembakung, dimana sebagian besar adalah masih sebatas untuk memenuhi keseharian kehidupan mereka saja atau konsep subsistensi.

Mereka tidak melakukannya untuk menambah kekayaan, apalagi untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan meningkatkan status sosial mereka sebagaimana ditampilkan dalam Gambar berikut ini.



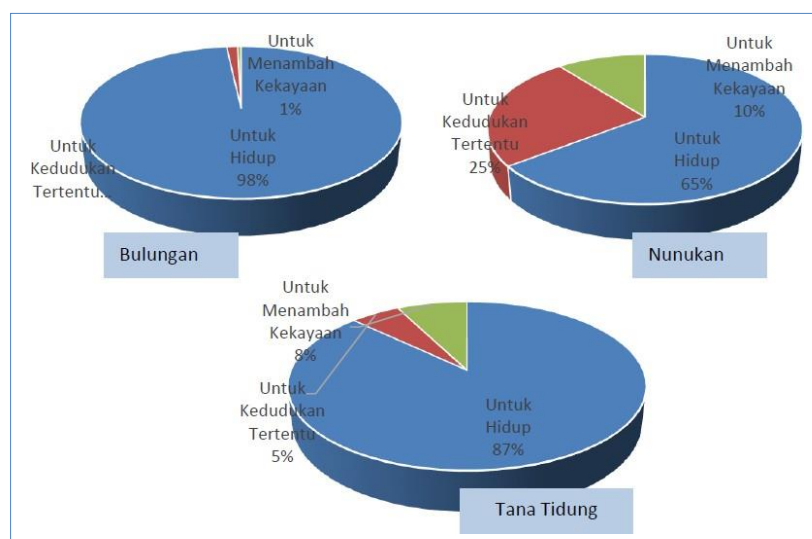
Gambar 22. Pandangan terhadap Pekerjaan, Perilaku dan Benda

Persentase dari pandangan masyarakat terhadap pekerjaan, perilaku dan benda yang cukup tinggi untuk pemenuhan keperluan hidup sehari-hari tidak jauh berbeda di masing-masing wilayah studi. Responden dari Kabupaten Bulungan, memiliki persentase nilai tertinggi yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan dan benda yang dimiliki adalah guna pemenuhan kebutuhan hidup. Diikuti dengan pandangan responden dari Kabupaten Nunukan, sementara yang terendah adalah dari Kabupaten Tana Tidung.

Perbedaan pandangan terhadap jenis pekerjaan, perilaku dan barang yang dimiliki ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian masyarakat khususnya jenis pekerjaan. Di Kabupaten Bulungan maka sebagian besar responden adalah bekerja sebagai petani, nelayan dan buruh harian. Sedangkan Di Kabupaten Nunukan ternyata selain jumlah masyarakat yang bekerja sebagai petani, nelayan dan buruh harian yang berada pada urutan tertinggi juga terdapat jenis pekerjaan dengan jumlah yang cukup besar sebagai pegawai/karyawan swasta.

Berbeda dengan data responden di Kabupaten Tana Tidung, yang menunjukkan pekerjaan tertinggi masyarakat adalah pegawai/karyawan swasta dan diikuti oleh PNS. Sedangkan masyarakat dengan pekerjaan sebagai petani, nelayan dan buruh harian justru memiliki persentase yang cukup rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Nunukan dan Bulungan.

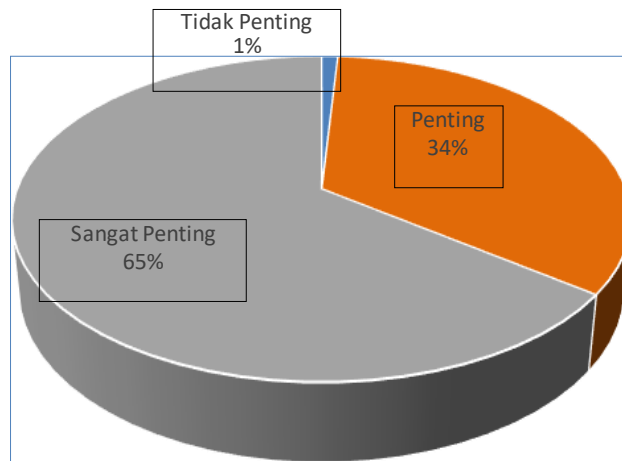
Pandangan masyarakat di tiap wilayah studi terhadap pekerjaan, perilaku dan benda dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 23. Pandangan terhadap Pekerjaan, Perilaku dan Benda

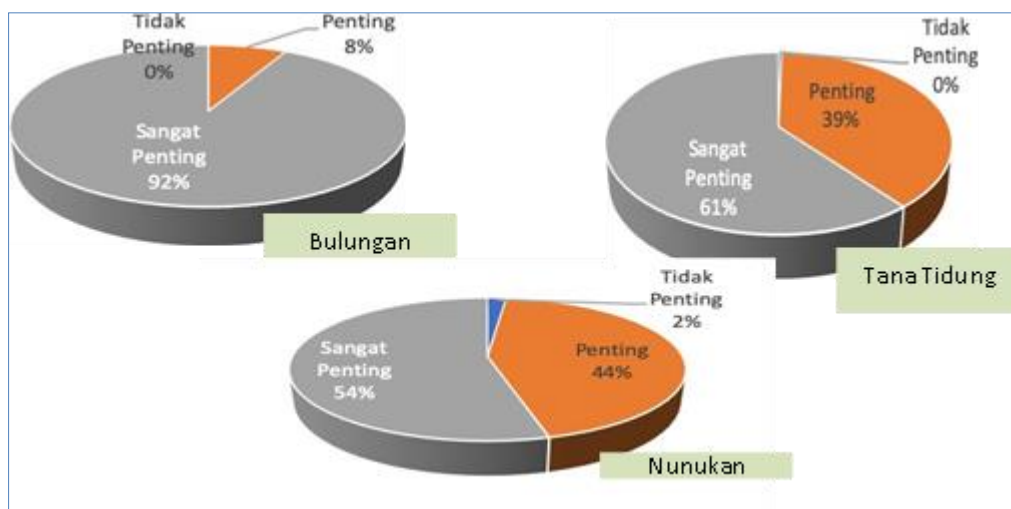
Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, maka sebagian besar barang-barang yang dibutuhkan dibuat secara mandiri oleh warga masyarakat di kawasan Delta Kayan Sembakung. Sehingga upaya ini menimbulkan kesadaran yang sangat tinggi tentang pentingnya semua barang-barang yang sudah dihasilkan. Selain karena keterbatasan baik itu akses maupun finansial dalam memperoleh barang, maka waktu untuk pengerjaan juga menjadikan mereka sangat menghargai terhadap apa yang sudah mereka hasilkan.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa 65% masyarakat menyatakan barang yang dihasilkan sangat penting dan hanya 1% yang menyatakan tidak penting sebagaimana ditambihkan Gambar 21.



Gambar 24. Penghargaan terhadap Barang yang Dibuat

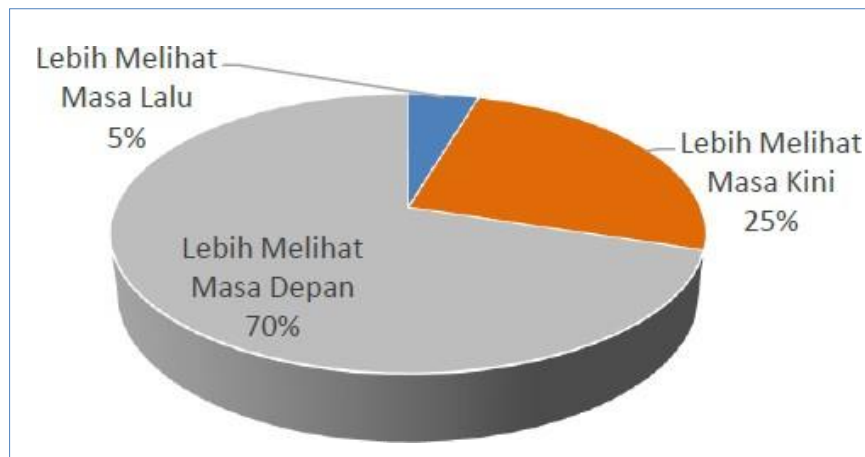
Masyarakat yang tinggal di kawasan Delta Kayan Sembakung dari Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung yang menjadi responden studi ini, adalah 100% menyatakan bahwa barang yang mereka hasilkan untuk mendukung kehidupan adalah bersifat penting. Sedangkan masyarakat di Kabupaten Nunukan sebanyak 98% menyatakan penting dan sebanyak 2% menyatakan tidak penting. Penghargaan masyarakat terhadap barang yang dihasilkan pada masing-masing lokasi studi dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.



Gambar 25. Penghargaan terhadap Barang

III.5. PANDANGAN TERHADAP WAKTU

Dari sudut pandang hakikat hidup dari masyarakat yang menjadi responden saat ini merasa dalam kondisi yang baik. Demikian juga pandangan terhadap jenis pekerjaan, perilaku dan benda hanya untuk keperluan penghidupan sehari-hari, maupun ketergantungan terhadap alam juga masih cukup tinggi. Tetapi hanya sekitar 70% warga masyarakat yang melihat masa depan adalah sesuatu yang sangat penting yang persentasenya dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.



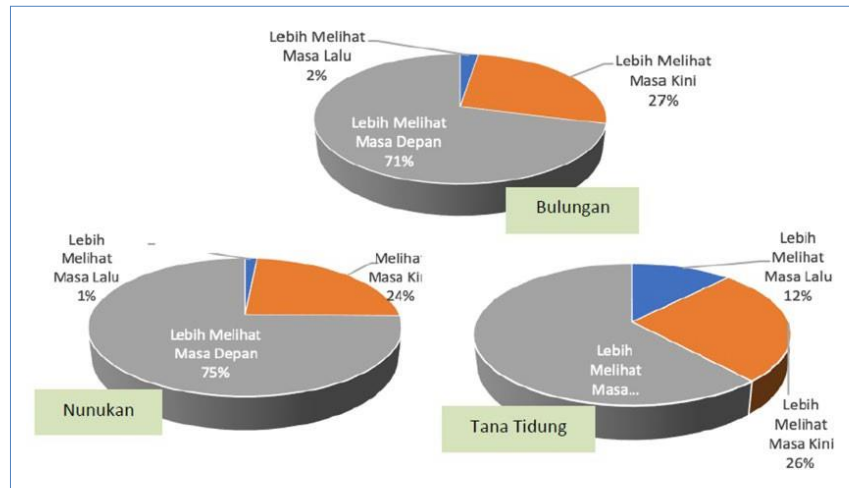
Gambar 26. Pandangan Hidup terhadap Waktu di Kawasan Delta Kayan Sembakung

Tidak berbeda dengan cara pandang secara umum warga masyarakat di kawasan Delta Kayan Sembakung dalam memandang kehidupan, maka konsep masa depan juga menjadi hal yang penting untuk tujuan yang lebih baik bagi masyarakat di Kabupaten Bulungan, Nunukan dan Tana Tidung. Ada sekitar 71% responden dari masyarakat di Kabupaten Bulungan, yang menyatakan bahwa masa depan adalah tujuan yang harus direncanakan dan dipikirkan agar apa yang sudah baik saat ini dapat menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Demikian juga dari warga masyarakat yang tinggal di Kabupaten Nunukan, yaitu kehidupan yang dirasakan telah cukup baik saat ini tidak membuat masyarakat menjadi terpaku hanya untuk kehidupan saat ini saja. Bagi mereka adalah penting untuk melihat dan merencanakan masa depan tetap menjadi jawaban yang paling dominan, yaitu bahwa tetap ada harapan agar kehidupan di masa yang akan datang bisa jauh lebih baik dari apa yang sudah ada saat ini.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh masyarakat responden dari Kabupaten Bulungan dan Nunukan, maka warga masyarakat di Kabupaten Tana Tidung berpendapat yang relatif sama. Kehidupan yang dinilai telah baik dengan ketersediaan sumber daya alam yang cukup melimpah ini, tidak menjadikan masyarakat hanya berorientasikan kepada kehidupan yang sedang dijalani saat ini. Pandangan bahwa orientasi kehidupan harus melihat ke masa depan menjadi jawaban yang paling mendominasi dan dilontarkan oleh warga masyarakat dari Kabupaten Tana Tidung.

Sebaik apapun kehidupan yang dijalani oleh responden saat ini, maka harapan untuk dapat memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang tetap menjadi impian dari seluruh masyarakat. Presentase selengkapnya dari pandangan ini dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.



Gambar 27. Pandangan Hidup terhadap Waktu pada Masing-masing Wilayah Studi

Meskipun demikian, persepsi tentang masa depan lambat laun dapat merubah paradigma berpikir di kalangan warga masyarakat dalam memaknai kehidupan termasuk alam lingkungannya. Paradigma berpikir masyarakat ini akan mengalami pergeseran seiring dengan perubahan distribusi usia, tingkat pendidikan, hubungan sosial antar etnis yang bermukim dalam suatu wilayah dan arus informasi yang diterima oleh masyarakat (Kamanto, 2000).

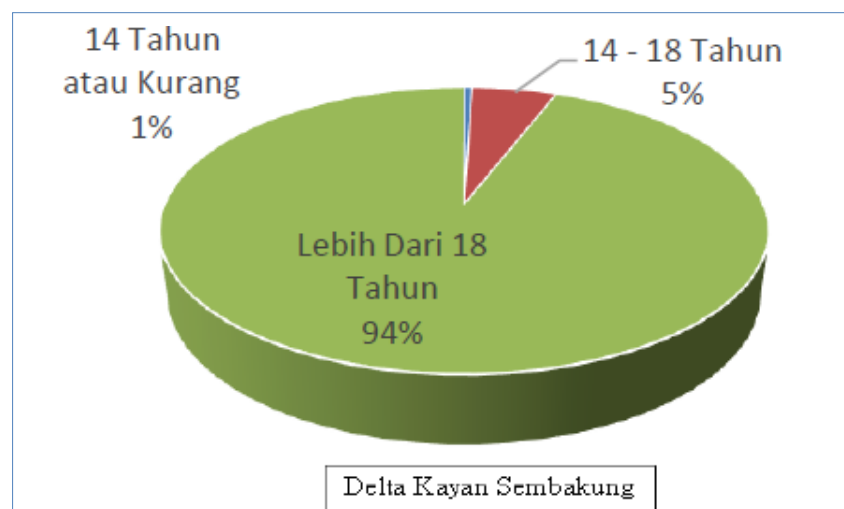
Demikian pula paradigma berpikir warga masyarakat terkait pemaknaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan di Kawasan Delta Kayan-Sembakung, khususnya terhadap Hutan Mangrove dan Gambut yang berada di lingkungannya. Dalam konteks ini, maka penting untuk dapat dilakukan edukasi dan sosialisasi, mengenai pentingnya peranan hutan tersebut dalam mendukung ekosistem dan kehidupan di masa sekarang serta di kemudian hari yang menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak.

BAGIAN V: HASIL STUDI – GENDER

V.1. KEGIATAN DOMESTIK DALAM RUMAH TANGGA

V.1.1. Usia Suami Menikah

Dari hasil data yang diisi oleh responden warga masyarakat yang hidup di kawasan mangrove dan gambut di lanskap Delta Kayan Sembakung, ternyata sekitar 94% usia suami menikah di atas 18 tahun, ada 5% responden yang mengungkapkan suami menikah dalam usia antara 14-18 tahun, serta hanya 1% menikah di usia kurang dari 14 tahun sebagaimana Gambar berikut ini.



Gambar 28. Usia Suami Menikah di Kawasan Delta Kayan Sembakung

Dalam hal usia laki-laki/usia suami menikah di Kabupaten Bulungan didapatkan persentase 95% laki-laki menikah di usia lebih dari 18 tahun sementara 5% menikah di usia antara 14-18 tahun dengan nilai rerata kondisi yang relatif sama di semua desa lokasi studi. Usia dari suami menikah di Kabupaten Tanah Tidung adalah sekitar 96% menikah di usia lebih dari 18 tahun, dengan hanya ada 4% yang menikah di usia antara 14-18 tahun. Bahkan secara khusus di Desa Bebatu, Desa Rian, Desa Sengkong, dan Sepala Dalung ternyata 100% suami menikah di usia lebih dari 18 tahun.

Usia menikah suami di Kabupaten Nunukan berdasarkan survei menunjukkan persentase suami yang menikah di usia lebih dari 18 tahun sebanyak 93%, yang menikah di usia antara 14-18 tahun adalah sebesar 6% dan yang menikah di bawah 14 tahun adalah sebesar 1%. Secara khusus di Desa Binusan, Desa Butas Bagu, Desa Katul dan Desa Tepian menunjukkan persentase suami yang menikah di usia lebih 18 tahun adalah sebesar 100%.

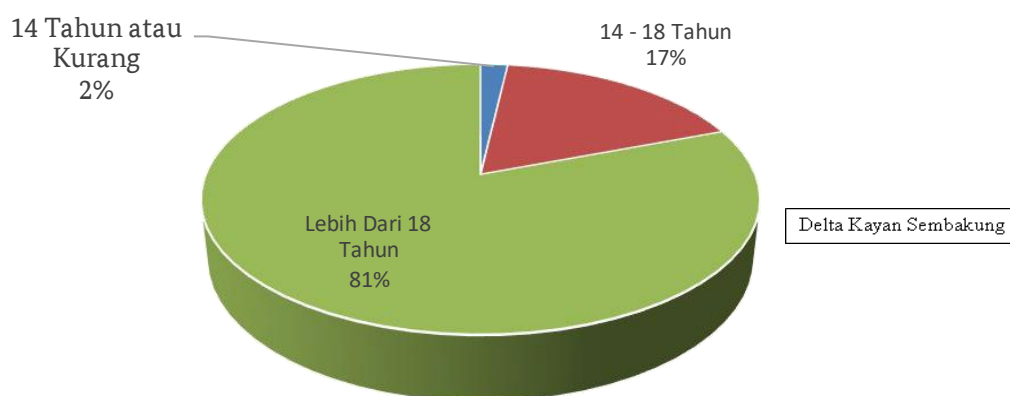
Tetapi ada data menarik dari Desa Apas, yaitu persentase suami menikah di usia lebih dari 12 tahun adalah 60%, antara 14-18 sebesar 24% dan 16% justru menikah di usia yang kurang dari 14 tahun.



Gambar 29. Usia Suami Menikah di Wilayah Studi

V.1.2. Usia Istri Menikah

Hasil survei menunjukkan persentase usia istri/perempuan menikah yang tinggal di kawasan mangrove dan gambut di lanskap Delta Kayan Sembakung telah menunjukkan 81% perempuan/istri menikah di usia lebih dari 18 tahun, sekitar 17% perempuan/istri menikah di usia antara 14-18 tahun, dan hanya 2% saja yang menikah di usia kurang dari 14 tahun sebagai Gambar berikut ini.



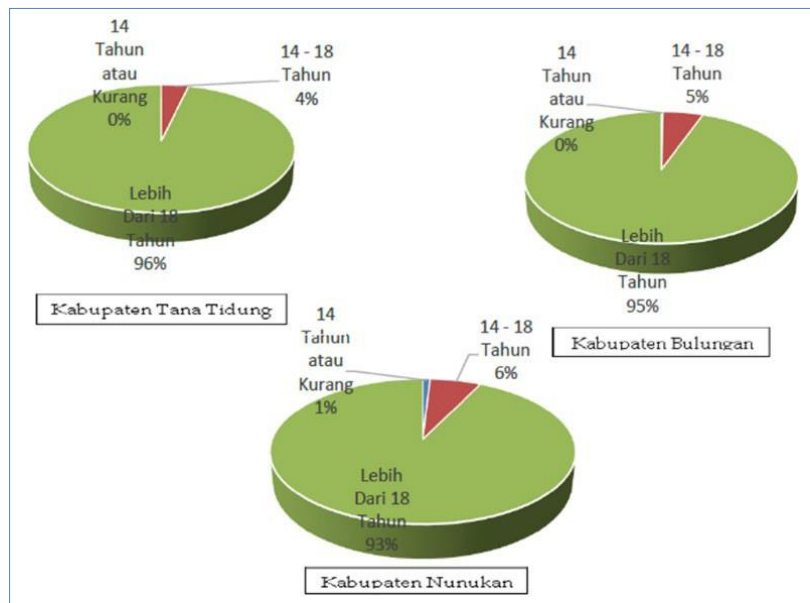
Gambar 30. Usia Istri Menikah di Kawasan Delta Kayan Sembakung

Di Kabupaten Bulungan, hasil survei menunjukkan persentase 73% responden perempuan/istri menjawab menikah di usia lebih 18 tahun, 24% perempuan/istri menikah di usia antara 14-18 tahun. Di Desa Tanjung Buka hasilnya menunjukkan bahwa 36% istri menikah di usia 14-18 tahun, sementara di Desa Salimbatu angkanya adalah 26% dan Desa Tanjung Buka angkanya adalah 18%. Desa Liagu menunjukkan data bahwa 99% perempuan/istri adalah menikah di usia lebih dari 18 tahun.

Di Kabupaten Tana Tidung, hasil survei menunjukkan ssia istri menikah persentasenya yaitu 96% dengan usia lebih dari 18 tahun, sementara yang menikah di usia antara 14-18 tahun hanya ada sekitar 4%. Secara khusus di Desa Bebatu, Desa Rian, Desa Sengkong dan Desa Sepalang Dalung adalah 100% istri menikah di usia lebih 18 tahun. Sementara di Desa Tengku Dacing ada sekitar 32% istri menikah di usia antara 14-18 tahun, sementara 5% dari responden (2 responden) mengatakan bahwa mereka menikah di usia kurang dari 14 tahun.

Usia istri menikah di Kabupaten Nunukan dari hasil survei menunjukkan persentase yaitu sekitar 76% istri menikah di usia lebih dari 18 tahun, 22% menikah di usia antara 14-18 tahun dan 2% menikah di usia yang kurang dari 14 tahun. Secara khusus di Desa Binusan, Desa Butas Bagu, Desa Katul, Desa Lubakan, Desa Manuk Bungkul, Desa Tagul dan Desa Tepian menunjukkan rerata suami menikah di usia lebih 18 tahun memiliki persentase yang cukup tinggi yakni antara 80-100%.

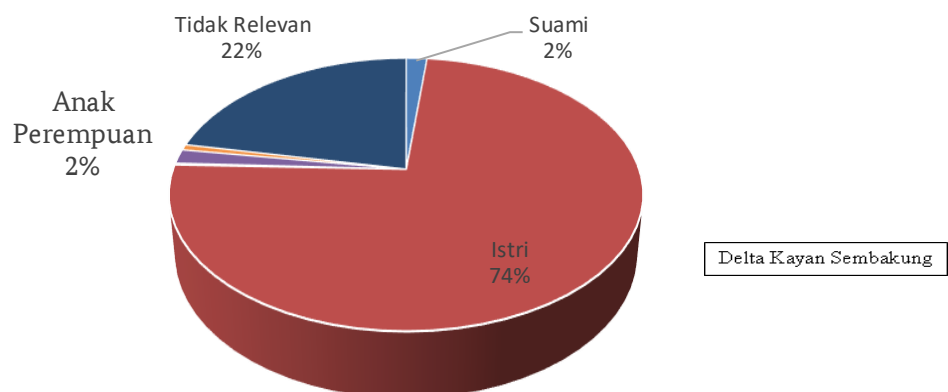
Namun hal yang berbeda terjadi di Desa Tetaban dimana persentase perempuan menikah diusia 14-18 tahun adalah relatif cukup tinggi yakni 57%, juga di Desa Apas yaitu sekitar 41% dengan Desa Kekayap yang angkanyamencapai 42%.



Gambar 31. Usia Istri Menikah di Wilayah Studi

V.1.3. Pengasuh Balita Dalam Rumah Tangga

Keterlibatan perempuan dalam urusan rumah tangga di Desa -Desa dalam kawasan mangrove dan gambut di lanskap Delta Kayan Sembakung masih dominan, dengan data survei menunjukkan 74 % perempuan mengambil peran utama dalam pengasuhan anak. Sementara 22% responden menjawab tidak relevan karena belum memiliki balita atau belum menikah.

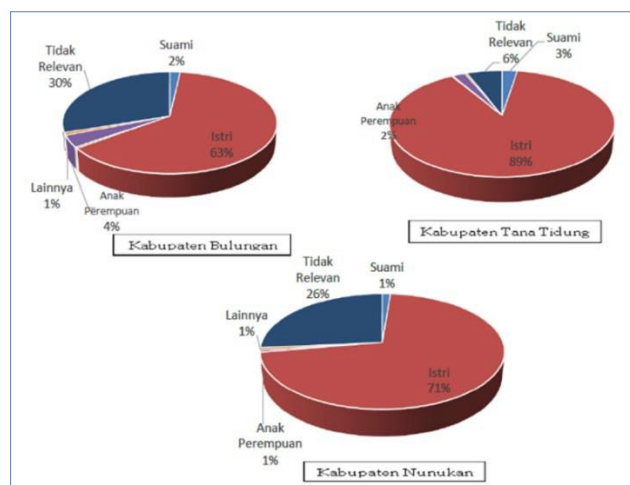


Gambar 32. Pengasuh Balita dalam Rumahtangga di Kawasan Delta Kayan Sembakung

Dalam hal mengasuh balita di Kabupaten Bulungan, hasil survei menunjukkan rata-rata 63 % yang berperan dalam pengasuhan anak adalah perempuan/istri khususnya di Desa salimbatu, Desa Tanah Tuning dan Desa Tanjung buka, sementara di Desa Liagu hanya sekitar 14 % peran anak perempuan dalam keluarga yang menjadi pengasuh balita.

Dari Kabupaten Tana Tidung (KTT), hasil survei menunjukkan terdapat 89% balita diasuh oleh istri. Bahkan di Desa Rian dan Desa Sengkong menunjukkan persentase istri yang mengasuh anak adalah 100% dari responden.

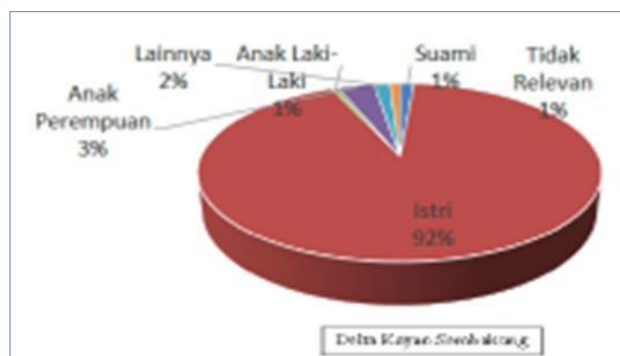
Data survei dari Kabupaten Nunukan adalah rerata pihak istri berperan 71%, sementara 26% responden mengatakan pertanyaan ini tidak relevan karena sebagian responden ini belum memiliki balita atau belum menikah. Khusus di Desa Tetaban, Desa Apas, Desa Butas Bagu, Desa Kekayap, Desa Kunyit, Desa Lubakan, Desa Manuk Bungkul, Desa Tagul dan Desa Tepian menunjukkan lebih dari 90% responden menjawab bahwa pihak istri adalah yang paling berperan dalam mengasuh balita.



Gambar 33. Pengasuh Balita dalam Rumahtangga di Wilayah Studi

V.1.4. Membersihkan Rumah

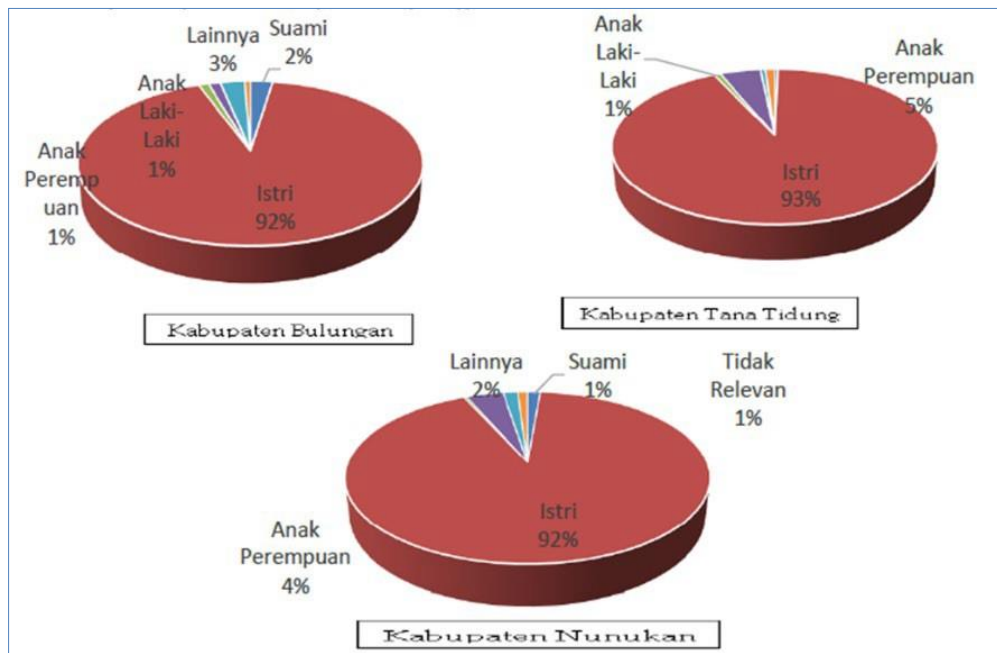
Keterlibatan perempuan dalam urusan rumah tangga di Desa-Desa dalam kawasan mangrove dan gambut di Delta Kayan Sembakung masih dominan dengan hasil survei menunjukkan 92 % perempuan bertugas membersihkan rumah dan mengatur menu makan dalam keluarga. Sebanyak 3% dilakukan oleh anak perempuan dan hanya 1% dilakukan oleh anak laki-laki sebagaimana ditampilkan dalam Gambar berikut ini.



Gambar 34. Yang Bertugas Membersihkan Rumah di Kawasan Delta Kayan Sembakung

Di Kabupaten Bulungan, hasil survei menunjukkan persentase dari peranan perempuan dalam membersihkan dan menjaga kebersihan rumah cukup tinggi yaitu sebesar 92 % sedang pihak suami hanya sekitar 2% yang terlibat dalam membersihkan rumah. Di Kabupaten Tana Tidung, hasil survei ini menunjukkan sebesar 93% yang membersihkan rumah adalah istri, dan 5% dibantu oleh anak perempuan.

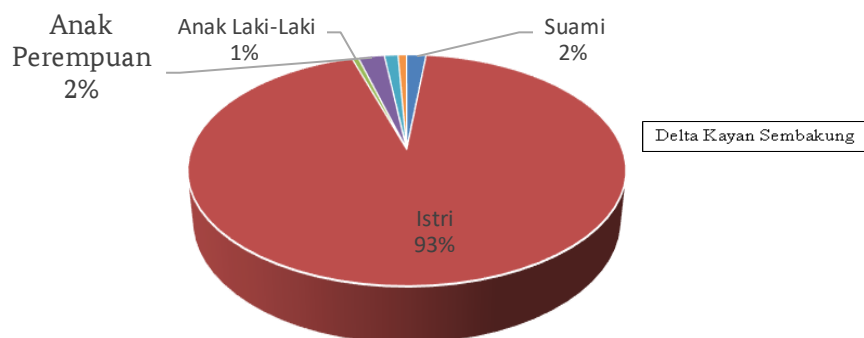
Persentase perempuan/istri yang membersihkan rumah lebih tinggi di Kabupaten Nunukan yakni dengan nilai rerata 91%, oleh anak perempuan sebesar 4% dan pihak suami hanya 1%. Kondisi ini hampir terjadi di setiap desa pengamatan, dan secara lengkap hasil survei ini dapat ditampilkan di dalam Gambar sebagai berikut:



Gambar 35. Yang Bertugas Membersihkan Rumah di Wilayah Studi

V.1.5. Pengatur Menu Masakan Dalam Rumah Tangga

Terkait dengan yang mengatur menu makanan dalam rumah tangga, hasil survei ini telah menunjukkan bahwa di Desa-Desa dalam kawasan mangrove dan gambut di lanskap Delta Kayan Sembakung adalah 93% didominasi istri. Sementara suami dan anak perempuan hanya 2% saja yang terlibat dalam pengaturan menu makan keluarga, yang secara lengkap ditampilkan dalam Gambar X berikut ini.

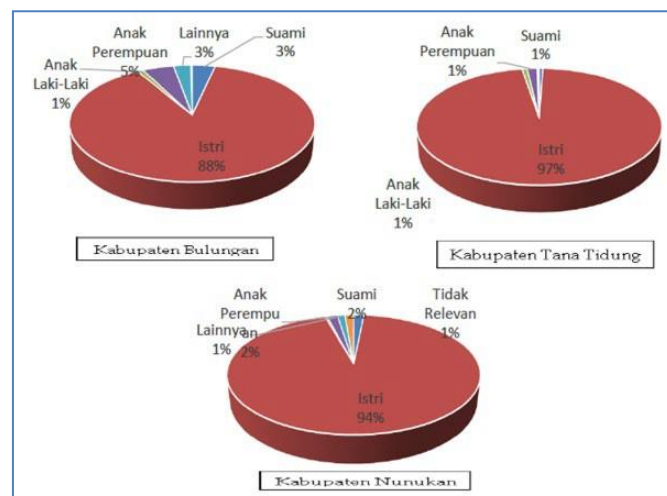


Gambar 36. Pengatur Menu Masakan dalam Rumahtangga

Perempuan/istri juga memiliki peran yang tinggi dalam pemilihan menu masakan, dan ini terlihat dari data dari Kabupaten Bulungan dimana sebesar 88% perempuan/istri yang menentukan menu makan keluarga. Di Kabupaten Tana Tidung, data survei menunjukkan istri berperan lebih dominan dalam mengatur menu makan yakni 97% sedangkan peranan anak perempuan, anak laki-laki dan suami hanya sebesar 1%.

Di Kabupaten Nunukan, hasil survei juga menunjukkan pengaturan menu makan adalah perempuan dengan nilai rerata 94% menu makan diatur oleh istri, sisanya 2% masing-masing diatur oleh anak perempuan dan oleh suami. Kondisi ini hampir terjadi di semua wilayah studi seperti Desa Tetaban, Desa Apas, Desa Binusan, Desa Butas Bagu, Desa Katul, Desa Kekayap, Desa Kunyit, Desa Lubakan, Desa Manuk Bungkul, Desa Tagul, Desa Tanjung Harapan dan Desa Tepian.

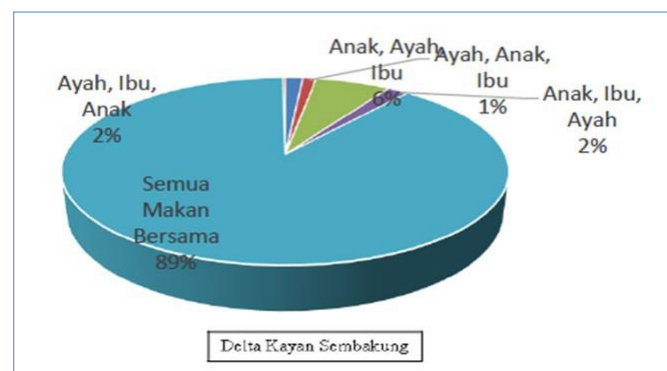
Data pengaturan menu makanan ini ditampilkan di Gambar sebagai berikut:



Gambar 37. Pengatur Menu Masakan dalam Rumahtangga di Wilayah Studi

V.1.6. Urutan Pembagian Makanan

Dalam hal urutan pembagian makanan, hasil survei menunjukkan bahwa rumah tangga dari Desa-Desa di kawasan mangrove dan gambut di lanskap Delta Kayan Sembakung sekitar 89% tidak memiliki urutan yang jelas. Dalam arti semua dapat makan bersama-sama saja, tetapi ada sekitar 6% responden menjawab bahwa ada urutan yaitu anak-ayah-ibu, 2% dengan urutan anak-ibu-ayah, dan 2% ayah-ibu-anak ditampilkan secara lengkap dalam Gambar sebagai berikut.

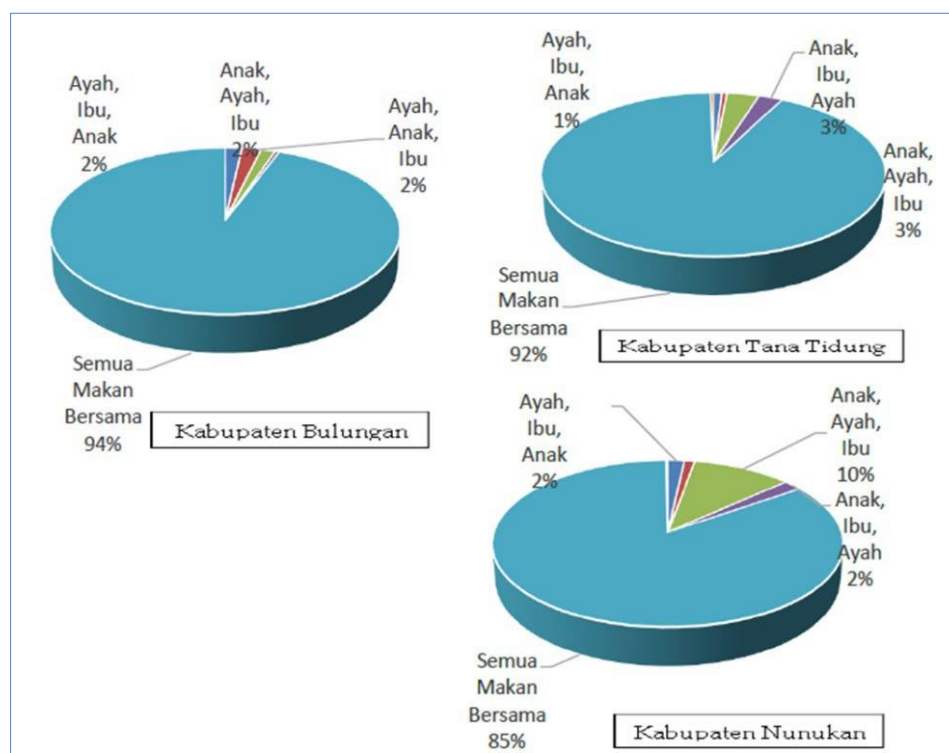


Gambar 38. Urutan Pembagian Makan dalam Rumahtangga

Hasil survei terkait urutan pembagian makanan di rumah tangga dari Kabupaten Bulungan menunjukkan sekitar 94% responden yang menjawab tidak ada urutan yang jelas dalam pembagian makanan. Semuanya menjawab dapat makan secara bersama-sama tanpa mesti mendahulukan ayah, ibu, ataupun yang lain. Rata-rata hal ini terjadi di semua desa lokasi survei.

Sementara di Kabupaten Tana Tidung, sekitar 92% responden menyatakan bahwa dalam hal makan semua anggota bersama-sama makan dapat makan tanpa harus didahului anggota keluarga lain. Tetapi khusus di Desa Rian hasil survei menunjukkan 50% responden mengatakan dimulai dari anak-ayah dan terakhir ibu, dan 50% lagi responden mengungkapkan makan secara bersama-sama.

Di Kabupaten Nunukan, hasil survei menunjukkan sebesar 85% responden mengatakan tidak ada urutan yang jelas dalam hal makan dan semua anggota keluarga bisa makan bersama-sama tetapi 10% adalah menggunakan urutan anak-ayah-ibu. Hal ini terjadi di hampir semua desa di Kabupaten Nunukan, tetapi khusus untuk Desa Tepian sebesar 65% responden menjawab urutan makan dimulai dari anak-ayah dan terakhir ibu, sedangkan 28% responden menjawab makan secara bersama-sama.

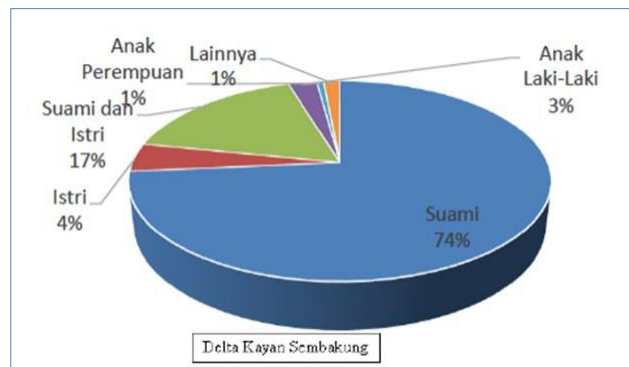


Gambar 39. Urutan Pembagian Makan dalam Rumahtangga

BAGIAN VI: HASIL STUDI – PERAN PRODUKTIF

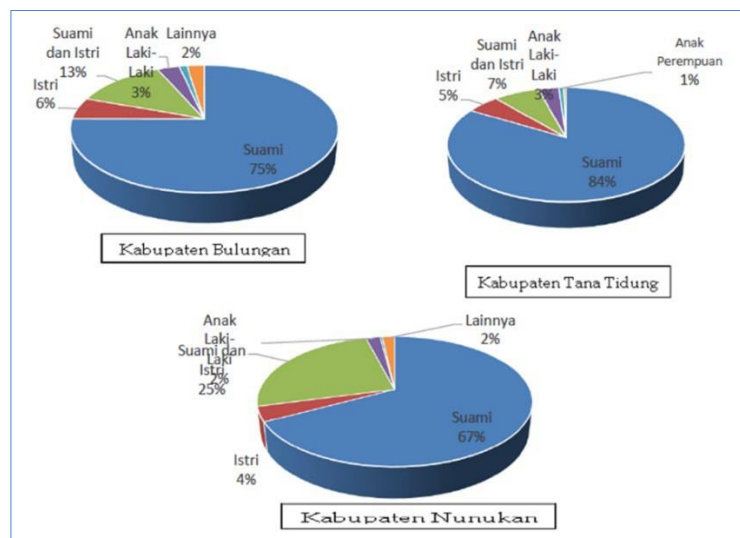
VI.1. PENCARI NAFKAH

Berdasarkan hasil survei dalam isu tentang gender di Desa-Desa dalam kawasan mangrove dan gambut di lanskap Delta Kayan Sembakung, maka sebanyak 74 % pencari nafkah dalam rumah tangga adalah pria dan hanya 4% saja perempuan yang membantu untuk mencari nafkah keluarga yang ditampilkan Gambar sebagai berikut:



Gambar 40. Pencari Nafkah dalam Rumahtangga

Hasil survei tentang siapa pencari nafkah di Kabupaten Bulungan menunjukkan data dari Desa Salimbatu, Desa Liagu, Desa Tanah Kuning dan Desa Tanjung Buka 76% adalah suami dengan besaran pencari nafkah dari pihak istri adalah 17 %. Bahkan di Desa Tanah Kuning dengan di Desa Salimbatu menunjukkan persentasi suami dalam mencari nafkah ini mencapai 95 %. Hanya di Desa Tanjung Buka muncul hasil survei yang menunjukkan 66 % suami yang mencari nafkah sedangkan 21 % suami dan istri ikut dalam mencari nafkah untuk keluarga.



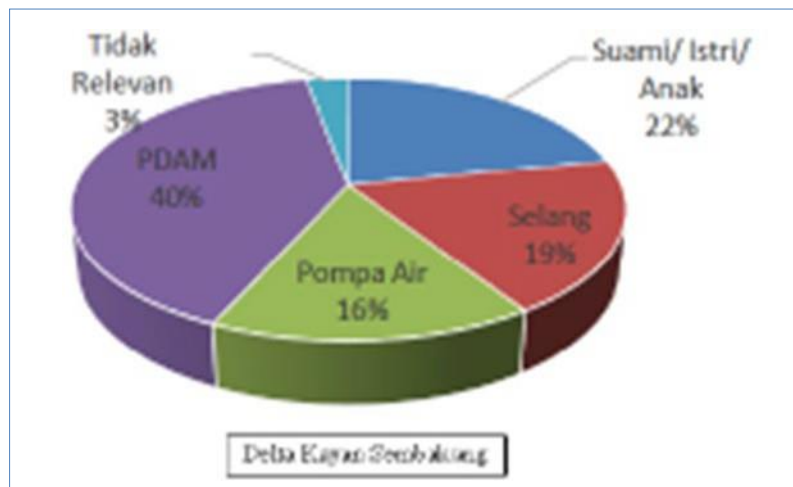
Gambar 41. Pencari Nafkah dalam Rumahtangga di Wilayah Studi

Hasil survei di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan 84% yang mencari nafkah adalah suami, 7% suami bersama-sama istri, dan 5% responden yang mengatakan istri yang mencari nafkah keluarga. Sementara di Kabupaten Nunukan, dari total responden 979 menunjukkan pencari nafkah ini adalah 67% responden mengatakan bahwa yang berperan mencari nafkah adalah laki-laki/suami, 25% mengatakan bahwa suami dan istri yang mencari nafkah, dan 4% yang mencari nafkah istri.

Fenomena suami istri yang mencari nafkah keluarga lebih dominan terlihat di Desa Butas Bagu dan Desa Katul dengan data survei menunjukkan angka 56% dan 95% adalah peran suami dan istri. Sementara di Desa Tetaban, Desa Apas, Desa Binusan, Desa Kekayap, Desa Kunyit, Desa Lubakan, Desa Manuk Bungkul, Desa Tagul, Desa Tanjung Harapan, dan Desa Tepian menunjukkan data hasil survei yang dominan menjawab suami sebagai pihak yang mencari nafkah keluarga.

VI.2. AKSES AIR RUMAH TANGGA

Hasil survei terkait dengan persentase untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga di desa-desa dalam kawasan mangrove dan gambut di lanskap Delta Kayan Sembakung menunjukkan angka 22% adalah kerjasama di antara suami, istri dan anak. Sekitar 40% mendapatkan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 16% sudah menggunakan pompa air dan 19% responden mengaliri air dengan menggunakan selang yang dapat ditunjukkan dalam Gambar sebagai berikut:

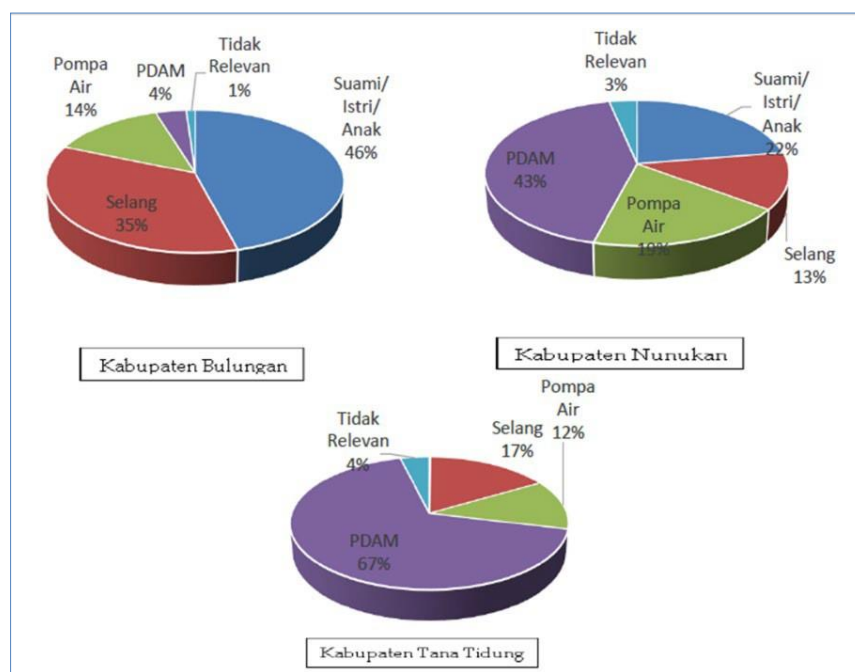


Gambar 42. Akses Memperoleh Air untuk Rumahtangga

Di Kabupaten Bulungan, data hasil survei menunjukkan persentase pihak yang mengakses sumberdaya air adalah 46% dilakukan oleh suami, istri dan anak. Sedangkan sebanyak 36% adalah mengakses melalui selang/pipa yang dialirkan dari sumber/mata air, serta sebagian yang lain telah menggunakan pompa air. Penggunaan selang/pipa adalah mayoritas dilakukan di Desa Liagu yaitu sebesar 82%, hal ini karena belum ada pompa atau sumber air di sekitar tempat tinggalnya.

Akses air untuk kebutuhan rumah tangga di Kabupaten Tana Tidung adalah sebanyak 67% dari PDAM, 17 % masih menggunakan selang dan 12 % pompa menggunakan pompa air. Sementara di Kabupaten Nunukan data survei menunjukkan 43% responden telah menggunakan saluran air dari PDAM, 19% menggunakan pompa air dengan menggunakan air tanah, 13% menggunakan selang dengan mengambil air dari sumber mata air, dan 22 % responden mengakses air dengan bantuan anggota keluarga (suami, istri dan anak).

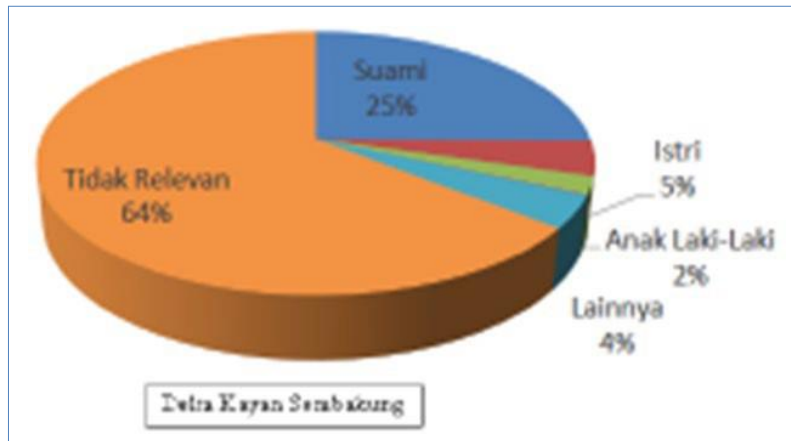
Desa yang paling dominan menggunakan PDAM ini adalah Desa Binusan dengan 100% responden menjawab PDAM, sementara di Desa Tanjung Harapan terdapat sekitar 44% responden yang telah menggunakan air PDAM. Di Desa Apas, Desa Katul, dan Desa Tepian sudah ada lebih dari 85% yang menggunakan pompa air. Di Desa Butas Bagu dan Desa Kunyit, lebih dari 65% warga yang menjadi responden masih menggunakan selang dalam mengakses sumber air keluarga. Sementara di Desa Tetaban, Desa Kekayap, Desa Lubakan, Desa Manuk Bungkul, dan Desa Tagul nilai reratanya adalah lebih dari 65%.



Gambar 43. Akses Memperoleh Air di Wilayah Studi

VI.3. PENGAMBIL KAYU BAKAR

Peran mencari kayu bakar di kalangan masyarakat Desa-Desa dalam kawasan mangrove dan gambut di lanskap Delta Kayan Sembakung menunjukkan hasil survei sebanyak 25 % dilakukan oleh suami, istri 5% dan anak laki-laki 2%. Sementara sebanyak 64% responden menjawab pertanyaan ini tidak relevan, karena sebagian besar warga masyarakat tidak lagi menggunakan kayu bakar untuk kegiatan memasak namun sudah menggunakan gas alam, minyak tanah dan lain sebagainya



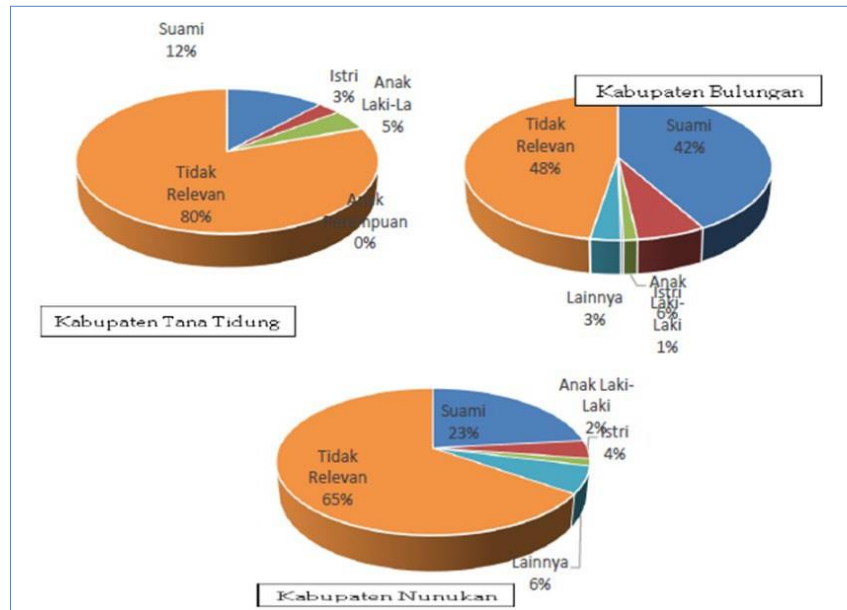
Gambar 44. Pengambil kayu bakar

Di Kabupaten Bulungan, hasil survei menunjukkan sebanyak 42% dilakukan oleh suami dan hanya 6 % peran ini dilakukan oleh perempuan/istri. Sementara sebanyak 48% pertanyaan ini tidak relevan karena masyarakat/responden, telah menggunakan fasilitas gas atau minyak tanah sehingga tidak memerlukan kayu bakar dalam kegiatan sehari-hari.

Sementara di Kabupaten Tana Tidung, 12% pencarian kayu dilakukan oleh suami, dan 80 % responden menjawab tidak relevan mengingat masyarakat telah menggunakan gas elpiji dan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Khusus di Desa Tengku Dacing, data hasil survei menunjukkan peran suami lebih dominan yang mencari kayu bakar adalah 82%. Sementara di Desa Rian yang berperan untuk mencari kayu bakar ialah anak laki-laki dengan persentasenya mencapai 54%.

Di Kabupaten Nunukan, hasil survei menunjukkan sebanyak 65% responden studi tidak lagi menggunakan kayu bakar dalam kegiatan sehari-hari karena telah menggunakan fasilitas gas alam, elpiji maupun minyak tanah sehingga pertanyaan mengenai siapa yang berperan mencari kayu bakar dirasa tidak relevan lagi.

Masih ada responden yang memanfaatkan kayu bakar yaitu ada sekitar 23% kayu bakar dicari oleh suami, dan 4% oleh perempuan/istri. Peran Laki-laki/suami dalam mencari kayu bakar sangat terlihat di Desa Apas, Desa Kekayap, Desa Kunyit, Desa Lubakan, Desa Tagul dan Desa Tepian. Peranan perempuan/istri dalam mencari kayu bakar terlihat cukup tinggi di Desa Tetaban yaitu 36% dan Desa Manuk Bungkul yaitu mencapai 31%.

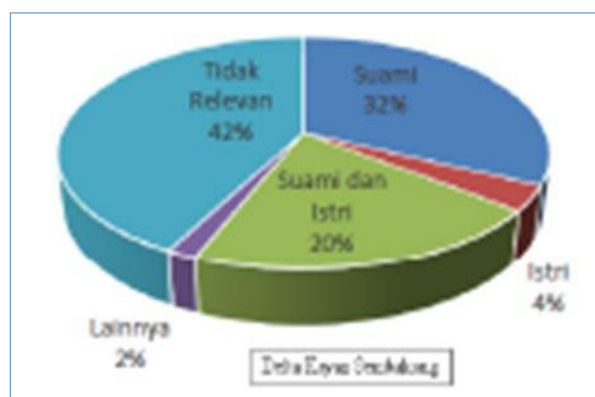


Gambar 45. Pengambil Kayu Bakar di Wilayah Studi

VI.4. PENENTU JENIS KOMODITAS PERTANIAN

Hasil survei juga menanyakan pihak penentu jenis komoditas pertanian yang menunjukkan suami adalah cukup dominan, di dalam menentukan komoditas pertanian yang akan dibudidayakan dalam kawasan mangrove dan gambut di lanskap Delta Kayan Sembakung.

Hasilnya menunjukkan sekitar 32% ditentukan oleh suami, 20% ditentukan oleh kesepakatan antara suami dan istri, dan hanya oleh istri saja sebanyak 4%. Sekitar 42% responden menjawab pertanyaan ini tidak relevan karena sebagian responden tidak mengusahakan pertanian dalam kegiatan rumah tangganya.



Gambar 46. Penentu Jenis Komoditas Pertanian

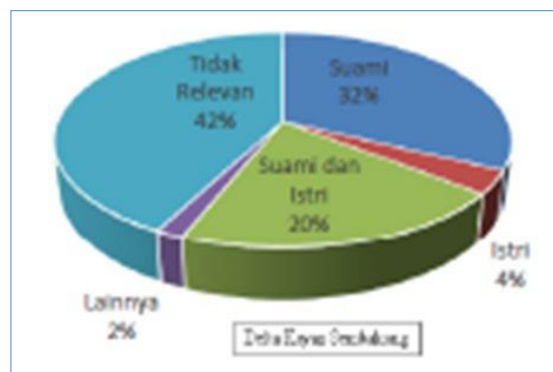
Dalam hal penentu komoditas pertanian di Kabupaten Bulungan yang akan dibudidayakan menunjukkan sebanyak 44% ditentukan oleh suami, 9% ditentukan oleh kesepakatan suami dan istri

dan hanya 3% oleh istri saja. sementara ada 43% responden menjawab pertanyaan ini tidak relevan karena sebagian responden tidak mengusahakan sektor pertanian sebagai pencari nafkah. Nilai rerata ini muncul di Desa Tanjung Buka dan Tanah Kuning, kecuali Desa Liagu dan Desa Salimbatu yang mayoritas responden menjawab tidak relevan.

Di Kabupaten Tana Tidung, hasil survei menunjukkan bahwa penentu komoditas pertanian adalah 38% responden ditentukan oleh kesepakatan suami dan istri, 32% ditentukan oleh suami saja, 4% ditentukan oleh istri. Terdapat 22% responden menjawab pertanyaan ini tidak relevan, karena sebagian responden tidak mengusahakan pertanian dalam kehidupan rumahtangganya. Kondisi ini rerata terjadi di hampir seluruh desa di Kabupaten Tana Tidung, kecuali di Desa Sepalang Dalung dengan hasil studi menunjukkan 63% ditentukan oleh suami, dengan di Desa Sengkong dengan 100% responden mengatakan ditentukan oleh pihak suami saja.

Kabupaten Nunukan menunjukkan hasil survei ini adalah ditentukan oleh suami yaitu 26%, kesepakatan suami dan istri 22%, dan istri saja sebesar 4%. Yang menjawab tidak relevan sebesar 47%, karena mereka tidak mengusahakan sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan rumahtangganya.

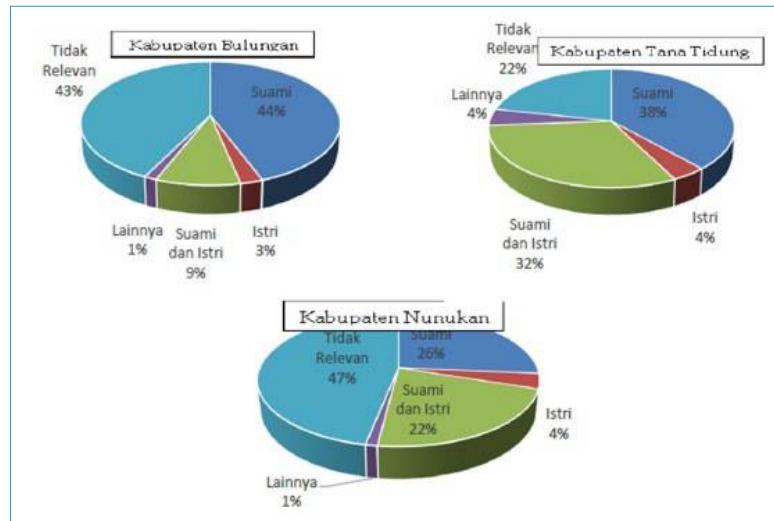
Persentase penentu komoditas pertanian oleh suami yang tinggi terdapat di Desa Tetaban yaitu 52%, Desa Kunyit 94%, dan Desa Tepian 89%. Sementara responden yang menjawab tidak relevan ada di Desa Apas 58%, Desa Binusan 82%, Desa Butas Bagu 68%, Desa Kekayap 58%, dan Tanjung Harapan yang mencapai angka 90%.



Gambar 47. Penentu Jenis Komoditas Pertanian di Wilayah Studi

VI.4. PENENTU JENIS USAHA DI LUAR SEKTOR PERTANIAN

Hasil survei terkait dengan pertanyaan tentang penentu jenis usaha di luar sektor pertanian di kawasan mangrove dan gambut di Delta lanskap Kayan Sembakung menunjukkan sebanyak 28% adalah ditentukan oleh suami istri, 19% ditentukan oleh suami saja dan 7% istri saja. Sementara 43% responden menjawab pertanyaan ini tidak relevan, karena sebagian belum atau tidak memiliki usaha diluar pertanian. Data lengkap hasil survei ini ditunjukkan dalam Gambar sebagai berikut:



Gambar 48. Penentu Jenis Usaha Diluar Sektor Pertanian

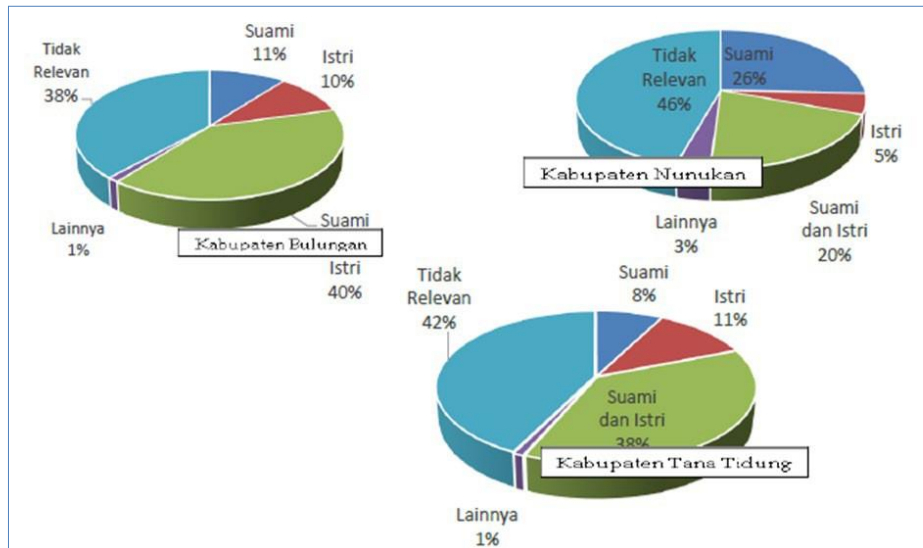
Di Kabupaten Bulungan, hasil survei menunjukkan bahwa penentu jenis usaha di luar sektor pertanian adalah 40% ditentukan oleh kesepakatan suami dengan istri, 11% ditentukan suami, dan 10% oleh istri saja. Sementara 38% responden menjawab pertanyaan ini tidak relevan dikarenakan sebagian masyarakat yang menjadi responden tidak melakukan kegiatan usaha diluar pertanian. Di Desa Liagu, hasil survei menunjukkan peranan istri cukup besar dalam menentukan kegiatan usaha diluar pertanian yaitu 30%, sementara berdasarkan antara suami dan istri adalah 44%.

Di Kabupaten Tana Tidung, hasil survei terkait keputusan dalam menentukan kegiatan usaha lain diluar pertanian menunjukkan angka 38% responden mengatakan keputusan ditentukan oleh suami istri, 11% oleh istri saja dan 8% hanya oleh suami saja. Sementara 42% responden menganggap pertanyaan ini tidak relevan, karena sebagian warga masyarakat tidak mengusahakan usaha lain di luar sektor pertanian.

Kondisi ini terjadi secara merata pada hampir seluruh desa yang menjadi lokasi studi ini di Kabupaten Tana Tidung. Meskipun ada kasus di Desa Tengku Dacing dimana total 23% responden mengatakan bahwa istri berperan dalam pengambilan keputusan, dan 75% berdasarkan kesepakatan suami istri. Di Desa Tideng Pale juga menunjukkan data berasal dari keputusan istri 26%, keputusan suami 32% dan kesepakatan keduanya sebesar 26%.

Di Kabupaten Nunukan, hasil survei menunjukkan keputusan jenis usaha sektor lain diluar pertanian yang diusahakan adalah ditentukan oleh suami sebesar 26%, kesepakatan suami dan istri 20%, dan hanya istri saja sebesar 5%. Selain itu ada yang menganggap pertanyaan ini tidak relevan yaitu sebesar 46%, karena sebagian masyarakat tidak memiliki atau punya rencana usaha lain diluar komoditas pertanian.

Kasus Di Desa Lubakan menunjukkan suami memiliki persentase yang cukup besar dalam penentuan keputusan ini yaitu sebesar 68%, Desa Tagul 44%, dan Desa Tepian 89% ditentukan oleh suami saja. Sementara yang ditentukan oleh suami istri dengan nilai cukup tinggi yaitu Desa Tetaban 40%, Desa Katul 65%, Desa Kunyit 47%, dan Desa Manuk Bungkul 30%. Sedangkan di Desa Tagul ada 30% istri saja yang menentukan keputusan dalam melakukan usaha di sektor lain di luar pertanian.

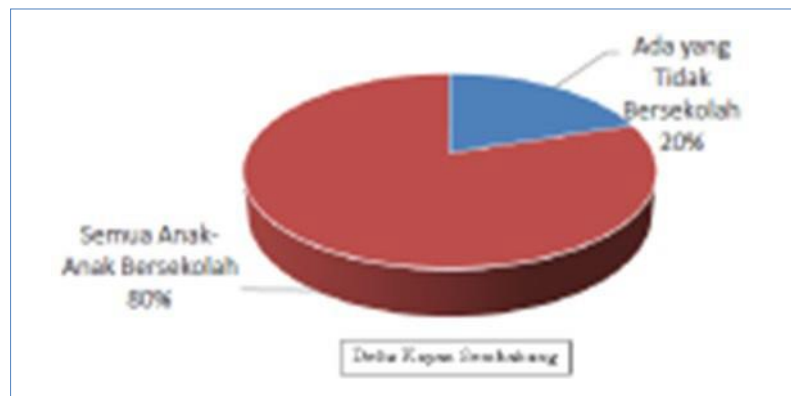


Gambar 49. Penentu Jenis Usaha Diluar Sektor Pertanian Di Wilayah Studi

BAGIAN VII: HASIL STUDI AKTIVITAS SOSIAL POLITIK

VII.1. ANAK PEREMPUAN YANG TIDAK SEKOLAH

Hasil survei menunjukkan bahwa di Desa-Desa yang berada di kawasan lahan mangrove dan gambut di Delta Kayan Sembakung, terdapat 20% anak perempuan berusia 7 sampai 19 tahun yang tidak bersekolah. Sementara 80% responden mengatakan anak-anak perempuan mereka telah atau sedang menjalani pendidikan sebagaimana ditampilkan dalam Gambar berikut ini.

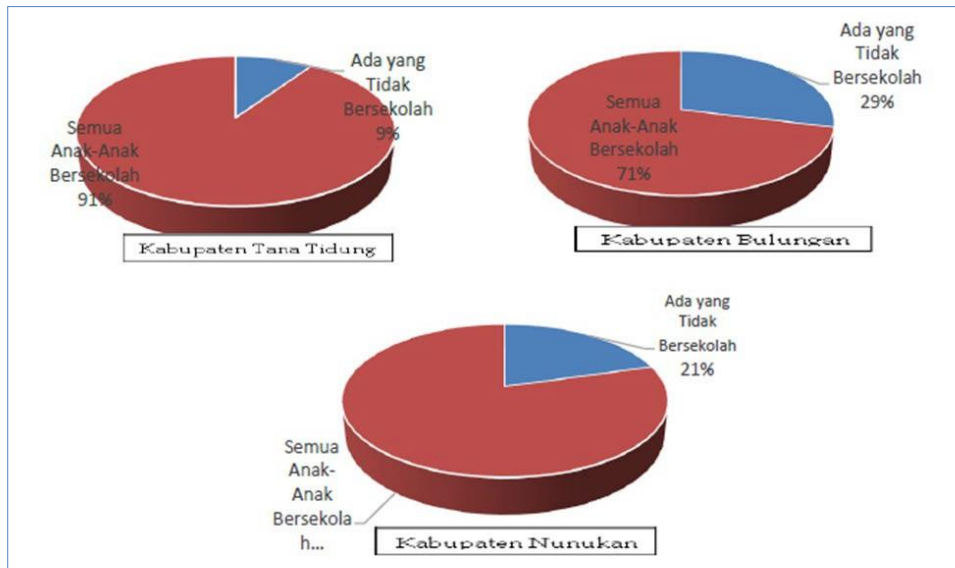


Gambar 50. Anak Perempuan Usia 7 Sampai 9 Tahun yang Tidak Sekolah

Di Kabupaten Bulungan, total persentase anak perempuan berusia 7-19 tahun yang sekolah di 71%, dan sekitar 29% yang tidak bersekolah. Kondisi ini rata-rata terjadi di semua Desa di Kabupaten Bulungan termasuk di lokasi Desa Liagu, Desa Tanah Kuning, Desa Salimbatu serta Desa Tanjung Buka. Di Kabupaten Tana Tidung, hasil survei menunjukkan anak perempuan berusia 7-19 tahun yang tidak bersekolah hanya sekitar 9%, sementara 91% sudah bersekolah di usia tersebut dan dalam semua Desa yang menjadi wilayah studi menunjukkan fenomena yang sama.

Bahkan dalam beberapa desa seperti Desa Bebatu, Desa Rian, dan Desa Sengkong 100% anak perempuan usia 7-19 tahun telah merasakan sekolah. Sebaliknya, di Desa Tengku Dacing masih ada sekitar 29% anak perempuan berusia 7-19 tahun yang tidak sekolah.

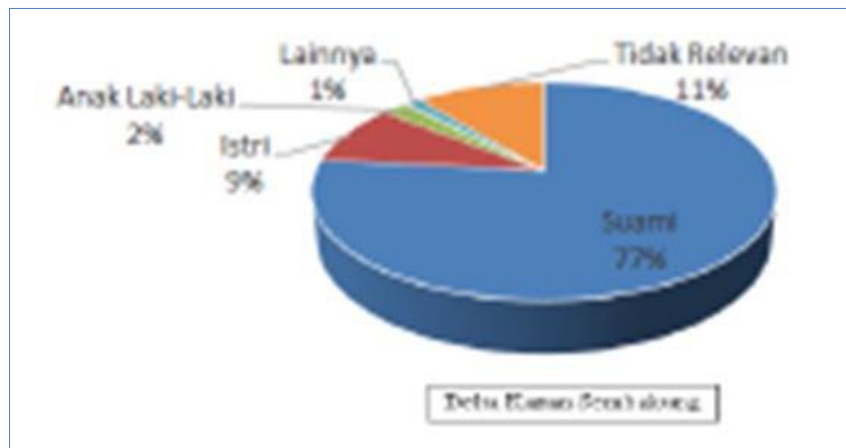
Di Kabupaten Nunukan, hasil survei menunjukkan terdapat 21% anak perempuan berusia 7-19 tahun yang belum sekolah, sementara ada 79% sudah sekolah. Anak perempuan dalam usia tersebut yang belum bersekolah terjadi di Desa Tanjung Harapan dengan persentase 41% atau terdiri dari 122 dari 300 responden.



Gambar 51. Anak Perempuan Usia 7 Sampai 9 Yang Tidak Sekolah Di Wilayah Studi

VII.2. WAKIL DALAM MUSYAWARAH DESA

Hasil survei menunjukkan, bahwa keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa di dalam kawasan desa-desa mangrove dan gambut di Delta Kayan Sembakung hanya sebesar 9%, partisipasi anak laki-laki hanya 2%, sementara kalangan suami mendominasi keterwakilan dalam musyawarah desa yakni mencapai 77%.



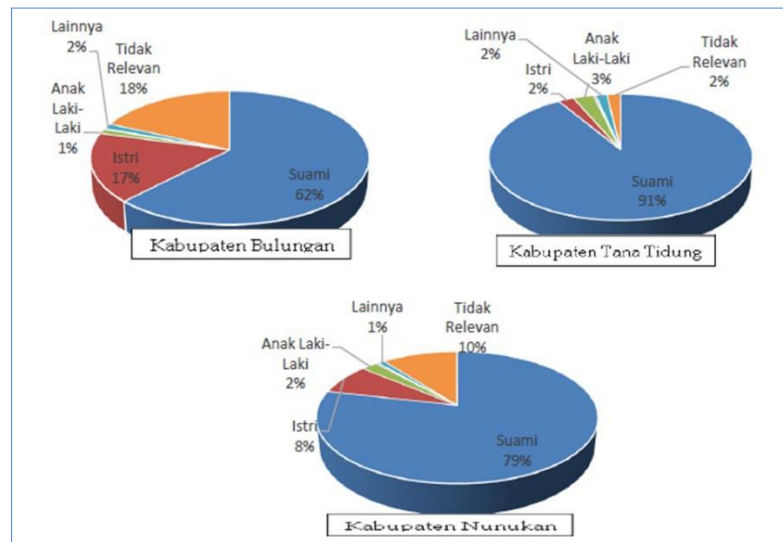
Gambar 52. Wakil dalam Musyawarah Desa

Keterlibatan kelompok perempuan dalam musyawarah desa di Kabupaten Bulungan hanya mencapai 17%, sementara suami lebih dominan mewakili keluarga dalam musyawarah desa yakni 62 %. Yang menarik adalah kasus di Desa Liagu, dimana keterlibatan perempuan/istri dalam musyawarah desa lebih tinggi dibandingkan suami yaitu dengan perbandingan 58% : 41%.

Di Kabupaten Tana Tidung, keterlibatan dalam musyawarah desa juga masih didominasi oleh kelompok suami yakni sebesar 91% suami yang hadir kegiatan musyawarah desa, sementara

kehadiran istri hanya sebesar 2% keterlibatan dalam musyawarah desa.

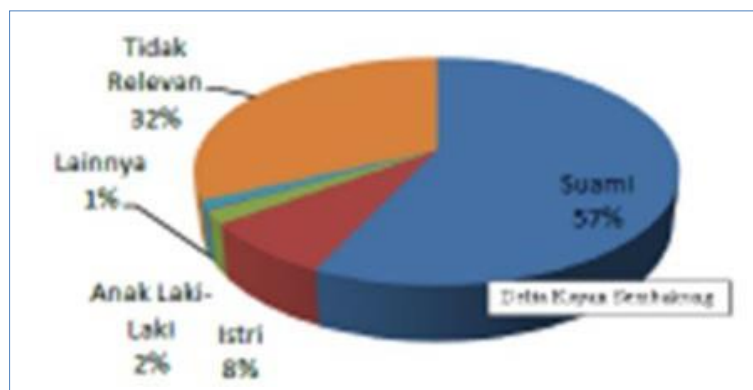
Di Kabupaten Nunukan, keterlibatan perempuan dalam musyawarah Desa hanya sekitar 8%, dibandingkan suami yang sebesar 79%. Keterlibatan istri dalam musyawarah desa lumayan tinggi di Desa Tetaban 27%, Desa Kunyit 20% dan Desa Tagul 36% karena Pemerintah Desanya melibatkan perempuan dalam musyawarah desa. Tetapi di Desa yang lain masih didominasi keterlibatan laki-laki atau suami sebagai perwakilan dalam musyawarah desa.



Gambar 53. Wakil Dalam Musyawarah Desa di Wilayah Studi

VII.3. WAKIL PENYULUHAN PERTANIAN/KEHUTANAN/PERKEBUNAN

Jika ada kegiatan penyuluhan pertanian, perkebunan dan kehutanan di desa-desa kawasan mangrove dan gambut di lanskap Delta Kayan Sembakung, maka hasil survei menunjukkan sekitar 57% keterwakilan rumahtangga diwakili oleh kelompok suami, 8% istri dan 2% oleh anak laki-laki, dan sebanyak 32% responden menjawab pertanyaan ini tidak relevan karena responden tidak pernah mengikuti atau menghadiri kegiatan penyuluhan pertanian, perkebunan dan kehutanan.

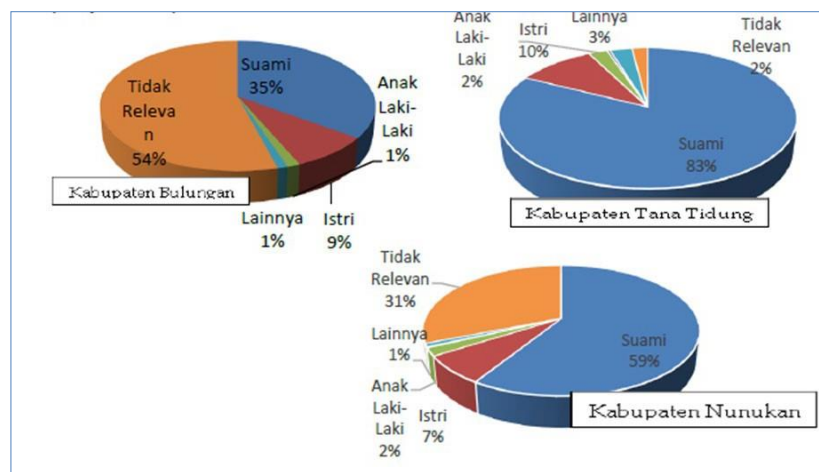


Gambar 54. Wakil Penyuluhan Pertanian/Kehutanan/Perkebunan

Kehadiran dalam kegiatan penyuluhan pertanian, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Bulungan lebih banyak diwakili oleh suami yakni 35 %, sementara 54% jawaban tidak relevan karena sebagian anggota keluarga tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian perkebunan dan kehutanan.

Sementara di Kabupaten Tana Tidung, keterlibatan perempuan dalam kegiatan penyuluhan pertanian perkebunan dan kehutanan hanya sebesar 10%, sementara yang paling dominan adalah keterlibatan suami sebesar 83%. Meskipun ada keterlibatan perempuan dalam penyuluhan pertanian yang cukup tinggi ada di Desa Tengku Dacing dengan persentase 35% , sementara 62% dari kelompok suami/laki-laki. Sementara di desa lainnya, rata-rata lebih dari 90% adalah keterlibatan dari laki-laki/suami saja.

Di Kabupaten Nunukan, yang ikut mewakili dalam kegiatan penyuluhan pertanian adalah 59% adalah suami, dan hanya 7 % kegiatan penyuluhan diikuti keterwakilan istri. Tetapi kasus di Desa Lubakan dan Desa Tepian menunjukkan keterwakilan istri relatif tinggi di dalam kegiatan penyuluhan pertanian yaitu 25% dan 20%, sementara di desa yang lain masih didominasi oleh suami dalam mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut.

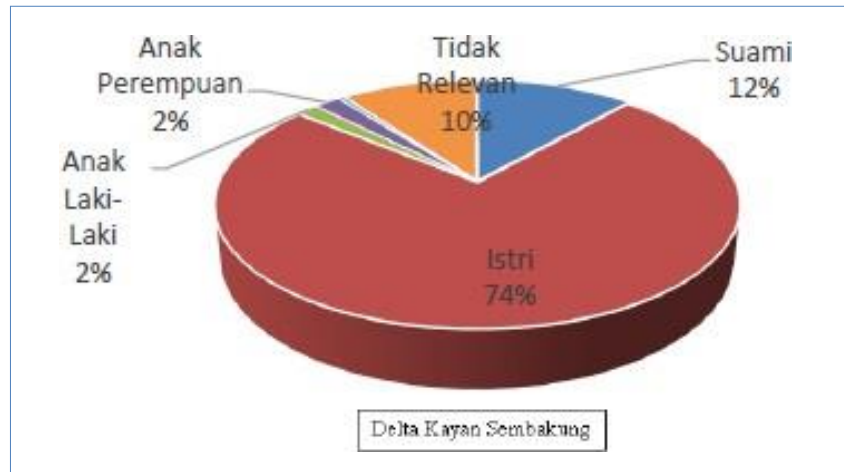


Gambar 55. Wakil Penyuluhan Pertanian/ Kehutanan/ Perkebunan di Wilayah Studi

VII.4. WAKIL DALAM PENYULUHAN KESEHATAN

Partisipasi dalam kegiatan penyuluhan kesehatan di desa-desa pada kawasan mangrove dan gambut di Delta Kayan Sembakung menunjukkan angka sekitar 74% keterwakilan dari perempuan dalam penyuluhan kesehatan (istri), 12% diikuti oleh suami dan sekitar 10% responden menjawab pertanyaan ini tidak relevan.

Keterwakilan kelompok perempuan lebih tinggi pada bidang kesehatan dikarenakan sebagian besar masyarakat menganggap perempuan lebih sanggup dalam mengelola aspek kesehatan keluarga.

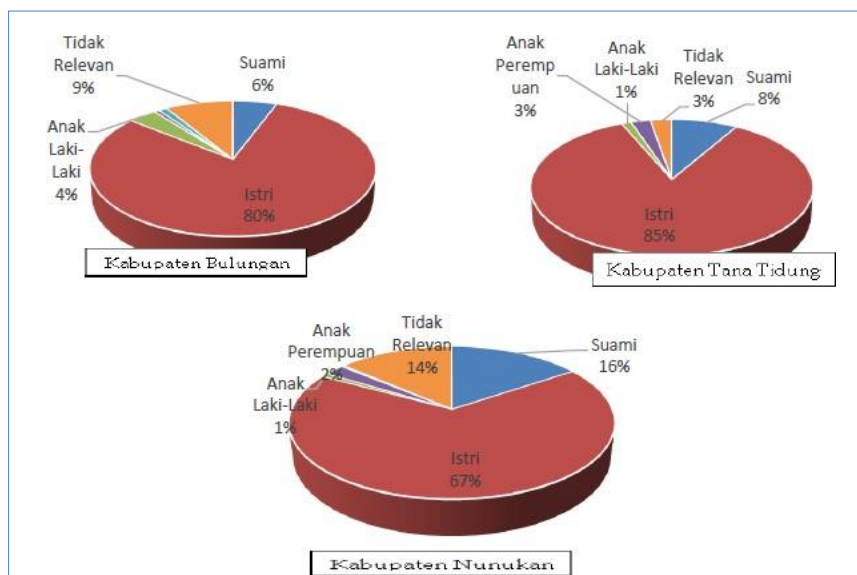


Gambar 56. Wakil dalam Penyuluhan kesehatan

Di Kabupaten Bulungan, perempuan lebih berperan/sering mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan yakni 80% misalnya di Desa Liagu, Desa Tanjung Buka, Desa Tanah Kuning dan juga Desa Salimbatu yang persentasenya lebih dari 70% sementara tingkat keterwakilan suami hanyalah 6%.

Sementara di Kabupaten Tana Tidung, hasil survei menunjukkan perempuan memiliki peran yang cukup tinggi dalam penyuluhan kesehatan yaitu sebanyak 85% dibandingkan suami yang hanya 8 %. Bahkan di Desa Rian, angka partisipasi 100% dari responden mengungkapkan peran istri dalam penyuluhan kesehatan. Di Desa Sengkong, Desa Tengku Dacing, dan Desa Tideng Pale maka tingkat persentase dari keterlibatan perempuan dalam penyuluhan kesehatannya juga tinggi di atas 90%.

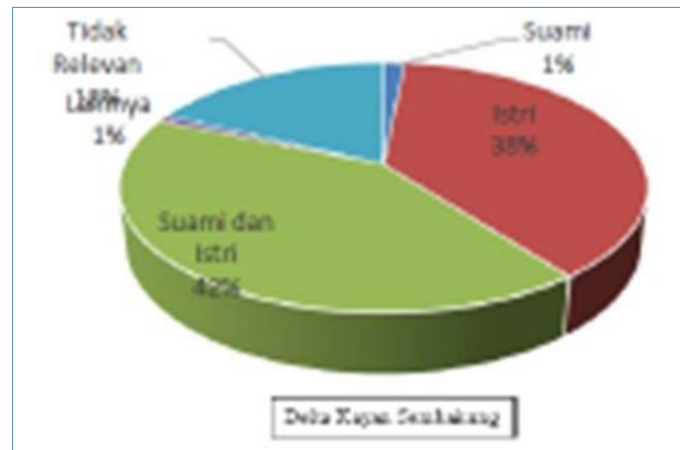
Di Kabupaten Nunukan, tingkat persentase peran dari istri mencapai 67% dalam mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan, sementara keterlibatan suami hanya mencapai 16% saja. Kondisi ini hampir terjadi semua desa studi ini, bahwa istri memiliki peran yang cukup tinggi dalam kegiatan penyuluhan kesehatan.



Gambar 57. Wakil dalam Penyuluhan Kesehatan di Wilayah Studi

VII.5. KEPUTUSAN KEIKUTSERTAAN KELUARGA BERENCANA

Hasil survei menunjukkan, angka persentase dalam keputusan keikutsertaan dalam keluarga berencana di desa-desa kawasan mangrove dan gambut di Delta Kayan Sembakung sebanyak 42% ditentukan oleh kesepakatan suami dan istri. Sementara terdapat sekitar 38% keputusan ini diambil oleh pihak istri saja.

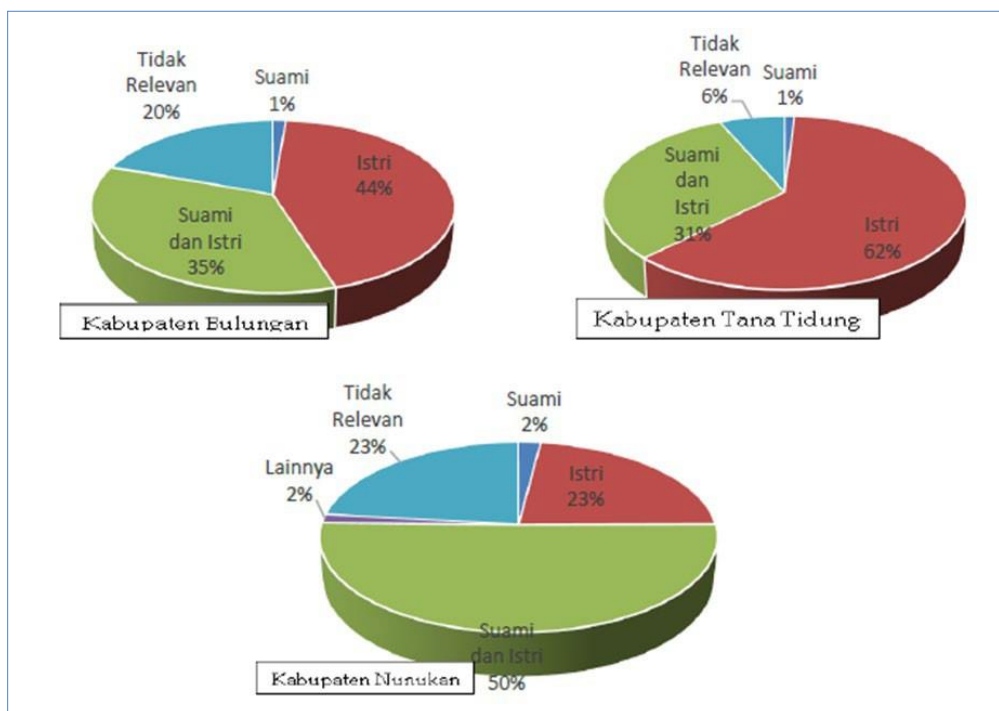


Gambar 58. Keputusan Keikutsertaan Keluarga Berencana

Keputusan untuk mengikuti kegiatan keluarga berencana di Kabupaten Bulungan lebih banyak ditentukan oleh pihak istri yaitu 44 %, sedangkan 35% lainnya berdasarkan kesepakatan suami istri. Bahkan kasus di Desa Tanah Kuning menunjukkan lebih dari 90% istri berperan dalam menentukan keikutsertaan KB.

Di Kabupaten Tana Tidung, hasil survei menunjukkan 62% keputusan untuk mengikuti KB adalah berasal dari istri dan sekitar 31 % adalah merupakan kesepakatan dari suami dan istri. Kasus di Desa Tengku Dacing dan Desa Tideng pale menunjukkan angka 91% dan 85% keputusan berasal dari istri. Tetapi kasus Desa Rian, Desa Bebatu, Desa Sengkong dan Desa Sepalang Dalung menunjukkan angka mayoritas responden tentang keputusan melakukan keluarga berencana adalah keputusan suami dan istri.

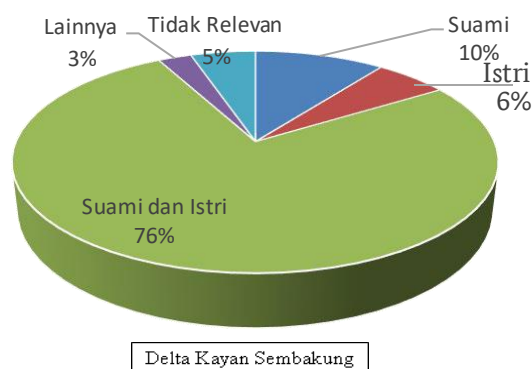
Di Kabupaten Nunukan, hasil survei menunjukkan yang memutuskan keikutsertaan dalam kegiatan keluarga berencana sebanyak 50% atas kesepakatan suami dan istri dan 23% atas kemauan istri sendiri. Kasus di Desa Apas sebesar 51% keikutsertaan KB ditentukan oleh istri, bahkan di Desa Butas Bagu dan Desa Tepian masing-masing menunjukkan data 100% dengan 84% dari responden mengatakan hanya istri lah yang menentukan keikutsertaan dalam keluarga berencana.



Gambar 59. Keputusan Keikutsertaan Keluarga Berencana di Wilayah Studi

VII.6. KEPUTUSAN PENDIDIKAN ANAK

Hasil survei terkait dengan keputusan dalam pendidikan anak di desa-desa dalam kawasan mangrove dan gambut di Delta Kayan Sembakung menunjukkan sebanyak angka 76% diputuskan oleh musyawarah atau kesepakatan antara suami dan istri. Sementara 10% ditentukan hanya oleh pihak suami saja, dan sekitar 6% ditentukan oleh pihak istri saja.

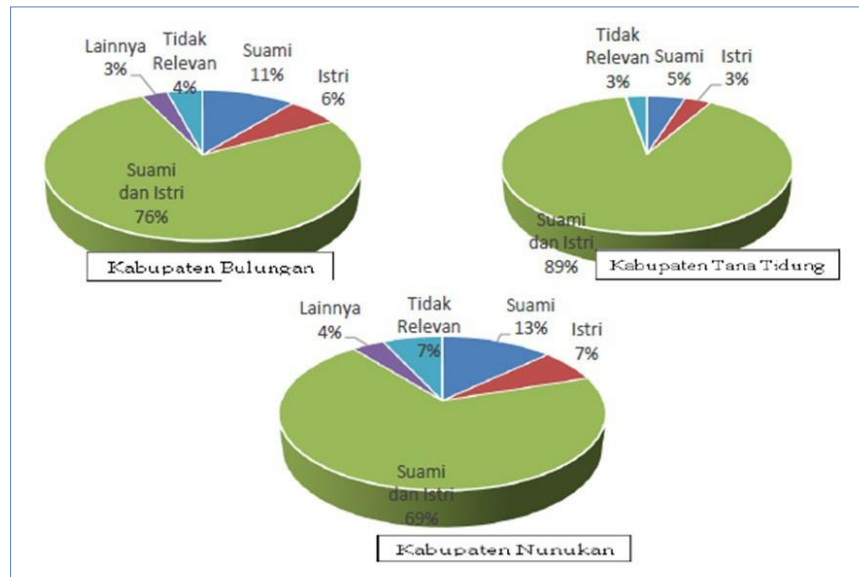


Gambar 60. Keputusan Pendidikan Anak

Di Kabupaten Bulungan, hasil survei berkaitan dengan keputusan pendidikan anak telah menunjukkan sebanyak 76% adalah ditentukan oleh kesepakatan suami dan istri, 11% keputusan diambil oleh pihak suami dan 6% hanya oleh pihak istri.

Di Kabupaten Tana Tidung, hasil survei menunjukkan 89% diputuskan oleh kesepakatan suami dan istri, 5% diputuskan oleh suami saja dan 3% hanya diputuskan oleh istri saja. Sementara di Kabupaten Nunukan, hasil survei menunjukkan 69% pendidikan anak ditentukan oleh kesepakatan suami dan istri, 13% oleh suami saja, dan oleh 7% istri saja.

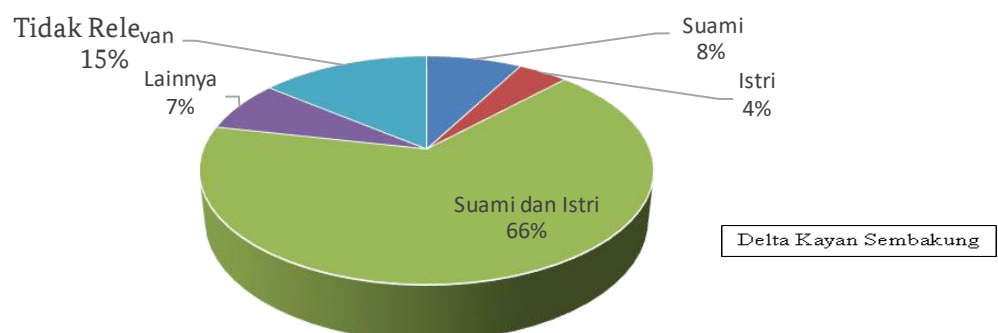
Kondisi ini terjadi hampir di semua desa pengamatan, kecuali di Desa Tepian dimana suami sangat dominan dalam memutuskan pendidikan anak dengan persentase responden mencapai 71%, dibandingkan kesepakatan suami dan istri yang hanya 15% saja.



Gambar 61. Keputusan Pendidikan Anak di Wilayah Studi

VII.7. MEMUTUSKAN PERKAWINAN ANAK

Hasil survei terkait dengan keputusan memutuskan perkawinan anak di desa-desa kawasan mangrove dan gambut di Delta Kayan Sembakung menunjukkan bahwa sebanyak 65% responden mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil atas kesepakatan suami dan istri, sementara hanya 8% saja yang diputuskan oleh suami dan hanya 4% keputusan yang diserahkan kepada istri.

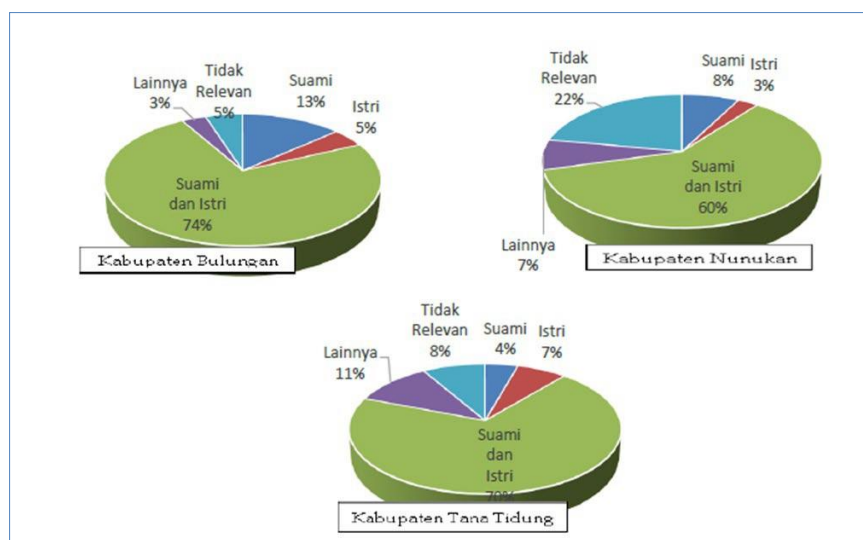


Gambar 62. Keputusan Perkawinan Anak

Di Kabupaten Bulungan, tingkat angka persentase keputusan keluarga dalam menentukan perkawinan anak lebih banyak ditentukan oleh suami dan istri yakni 74%, sementara keputusan oleh suami saja mencapai 13 %, dan keputusan hanya oleh istri rata-rata mencapai 5% dalam menentukan perkawinan anak.

Di Kabupaten Tana Tidung, angka 70% menunjukkan keputusan dalam perkawinan anak ditentukan oleh suami istri. Kasus menarik di Desa Sengkong dimana 100% ditentukan oleh suami istri, sementara di Desa Rian angkanya menunjukkan sebesar 38% responden menyatakan bahwa pernikahan akan ditentukan oleh faktor-faktor lain misalnya mempertimbangkan usia anak, jodoh, dan faktor lain-lain.

Di Kabupaten Nunukan, hasil survei terkait dengan perkawinan anak, menunjukkan sekitar 60% responden memutuskannya dengan kesepakatan suami dan istri, 8% hanya keputusan suami, dan 3% hanya keputusan istri. Tetapi ada 22% responden yang menjawab pertanyaan ini tidak relevan, karena sebagian responden belum menikah.



Gambar 63. Keputusan Perkawinan Anak di Wilayah Studi

VII.8. PRIORITAS SEKOLAH (KEADAAN TERBATAS)

Hasil survei terkait dengan isu prioritas sekolah dalam kondisi perekonomian keluarga yang terbatas pada desa-desa kawasan mangrove dan gambut di Delta Kayan Sembakung menunjukkan angka 33% diprioritaskan untuk anak yang pintar, 29% bagi anak sulung, 21% anak laki-laki dan 12% diprioritaskan bagi anak perempuan.



Gambar 64. Prioritas Sekolah (Keadaan Terbatas)

Di Kabupaten Bulungan, prioritas sekolah untuk anak-anak saat rumah tangga mengalami keuangan terbatas adalah sebanyak 34% bagi anak yang pintar, 33% anak laki-laki, 16% anak sulung, dan 15% diberikan kepada anak perempuan. Di Desa Tanjung Buka misalnya, sekitar 55% responden memprioritaskan anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya 30%. Di Desa Liagu sebanyak 93 responden memprioritaskan kepada anak yang pintar. Sementara di Desa salimbatu, maka urutan prioritasnya adalah untuk anak laki-laki (37%), anak pintar (21%), anak sulung dan anak perempuan masing-masing 16% dan anak bungsu 10%. Tetapi di Desa Tanah Kuning yang diprioritaskan adalah anak sulung (48%), anak laki-laki (39%), anak perempuan 9% dan anak bungsu 4%.

Di Kabupaten Tana Tidung, hasil survei menunjukkan prioritas untuk sekolah saat kondisi keuangan terbatas adalah 56% responden lebih memprioritaskan kepada anak sulung, 29% kepada anak yang dianggap pintar, 13% anak laki-laki dan 2% untuk anak perempuan. Hal ini berbeda di setiap desa, seperti di Desa Bebatu sebanyak 63% lebih memprioritaskan sekolah kepada anak yang pintar dibandingkan 37% kepada anak sulung. Sementara di Desa Rian, anak perempuan lebih tinggi persentasenya dengan anak pintar yaitu dengan 50% : 42%.

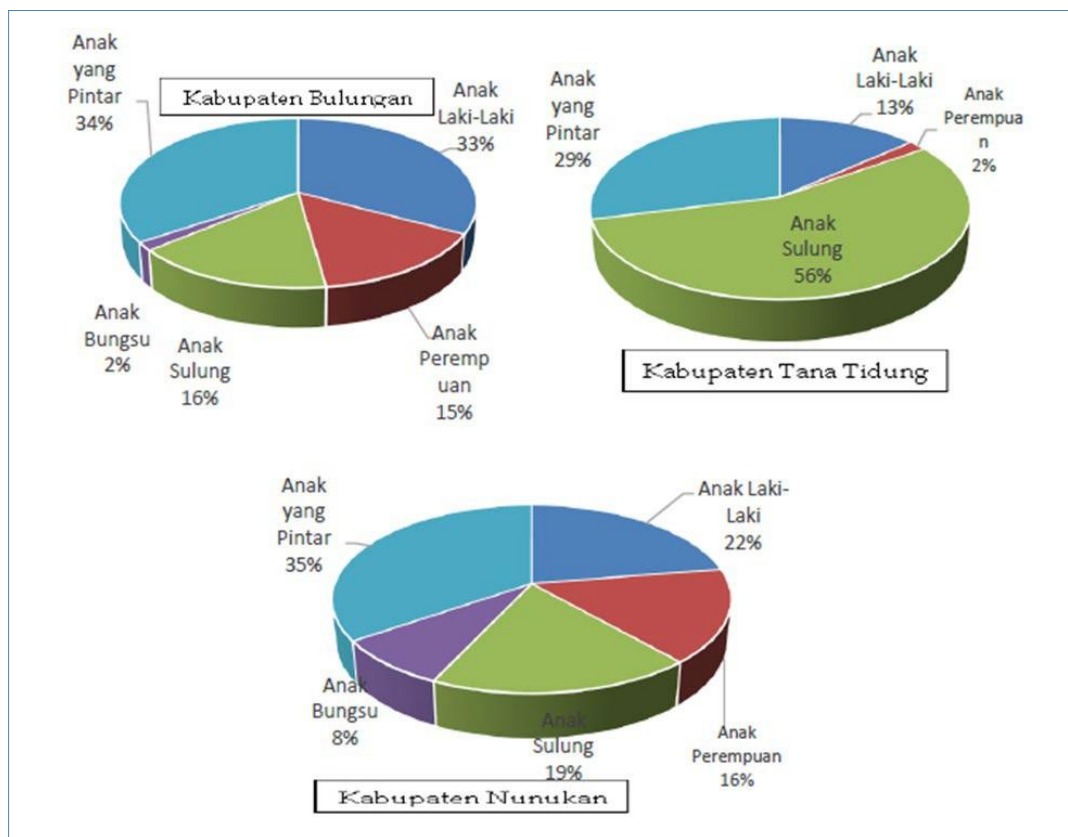
Sementara di Desa sengkong dan sepala Dalung lebih dari 95% mereka lebih memprioritaskan kepada anak yang lebih pintar. Sementara di Desa Tideng Pale 89% lebih memprioritaskan sekolah bagi anak sulung, dan di Desa tengku dacing lebih memprioritaskan sekolah bagi anak laki-laki sebesar 95%.

Persentase yang mendahulukan anak pintar untuk bersekolah saat terjadi keadaan keuangan keluarga terbatas di Kabupaten Nunukan adalah sebesar 35%, anak laki-laki 22%, anak sulung 19%, anak perempuan 16% dan anak bungsu 8%. Kondisi ini beragam di masing-masing desa pengamatan, seperti misalnya di Desa Tetaban tingkat persentase mendahulukan anak perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan anak bungsu yakni 41:37%.

Desa Apas angkanya menunjukkan 63% lebih mendahulukan anak laki-laki dibandingkan anak yang pintar 29%. Desa Binusan adalah 31% anak laki-laki, 20% anak sulung dan anak pintar, dan 18% anak perempuan. Di Desa Butas Bagu sekitar 83% lebih mengutamakan laki-laki, sementara di Desa Katul hasilnya adalah prioritas anak laki-laki dan anak perempuan 53:47%.

Sementara di Desa Kekayap, Desa Lubakan, Desa Tanjung Harapan dan Desa Tepian lebih

memprioritaskan anak pintar dengan persentase antara 48-60%. Sementara Desa Manuk Bungkul menunjukkan angka yaitu 44% lebih memprioritaskan anak bungsu dibandingkan anak perempuan yang hanya 24%, anak laki-laki-laki dan anak sulung masing-masing 16% dan 12%.



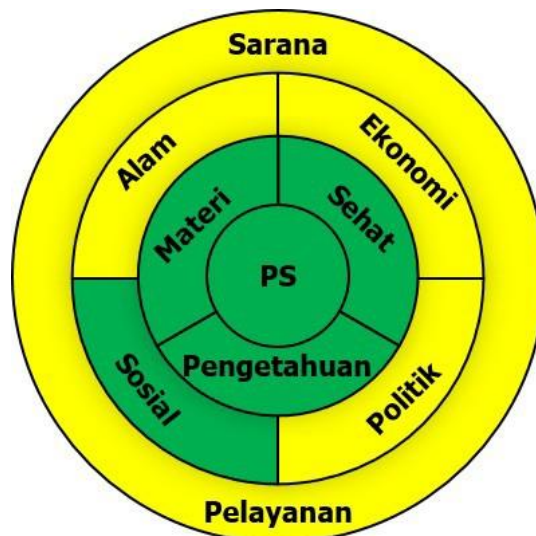
Gambar 65. Prioritas Sekolah (Keadaan Terbatas) Di Wilayah Studi

BAGIAN VIII: INDEKS KESEJAHTERAAN DAN KEMISKINAN

Studi tentang konsep kesejahteraan dapat difokuskan pada level diindividu, keluarga dan masyarakat. Di negara-negara maju, maka konsep kesejahteraan didekati berdasarkan dua hal yaitu terkait dengan: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan subjektif dapat diukur dari perasaan bahagia dan kepuasan yang dirasakan oleh individu, keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh adalah perasaan bahagia, sedih, cemas, kepuasan dan ketidakpuasan terhadap kualitas hidup. Semetnara kesejahteraan objektif dapat diukur dengan indikator objektif sebagai contoh ada tidaknya ketersediaan air bersih, angka kematian bayi, dan atau angka pengangguran.

Model *Nested Sphere of Poverty* (NESP) yang digunakan dalam studi akan menggambarkan tentang persepsi kesejahteraan subjektif maupun kesejahteraan objektif masyarakat di lanskap Delta Kayan Sembakung. Kesejahteraan ini dipengaruhi oleh berbagai lingkungan atau aspek kehidupan sehari-hari yang terdiri dari kesejahteraan subjektif, kepemilikan materi, kesehatan, pengetahuan, lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan politik, lingkungan sosial, sarana dan prasarana.

Kategori-kategori yang disajikan dalam pendekatan model NESP ini bersifat komprehensif, yang mencakup kebutuhan dasar dan kondisi lingkungan pendukung. Hasil analisis kesejahteraan dengan pendekatan NESP terhadap 2005 responden warga masyarakat desa yang berada di lanskap Delta Kayan Sembakung menunjukkan tidak terdapat lingkungan atau aspek kehidupan sehari-hari yang dalam kategori atau kondisi kritis.



Keterangan: Merah: Kritis; Kuning: sedang; Hijau: baik

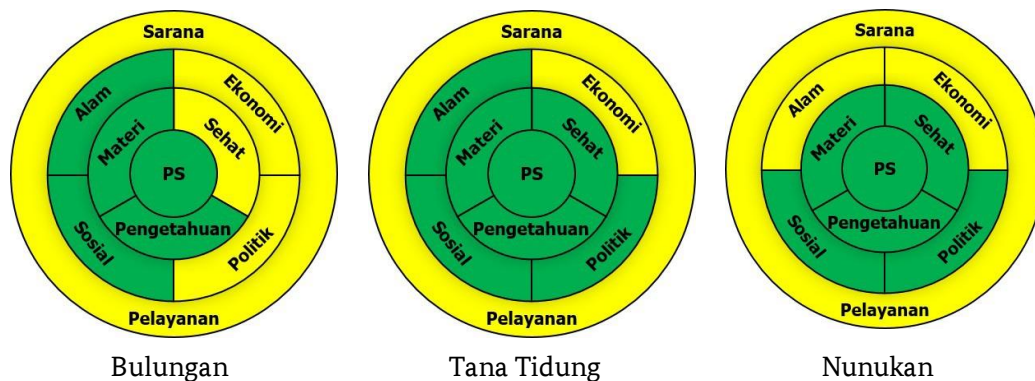
Gambar 66. Model Kesejahteraan Masyarakat di Delta Kayan Sembakung

Informasi tentang aspek kesejahteraan subjektif responden diperoleh dengan menanyakan penilaian atau perasaan terhadap kualitas kehidupannya saat ini seperti perasaan sejahtera, miskin, bahagia, maupun konsep sejahtera bila dibandingkan rumah tangga lain dan kondisi rumah tangga di masa mendatang. Hasil studi menunjukkan bahwa sekitar 55% responden merasa kehidupannya telah sejahtera, 41% merasa lumayan sejahtera, dan hanya 4% responden yang merasa tidak sejahtera.

Untuk pertanyaan terkait perasaan miskin maka hasilnya adalah sejumlah 44% responden merasa tidak miskin, 43% merasa lumayan (cukup), dan hanya 13% merasa miskin. Pertanyaan yang terkait perasaan bahagia menunjukkan hasil bahwa sekitar 99% mengekspresikan bahagia dan hanya 1% responden saja yang merasa tidak bahagia. Perasaan responden tentang kesejahteraan rumah tangganya dibandingkan dengan rumah tangga lain adalah menunjukkan 75% merasa sama, merasa lebih 13% dan merasa lebih kurang sebanyak 12%. Sementara penilaian terhadap kondisi rumah tangganya di masa mendatang menunjukkan bahwa 71% responden yakin kondisi rumah tangganya akan lebih baik, 27% merasa akan sama, dan 2% saja yang merasa akan lebih susah.

Konsep kesejahteraan subjektif akan merujuk kondisi baik, demikian pula lingkungan inti yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif seperti kesehatan, kekayaan materi dan pengetahuan berada dalam kondisi yang baik. Lingkungan konteks adalah lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kesejahteraan subjektif dan lingkungan inti. Dalam lingkungan konteks maka aspek sosial adalah dalam kategori berpengaruh baik. Sedangkan aspek alam, ekonomi, dan politik adalah dalam kategori kondisi sedang. Sementara terkait aspek sarana dan pelayanan yang mempengaruhi lingkungan konteks adalah berada dalam kondisi sedang.

Penjabaran model NESP di setiap Kabupaten yang menjadi lokasi kajian dapat digambarkan melalui grafis sebagai berikut:



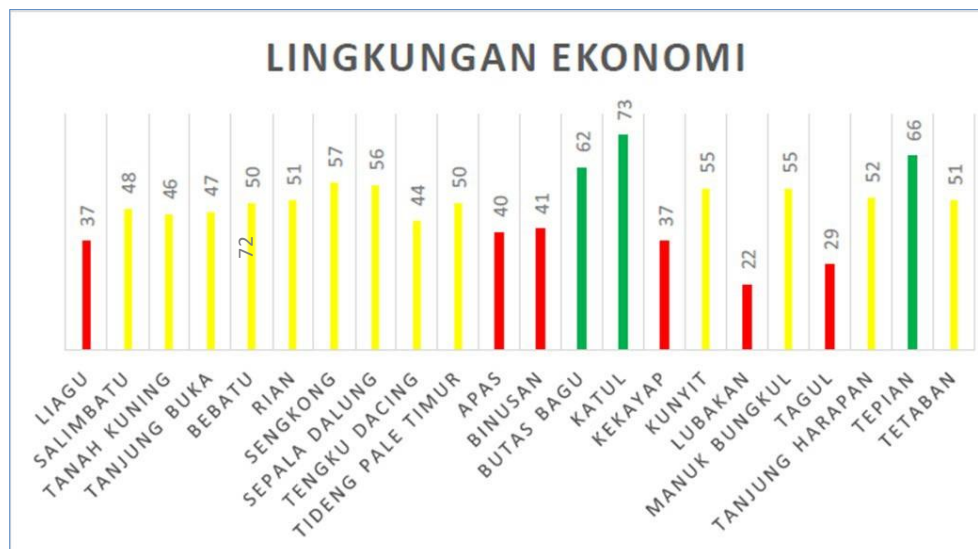
Keterangan: Merah: Kritis; Kuning: sedang; Hijau: baik

Gambar 67. Model Kesejahteraan di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung dan Nunukan

Di Kabupaten Bulungan nampak adanya kebutuhan untuk memperhatikan aspek kesehatan, ekonomi, politik, sarana dan pelayanan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang baik. Berbagai aspek tersebut pada saat survei dilakukan berada dalam kondisi sedang, yang berarti diperlukan upaya untuk meningkatkan kondisi dari aspek tersebut.

Hasil survei dari Kabupaten Tana Tidung menunjukkan aspek ekonomi dan aspek sarana pelayanan adalah faktor yang diperhatikan untuk mencapai kondisi kesejahteraan yang baik. Adapun di Kabupaten Nunukan maka yang harus diperhatikan untuk mencapai kondisi baik adalah terkait dengan aspek ekonomi, alam, sarana dan pelayanan.

Lingkungan ekonomi dari lingkungan inti adalah aspek yang berada dalam kondisi sedang di tiga wilayah kabupaten yang menjadi lokasi kajian. Gambar 65 berikut menunjukkan kondisi terkait aspek lingkungan ekonomi dan lingkungan inti di masing-masing desa yang terpilih.



Gambar 68. Kondisi Lingkungan Ekonomi Desa-Desa Survey

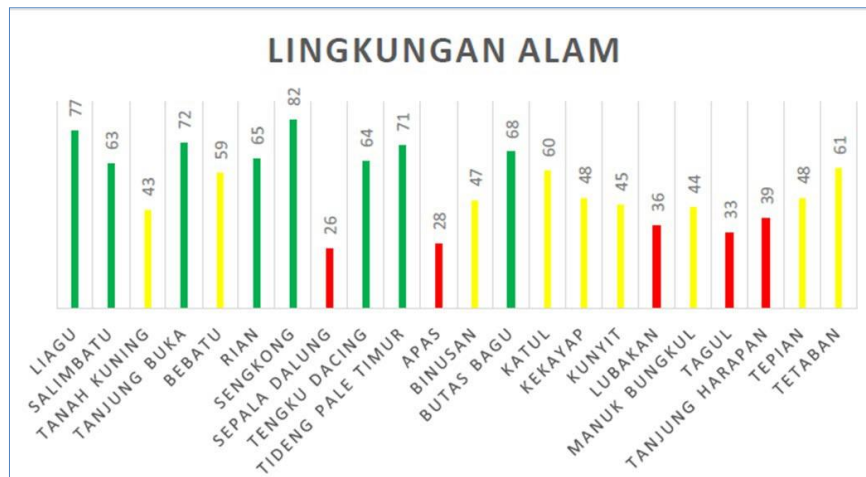
Terdapat beberapa desa yang berada dalam kondisi kritis untuk aspek ekonomi seperti terjadi di Desa Liagu yang berada di wilayah Kabupaten Bulungan. Di Kabupaten Nunukan beberapa seperti Desa Apas, Desa Binusan, Desa Kekayap, Desa Lubakan dan Desa Tagul juga berada dalam kategori kondisi kritis. Sementara di Kabupaten Tana Tidung, tidak terdapat desa dalam kondisi kritis untuk aspek ekonomi. Meskipun di Kabupaten Nunukan banyak desa yang berada dalam kondisi kritis, juga ada desa yang berada dalam kondisi baik untuk aspek ekonomi yaitu antara lain Desa Butas Bagu, Desa Katul dan Desa Tepian.

Lingkungan ekonomi menggambarkan kondisi mata pencaharian masyarakat dalam desa-desa terpilih. Mata pencaharian masyarakat secara umum masih bergantung kepada sumber daya alam atau pertanian secara luas (65%) seperti ternak, budidaya/ tangkap ikan, bertani, berkebun atau mengambil hasil hutan non kayu, dan 35% mata pencaharian lainnya. Tetapi sekitar 65% responden sudah tidak memiliki lahan sawah/ ladang/ kebun, dan dari 23% responden yang memiliki lahan ternyata menyatakan hasilnya tidak mencukupi kebutuhan. Hasil survei menunjukkan hanya 12% responden yang memiliki lahan dan telah mendapatkan hasil yang cukup.

Hasil survei juga menunjukkan sumber pendapatan dari 53% responden hanya satu, dan 47% responden lainnya memiliki lebih dari satu sumber pendapatan. Sumber pendapatan ini menurut 70% responden adalah bersifat tetap (stabil), sementara 30% lainnya menyatakan tidak ada yang tetap. Peluang untuk mencari nafkah menurut 73% responden adalah mudah dengan penghasilan yang cukup, 21% menyatakan sulit tetapi dengan penghasilan yang cukup, dan ada 6% menyatakan mudah dengan tingkat penghasilan yang tinggi.

Namun demikian, secara umum penghasilan responden belum masuk dalam kategori sehat dan stabil karena hampir 49% responden tidak memiliki untuk menabung dalam 12 bulan terakhir, sebanyak 41% menyatakan kadang-kadang menabung dan hanya 10% yang selalu menabung.

Aspek lingkungan alam juga sangat penting untuk diperhatikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena hasil survei menunjukkan adanya beberapa desa dalam kondisi kritis. Seperti misalnya di Kabupaten Tana Tidung yaitu Desa Sepala Dalung maupun di Kabupaten Nunukan yaitu Desa Tidung, Desa Apas, Desa Lubakan, Desa Tagul dan Desa Tanjung Harapan.

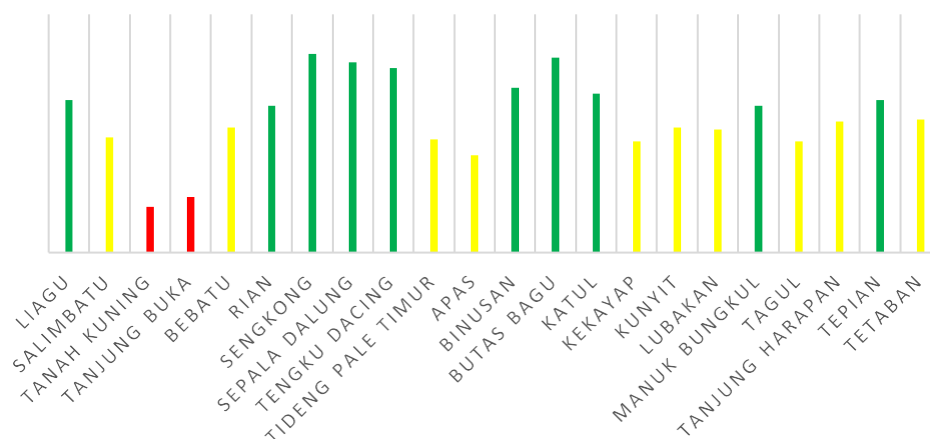


Gambar 69. Model NESP Lingkungan Alam

Materi survei terkait aspek lingkungan alam adalah untuk mengetahui informasi dari para responden tentang keadaan alam di sekitarnya. Hasil survei menunjukkan bahwa keadaan alam di sekitarnya dalam kondisi mengalami kerusakan (52%), sementara 48% menyatakan tidak mengalami kerusakan. Bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran hutan atau serangan hama selama 12 bulan terakhir menurut 61% responden tidak pernah terjadi sementara 48% menyatakan pernah terjadi. Kualitas air sungai, danau dan mata air saat ini masih baik dan tidak tercemar menurut 60% responden sementara hanya 40% yang menyatakan kurang baik dan tercemar.

Hasil survei menunjukkan bahwa 71% responden menyatakan tidak ada penebangan liar dan hanya 21% yang menyatakan adanya penebangan liar. Tetapi terdapat 45% responden menyatakan bahwa jumlah kayu dan tumbuhan di hutan berkurang banyak, 41% menyatakan berkurang sedikit dan hanya 14% yang menyatakan masih tetap atau meningkat. Demikian pula keberadaan hewan endemik Kalimantan seperti Bekantan, Burung Enggang dan Gajah Pigmi menurut 42% responden masih ada sedikit, 34% menyatakan tidak ada lagi, dan 24% menyatakan masih banyak.

Terkait dengan aspek politik, maka terdapat dua desa dengan kondisi kritis yaitu Desa Tanah Kuning dan Desa Tanjung Buka di Kabupaten Nunukan. Desa-desain lain yang menjadi lokasi studi ini dalam kategori kondisi yang sedang dan baik.

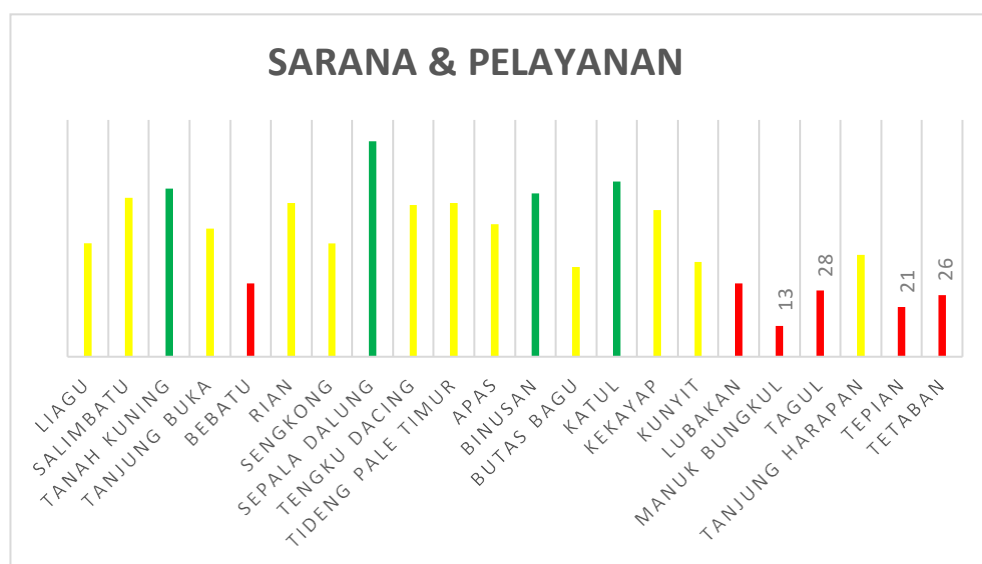


Gambar 70. Model NESP Lingkungan Politik

Lingkungan politik adalah terkait dengan kesejahteraan konteks dan memberikan gambaran pendapat dari responden terkait keterwakilan atau keterlibatan dalam pengambilan keputusan di desa, kepastian penguasaan lahan di desa, maupun terkait penerapan aturan lokal. Hasil survei terkait dengan persentase keterwakilan atau keterlibatan dalam pengambilan keputusan di desa adalah menunjukkan data 39% kadang-kadang terlibat, 33% menyatakan tidak terlibat dan 28% menyatakan terlibat.

Terkait dengan kepastian penguasaan lahan di desa menurut 54% responden ada jaminan dan kuat, 23% menyatakan ada jaminan namun lemah, dan 23% menyatakan tidak ada jaminan. Sementara pendapat responden tentang kepatuhan terhadap aturan lokal yang ada dan penegakan hukum menunjukkan hasil yaitu 76% responden menyatakan mengikuti aturan, 6% menyatakan kadang-kadang mengikuti aturan, dan 18% menyatakan jarang mengikuti aturan.

Terkait dengan aspek sarana dan pelayanan maka hasil survei menunjukkan berada dalam kondisi yang sedang di seluruh wilayah Kabupaten, sehingga perlu untuk diperhatikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 71. Model NESP Sarana dan Pelayanan

Terdapat beberapa Desa yang kondisi aspek sarana dan prasaranya dalam kategori kritis yaitu misalnya Desa Bebatu di Kabupaten Tana Tidung. Sementara di Kabupaten Nunukan yaitu Desa Lubakan, Desa Manuk Bungkul, Desa Tagul, Desa Tepian dan Desa Tetaban. Desa dengan kategori kondisi sarana dan pelayanan baik adalah seperti Desa Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan, Desa Sepala Dalung di Kabupaten Tana Tidung, serta Desa Binusan dan Desa Katul di Kabupaten Nunukan.

Terkait dengan aspek sarana dan pelayanan, maka responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap kualitas berbagai sarana dan pelayanan yang ada di wilayah desanya. Untuk akses menuju SMP terdekat, maka menurut 85% responden tidak sulit serta 15% menyatakan agak sulit. Penilaian responden terhadap keseluruhan pelayanan pendidikan dasar seperti guru dan fasilitas yang ada menunjukkan hasil yaitu 41% menyatakan sangat baik, 45% menyatakan cukup dan 14% menyatakan belum cukup.

Penilaian terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang biasa dikunjungi masyarakat menurut 43% responden adalah sangat baik, 42% cukup baik dan 15% menyatakan belum baik. Jalan serta jembatan untuk menuju kecamatan atau pusat kota merupakan fasilitas sangat penting yang akan mempengaruhi aspek kehidupan lainnya. Hasil survei menunjukkan bahwa kualitas jalan dan jembatan di desa menurut 60% responden ada dan berada dalam kondisi baik, sementara sekitar 40%

responden menyatakan fasilitas itu tidak ada atau kondisinya buruk.

Pertanyaan terkait pelatihan, penyuluhan, kursus, dan pendampingan usaha dalam 12 bulan terakhir menunjukkan hasil yaitu 52% responden mengetahui 1-2 kegiatan tersebut, 35% responden menyatakan tidak pernah ada dan 13% responden menyatakan ada lebih dari 2 kegiatan. Pelaksanaan program pembangunan dari Pemerintah Kabupaten selama 1 tahun terakhir menurut penilaian dari hasil survei adalah 34% responden ada dan menyatakan memuaskan, 24% menyatakan ada tetapi mengecewakan, 22% menyatakan tidak ada, dan 20% menyatakan tidak tahu.

Adapun secara khusus terkait dengan pelaksanaan program pembangunan desa dalam 5 tahun terakhir menurut hasil survei adalah 38% responden adalah memuaskan, 32% menyatakan ada tetapi mengecewakan dan 25% menyatakan tidak tahu.

BAGIAN IX: PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE

Kegiatan Survei Sosial dan Ekonomi di Kawasan Delta Kayan Sembakung bertujuan untuk mengkaji kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, serta menjelaskan bagaimana ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam di sekitarnya terutama hutan mangrove/bakau dan gambut yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Hasil survei ini telah menunjukkan bahwa dari ketiga kabupaten yang menjadi lokasi survei, maka terdapat beberapa Kecamatan dan Desa yang memiliki potensi alam berupa hutan mangrove dan gambut sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Potensi Hutan Mangrove dan Gambut di Delta Kayan Sembakung.

A. Kabupaten Nunukan			
No.	Kecamatan	Tempat/Desa	Potensi Alam
1	Kec. Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	Mangrove
2	Kec. Nunukan	Binusan	Mangrove
3	Kec. Sebuku	Apas	Gambut
4	Kec. Sebuku	Kekayap	Gambut
5	Kec. Sebuku	Kunyit	Gambut
6	Kec. Sebuku	Tetaban	Gambut
7	Kec. Sembakung	Tepian	Gambut
8	Kec. Sembakung	Manuk Bungkul	Gambut
9	Kec. Sembakung	Butas Bagu	Gambut
10	Kec. Sembakung Atulai	Katul	Gambut
11	Kec. Sembakung	Tagul	Gambut
12	Kec. Sembakung	Lubakan	Gambut
B. Kabupaten Bulungan			
No.	Kecamatan	Tempat/Desa	Potensi Alam
1	Kec. Tj. Palas Tengah	Tanjung Buka	Mangrove
2	Kec. Tj. Palas Tengah	Salimbatu	Mangrove
3	Kec. Tj. Palas Tengah	Tanah Kuning	Mangrove
4	Kec. Sekatak	Liagu	Mangrove
C. Kabupaten Tana Tidung			
No.	Kecamatan	Tempat/Desa	Potensi Alam
1	Kec. Sesayap	Tideng Pale Timur	Gambut/Mangrove
2	Kec. Sesayap	Sengkong	Gambut/Mangrove
3	Kec. Sesayap Hilir	Sepala Dalung	Gambut/Mangrove
4	Kec. Sesayap Hilir	Bebatu	Gambut/Mangrove
5	Kec. Muruk Rian	Rian	Gambut
6	Kec. Sesayap Hilir	Tengku Dacing	Mangrove

Sumber: Data Primer (2019).

Tabel di atas menunjukkan jika dalam satu wilayah survei ada kawasan yang memiliki kedua tipe hutan dan ada pula yang hanya salah satu dari tipe hutan tersebut yaitu Mangrove atau Gambut. Untuk memberikan gambaran yang terinci, maka uraian hasil studi akan diawali dengan proses penyampaian hasil secara keseluruhan lokasi dan responden studi kemudian dilengkapi dengan hasil dari masing-masing kabupaten untuk masing-masing tipe hutan.

IX.1. DESKRISI HUTAN MANGROVE DAN GAMBUT

IX.1.1. Ekosistem Hutan Mangrove

Mangrove atau yang secara umum dikenal sebagai hutan bakau adalah vegetasi yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai, dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Oleh sebab itu, mangrove juga dikenal sebagai hutan payau atau hutan pasang surut. Vegetasi ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Baik di kawasan teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun pada sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang diangkutnya dari hulu sungai.

Dengan demikian, maka hanya sedikit jenis tumbuhan yang mampu untuk bertahan hidup di wilayah mangrove, dan berbagai jenis ini kebanyakan adalah bersifat khas hutan bakau mengingat telah melewati proses adaptasi dan evolusi yang lama. Jenis-jenis vegetasi di hutan mangrove antara lain adalah jenis *Rhizophora sp.*, *Avecennia sp.*, dan *Xylocarous sp.*, dan *Sonneratia sp.*

Ekosistem mangrove ini memiliki beberapa sifat dasar antara lain yaitu: tingkat pelumpuran yang tinggi, kadar oksigen yang rendah, salinitas (kandungan garam) yang tinggi, dan pengaruh daur pasang surut air laut. Sehingga ekosistem ini sangat ekstrim sekaligus sangat dinamis dan termasuk yang paling cepat berubah, terutama di bagian terluarnya. Areal hutan mangrove memiliki fungsi ekologis yang penting antara lain sebagai penahan laju erosi, sedimentasi, abrasi pantai dan penahan intrusi air laut. Kawasan ini juga menjadi kawasan habitat, tempat berlindung dan memijah *nursery* dari beragam biota laut.

IX.1.2. Ekosistem Hutan Gambut

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem khas dari segi struktur, fungsi dan kerentanan. Hutan gambut adalah merupakan kawasan lahan basah yang memiliki kandungan bahan organik yang tinggi serta menyimpan cadangan karbon dua kali lebih besar dari tipe hutan lainnya.

Hutan gambut juga memiliki fungsi pengaturan hidrologi, habitat dari beragam satwa khas dan endemik serta beragam jenis vegetasi yang bernilai ekonomi tinggi seperti Ramin (*Gonystylus bancanus sp.*), Jelutung Rawa (*Dyera lowii sp.*), Kempas/Bengeris (*Kompassia malaceensis sp.*), Rengas (*Melanorrhoea walishii sp.*), Meranti Rawa (*Shorea pauciflora sp.*), Punak (*Tetramerista glabra sp.*), Bungur (*Lagerstroemia sp.*) dan lain sebagainya. Ketebalan hutan gambut ini berkisar antara satu hingga dua belas meter. Karena memiliki ciri-ciri yang khas, maka lahan gambut memerlukan pengelolaan yang berbeda dengan jenis lahan yang lainnya (Notohadi Prawiro, 2006).

Data yang diperoleh dari responden studi dari tiga Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung adalah sejumlah total jumlah 2005 orang responden. Salah satu data studi ini adalah berupa informasi tentang pengetahuan, pengelolaan dan juga praktik-praktik lokal terkait pemanfaatan dari hutan mangrove dan gambut. Secara detail maka dapat secara kategoris

mencakup tiga aspek utama yaitu sebagai berikut:

- 1). Pengetahuan Masyarakat Tentang Mangrove dan Gambut;
- 2). Pengelolaan Mangrove dan Gambut dan
- 3). Praktik- praktik pemanfaatan hutan/lahan gambut/mangrove.

IX.1.3. Pengetahuan/Respons Masyarakat Tentang Mangrove dan Gambut

Indikator ini berisikan pertanyaan terkait dengan pengetahuan responden berupa informasi keberadaan dari hutan gambut dan posisi (letak) di desanya. Hasil penghitungan secara keseluruhan menunjukkan, bahwa sekitar 84% responden mengetahui keberadaan hutan mangrove dan gambut dan juga mengetahui dimana letak hutan gambut dan mangrove yang dimaksud. Sedangkan ada sekitar 7% responden mengetahui keberadaan hutan tersebut, dan 9% responden tidak mengetahui tentang hutan dan juga lokasinya.

Hasil survei menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai hutan mangrove dan gambut terutama keberadaan dan lokasinya di kawasan Delta Kayan dan Sembakung secara umum dapat dikategorikan sangat tinggi. Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa keberadaan dari hutan mangrove dan gambut tersebut selama ini telah menjadi bagian dari sistem penghidupan masyarakat di kawasan Delta Kayan Sembakung.



Gambar 72. Pengetahuan Masyarakat tentang keberadaan Hutan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung



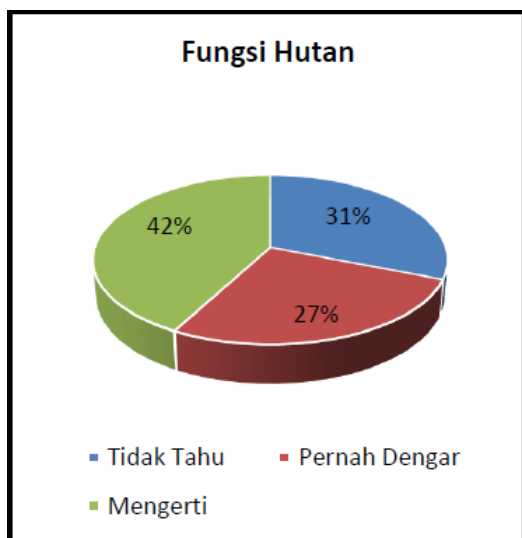
Gambar 73. Perbandingan Pengetahuan tentang keberadaan Hutan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung

Berdasarkan data keseluruhan tersebut, maka dapat dilihat juga tentang bagaimana sebaran dan distribusi pengetahuan tersebut dari masing-masing wilayah studi. Di Kabupaten Tana Tidung, hasil survei menunjukkan persentase responden yang lebih banyak dan mengenal keberadaan hutan mangrove dan gambut yang ada di sekitar desanya.

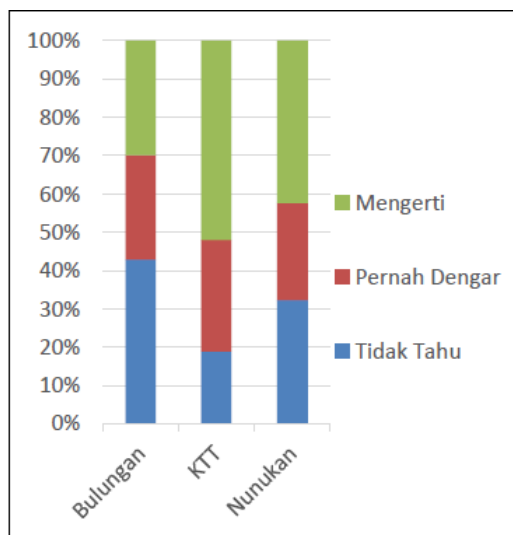
Analisis data tentang pengetahuan responden tentang fungsi-fungsi dari hutan gambut dan mangrove menunjukkan bahwa sekitar 42% sudah mengerti akan fungsi hutan, namun 31% tidak mengetahui dan sisanya 27% hanya baru dalam kategori pernah mendengar. Melihat fenomena ini, maka dapat disimpulkan jika persentase responden yang memahami fungsi hutan dengan yang tidak

memahami adalah hampir sama jumlahnya. Oleh karena itu maka kegiatan sosialisasi fungsi ekologi, ekonomi, sosial dan juga kebudayaan terkait dengan keberadaan gambut dan mangrove masih sangat diperlukan.

Distribusi data hasil survei dari ketiga Kabupaten lokasi studi tentang pengetahuan fungsi hutan menunjukkan jika Kabupaten Bulungan masih memiliki persentase terbesar terkait dengan ketidaktahuan yang hampir dua kali lipat persentasenya dibandingkan Kabupaten Tana Tidung.



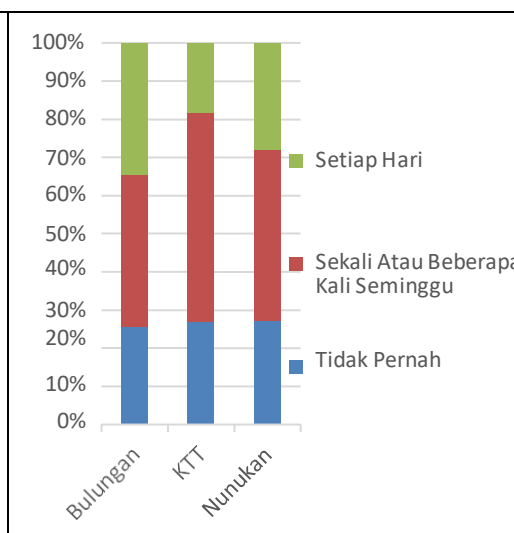
Gambar 74. Pengetahuan Masyarakat tentang Fungsi Hutan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung



Gambar 75. Perbandingan Pengetahuan Masyarakat tentang fungsi Hutan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung di Tiga Kabupaten Wilayah studi



Gambar 76. Intensitas Kunjungan Kehutan Mangrove / Gambut di Delta Kayan Sembakung



Gambar 77. Intensitas Kunjungan Kehutan Mangrove / Gambut di Tiga Kabupaten studi

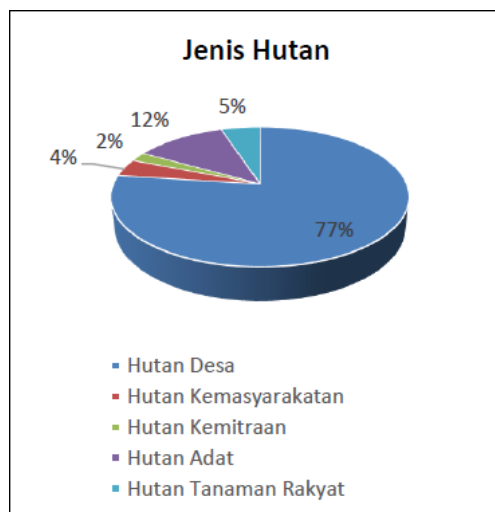
Sumber: Data Primer (2019).

Indikator terkait intensitas kunjungan ke hutan ini berisikan pengetahuan responden berupa informasi seberapa sering aktivitas para responden dalam mengunjungi kawasan hutan yang ada di desanya. Hasil analisis survei menunjukkan jika intensitas terbesar berada dalam kategori intensitas sekali atau beberapa kali seminggu dengan persentase 46%, 27% menyatakan setiap hari, dan 27% lagi menyatakan tidak pernah. Hal ini berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat terkait pengolahan lahan baik untuk pertanian, perkebunan maupun perikanan budidaya.

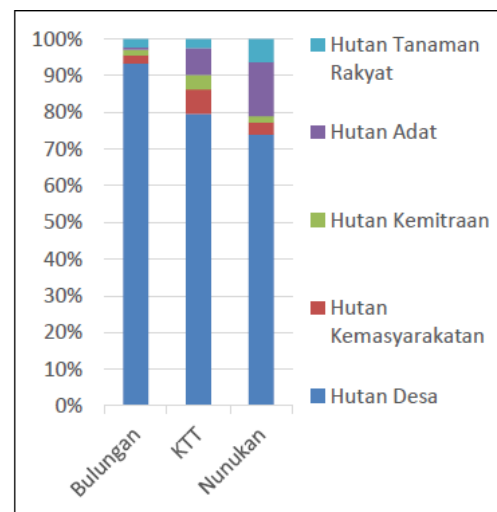
Dalam perbandingan, maka grafik distribusi dari intensitas di masing-masing kabupaten juga hampir sama proporsinya dengan grafik intensitas kunjungan secara keseluruhan. Karena responden menyatakan dominan dengan jawaban setiap hari dan satu kali hingga beberapa kali dalam seminggu yang masih sangat besar.

Indikator pengetahuan terkait tentang jenis hutan berisikan pertanyaan terkait pengetahuan responden tentang jenis-jenis hutan (status) yang ada di desanya. Hasil penghitungan menunjukkan terdapat 77% responden yang mengetahui bahwa hutan yang ada di desanya adalah hutan desa, dan sebagian kecil (23%) saja yang menyatakan Hutan Adat, Hutan Kemitraan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan.

Namun masih perlu studi lebih lanjut tentang pengetahuan mereka terkait pengertian jenis-jenis hutan dari status kawasan dan ijin pengelolaannya. Distribusi informasi di tiga kabupaten juga hampir sama komposisinya antara Kabupaten Nunukan, Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung dimana masyarakat lebih mengenal dengan kategori Hutan Desa.



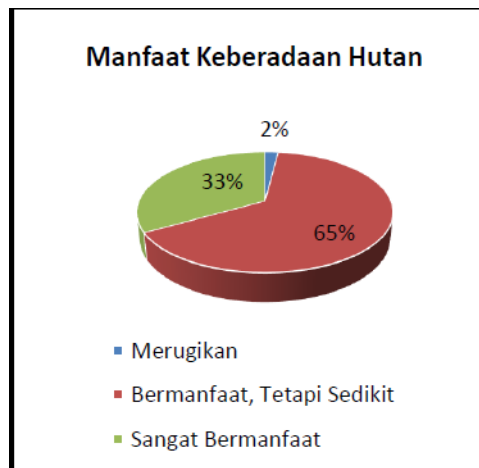
Gambar 78. Pengetahuan Masyarakat tentang Jenis Hutan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung



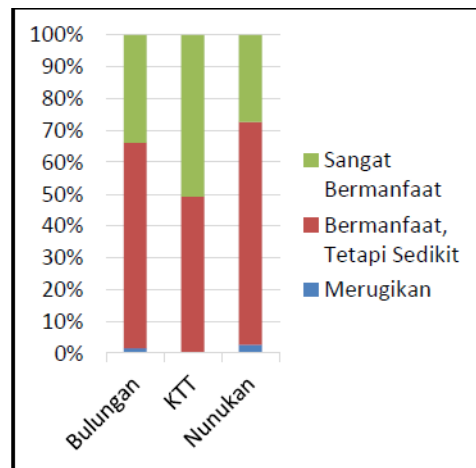
Gambar 79. Pengetahuan Masyarakat tentang jenis Hutan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung di Tiga Kabupaten Lokasi Studi

Hasil survei terkait indikator pengetahuan mengenai manfaat keberadaan hutan berisikan beberapa pertanyaan terkait pengetahuan responden atas manfaat dari keberadaan hutan gambut dan mangrove. Hasil analisis survei ini menunjukkan sekitar 65% responden berpendapat jika hutan bermanfaat tapi hanya sedikit atau kecil kontribusinya untuk kehidupan mereka sehari-hari, sekitar 33% yang menyatakan sangat bermanfaat, dan 2% lainnya justru menyatakan merugikan.

Hasil komparasi di tiga kabupaten tentang pengetahuan tentang manfaat hutan meskipun kecil masih ada yang berpendapat bahwa keberadaan kawasan hutan ini justru merugikan. Hal ini memerlukan pendampingan dan juga sosialisasi yang lebih intensif, agar mereka mengetahui tentang manfaat kawasan hutan secara umum dan khusus.



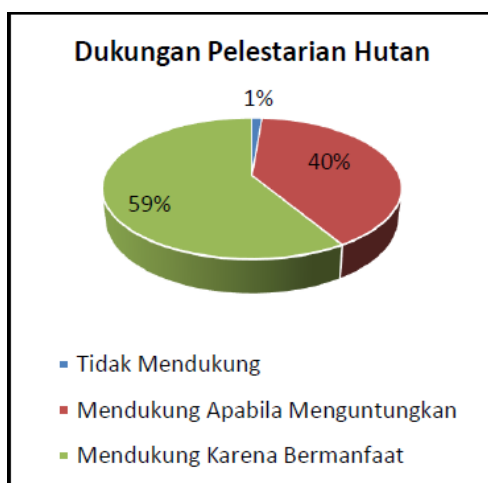
Gambar 80. Pengetahuan Masyarakat tentang manfaat keberadaan Hutan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung



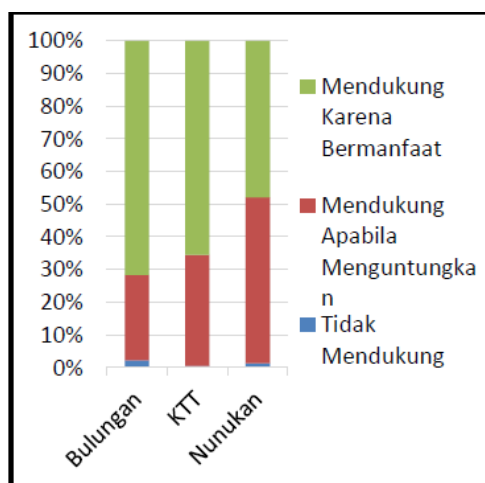
Gambar 81. Perbandingan Pengetahuan tentang manfaat keberadaan Hutan Mangrove/Gambut di Tiga Kabupaten Lokasi Studi

Hasil survei menunjukkan dukungan responden terhadap kegiatan pelestarian mangrove dan gambut adalah masih lebih banyak masyarakat yang mendukung karena bermanfaat (59%), yang didasarkan pemahaman tentang manfaat yang diperoleh dari adanya hutan mangrove dan gambut. Meskipun demikian ada 40% yang mendukung apabila akan menguntungkan atau hanya mau ikut bergerak jika manfaatnya juga besar, serta 1% yang menyatakan tidak akan mendukung.

Untuk dapat meningkatkan rasio dari pendukung kegiatan-kegiatan pelestarian alam masih memerlukan satu tahap pembuktian. Yaitu harus dapat menunjukkan adanya keuntungan secara ekonomi akan diperoleh dari upaya-upaya pelestarian, baik keuntungan langsung ataupun tidak langsung yang dapat dirasakan oleh semua warga masyarakat.



Gambar 82. Dukungan Terhadap pelestarian Hutan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung



Gambar 83. Perbandingan dukungan terhadap pelestarian Hutan Mangrove/Gambut di tiga Kabupaten Wilayah Studi di Delta Kayan Sembakung

IX.1.3. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Mangrove dan Gambut

Jenis hutan mangrove dan gambut memiliki ketentuan tersendiri dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Pengelolaan hutan mangrove harus memperhatikan status dan juga fungsi ekologis kawasan. Dalam tataran nasional, maka kebijakan konservasi hutan mangrove akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa mangrove merupakan bagian dari ekosistem hutan, oleh karena itu maka pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan yang berazaskan manfaat dan lestari.

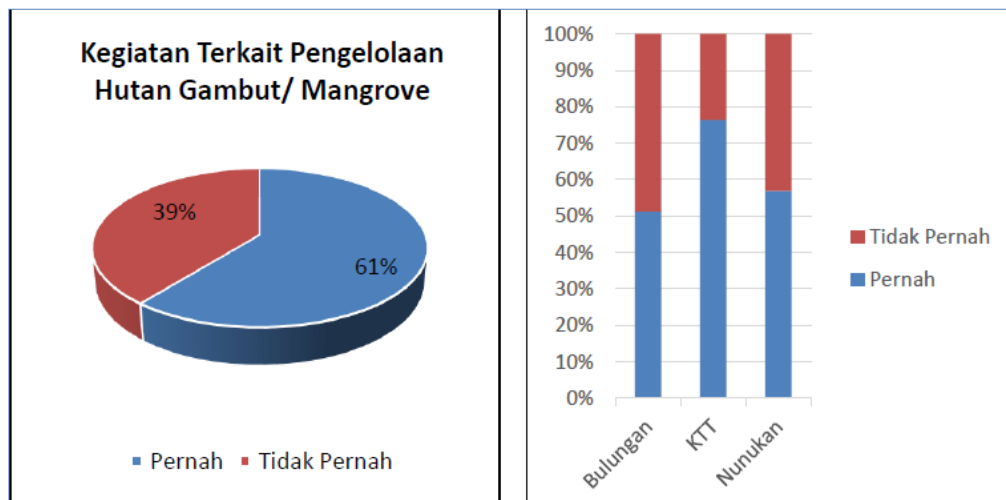
Selain itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, terutama pasal 26 yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangnya berbagai biota laut.

Terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dari hutan mangrove harus memperhatikan beberapa peraturan dan perundangan antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 tahun 2007 serta turunannya di tingkat daerah. Sedangkan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan hutan gambut saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut; serta Peraturan Menteri LHK No.10 Tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Berdasarkan jenisnya, maka hutan gambut dapat dikelompokkan menjadi kawasan yang berfungsi sebagai ekosistem gambut dengan fungsi lindung dan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya. Hal ini mempertimbangkan berbagai aspek keragaman karakter maupun fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, perubahan iklim, serta rencana tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian fungsi ekosistem gambut yang dapat menunjang untuk kehidupan baik generasi sekarang maupun untuk generasi yang datang (Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut, <https://gambut.oirto.com/perencanaan-pengendalian-kerusakan-gambut/>).

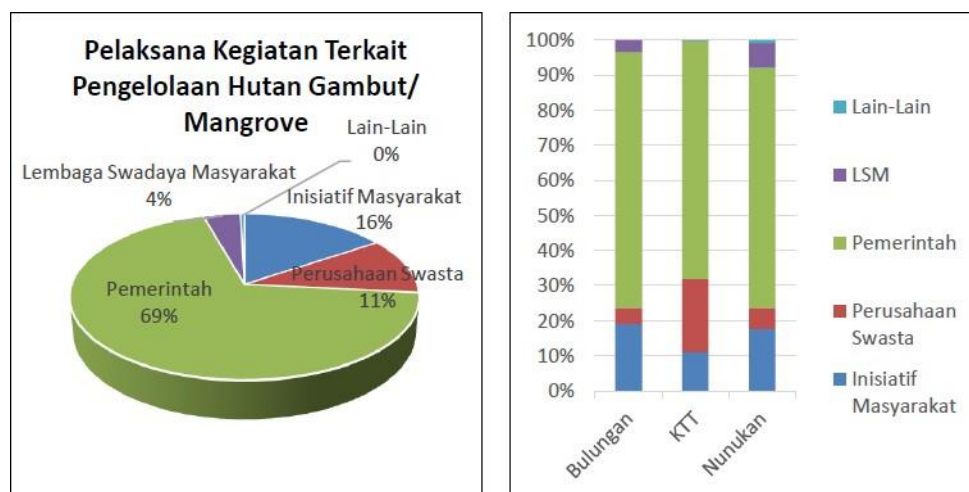
Hasil survei terkait dengan pengelolaan hutan mangrove dan gambut ini menunjukkan 61% responden menyatakan pernah ada kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan mangrove/gambut, dan 39% lainnya menyatakan tidak pernah ada.



Gambar 84. Kegiatan Pengelolaan Hutan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung

Gambar 85. Perbandingan Kegiatan Pengelolaan Hutan Mangrove/Gambut di Tiga Kabupaten Lokasi Studi di Delta Kayan Sembakung

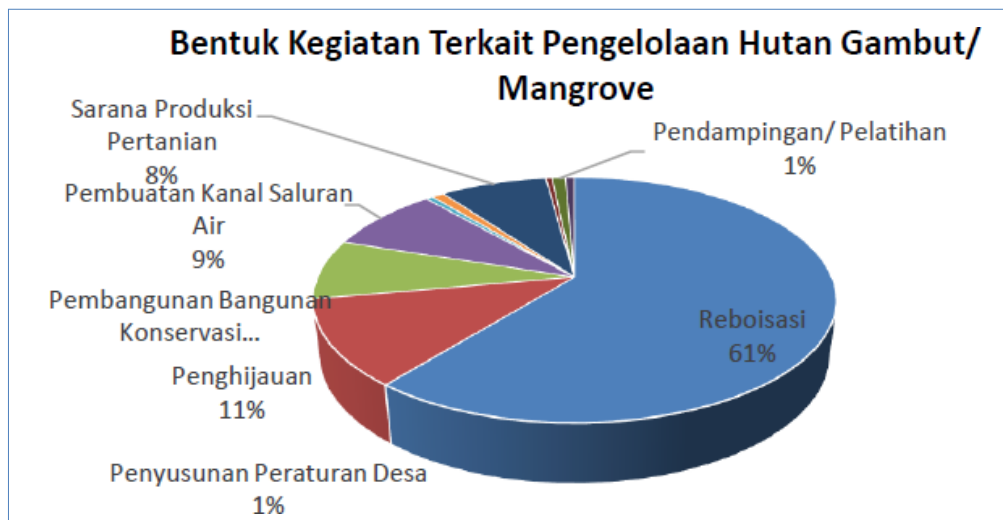
Terkait dengan program pengelolaan hutan mangrove dan gambut di desa -desa studi, maka menunjukkan hasil jika lebih banyak responden yang menyebutkan jika di lapangan terdapat kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan mangrove. Baik yang diinisiasi oleh pemerintah, hasil inisiatif masyarakat dan juga perusahaan yang berada disekitar desa. Dari tiga kabupaten studi, maka dari Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa responden di daerah tersebut belum mengenal tentang kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal pengelolaan hutan.



Gambar 86. Pengelola Kegiatan Terkait Hutan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung

Gambar 87. Perbandingan Pengelola Kegiatan tentang Hutan Mangrove/Gambut di Tiga Kabupaten di Delta Kayan Sembakung

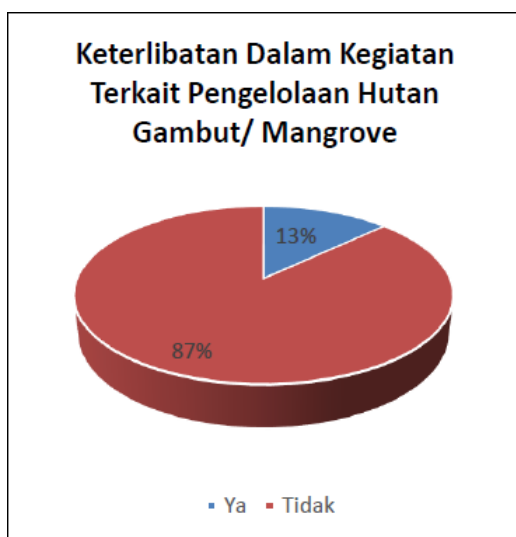
Hasil survei terkait bentuk kegiatan pengelolaan hutan menunjukkan reboisasi merupakan kegiatan yang paling banyak dikenali oleh masyarakat (61%), karena dalam pelaksanaannya banyak melibatkan masyarakat sekitar baik dari pengadaan bibit hingga pananaman di lapangan. Kegiatan reboisasi yang diinisiasi oleh pemerintah, merupakan upaya perbaikan kualitas dari hutan terutama yang telah mengalami deforestasi dan degradasi.



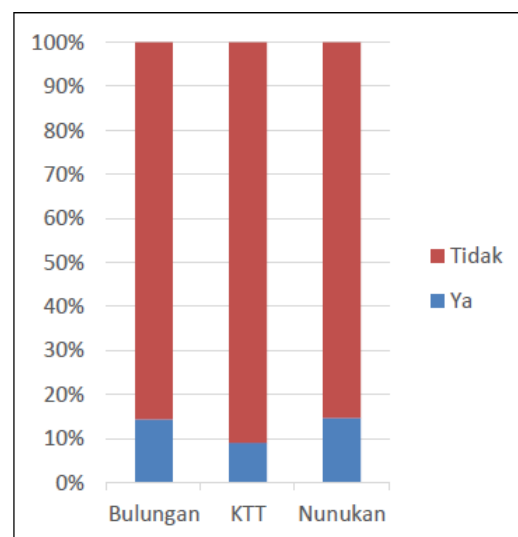
Gambar 88. Bentuk Kegiatan Terkait Pengelolaan Mangrove/Gambut

Kegiatan ini dikenal di lapangan atau oleh kalangan masyarakat, adalah sering digunakan secara bersamaan istilahnya dengan pengertian tentang kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lahan ataupun penghijauan. Sehingga terdapat 11% responden lain yang memilih penghijauan sebagai bentuk kegiatan pengelolaan, kegiatan lain yang cukup dominan adalah pembuatan kanal saluran air (8%) dan pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian (8%). Sementara pengenalan untuk persentase bentuk kegiatan lainnya tidak lebih dari 1%.

Dari berbagai indikator terkait keterlibatan masyarakat pada pengelolaan hutan mangrove dan gambut menunjukkan hasil survei bahwa 13% responden menjawab terlibat dalam kegiatan pengelolaan mangrove dan 87% menjawab tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan mangrove. Jika dilihat hasil survei dari ketiga lokasi kabupaten studi, maka sebagian besar responden menjawab tidak terlibat dalam pengelolaan mangrove dan gambut di Kawasan Delta Kayan Sembakung.



Gambar 89. Keterlibatan Dalam Kegiatan Terkait Hutan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung

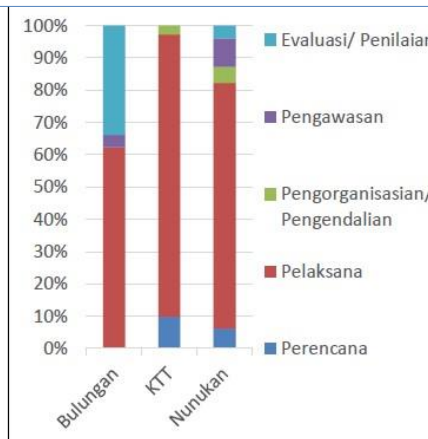


Gambar 90. Perbandingan Keterlibatan Dalam Kegiatan Terkait Hutan Mangrove/Gambut di Tiga Kabupaten Lokasi Studi di Delta Kayan Sembakung

Hasil survei terkait dengan indikator dai bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dan gambut adalah 75% responden menyatakan terlibat di kegiatan pelaksanaan. Bentuk keterlibatan lainnya adalah dalam kegiatan evaluasi dan penilaian kegiatan sebanyak 10%, keterlibatan dalam perencanaan kegiatan 6%, keterlibatan dalam pengawasan kegiatan sebanyak 6%, dan dalam kegiatan pengorganisasian atau pengendalian kegiatan sebanyak 3%.



Gambar 91. Bentuk Keterlibatan Dalam Kegiatan Terkait Hutan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung



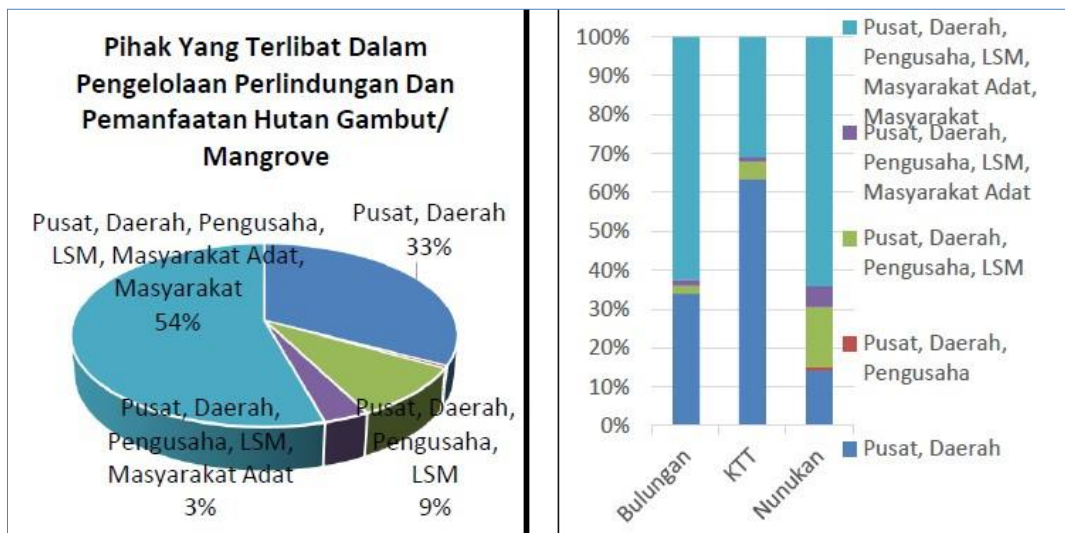
Gambar 92. Perbandingan Bentuk Keterlibatan Dalam Kegiatan Terkait Hutan Mangrove/Gambut di Tiga Kabupaten di Delta Kayan Sembakung

Hasil survei terkait dengan indikator tentang pendapat pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove dan gambut menurut 54% responden seharusnya pihak pusat, daerah, pengusaha, LSM, masyarakat adat dan masyarakat. Sementara 33% responden lain telah menyatakan pihak pusat dan daerah yang seharusnya terlibat.

Sekitar 9% responden menyatakan adalah pihak pusat, daerah, pengusaha dan LSM yang seharusnya terlibat. Selain itu terdapat juga 3% responden yang menyatakan seharusnya pihak pusat, daerah. Pengusaha, LSM dan masyarakat adat yang terlibat. Hanya 1% yang menyatakan pendapat bahwa pihak pusat, daerah dan pengusaha yang seharusnya terlibat.

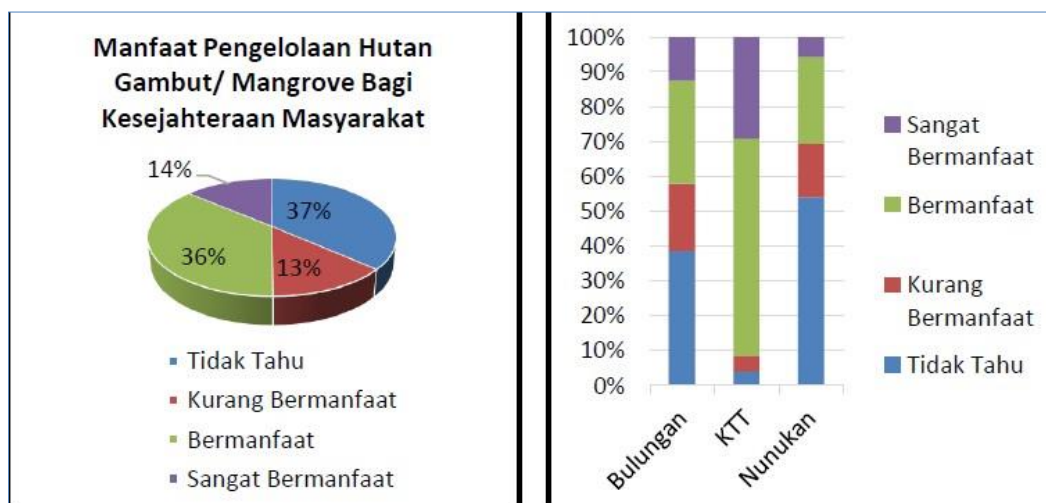
Peran nyata dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dianggap sangatlah penting dan strategis dalam upaya-upaya pengelolaan kawasan hutan. Saat ini pembentukan KPH-KPH dengan berbagai program yang bertujuan peningkatan nilai hutan non kayu dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya bisa menjadi langkah strategis.

Yaitu dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang optimal baik terkait dengan nilai ekologi maupun ekonomi dan sosial budayanya. Sinkronisasi dari berbagai program pembangunan antar sektor dan atau lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyentuh langsung masyarakat akan sangat diperlukan.



Gambar 93. Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung

Gambar 94. Perbandingan Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove/Gambut di Tiga Kabupaten di Delta Kayan Sembakung

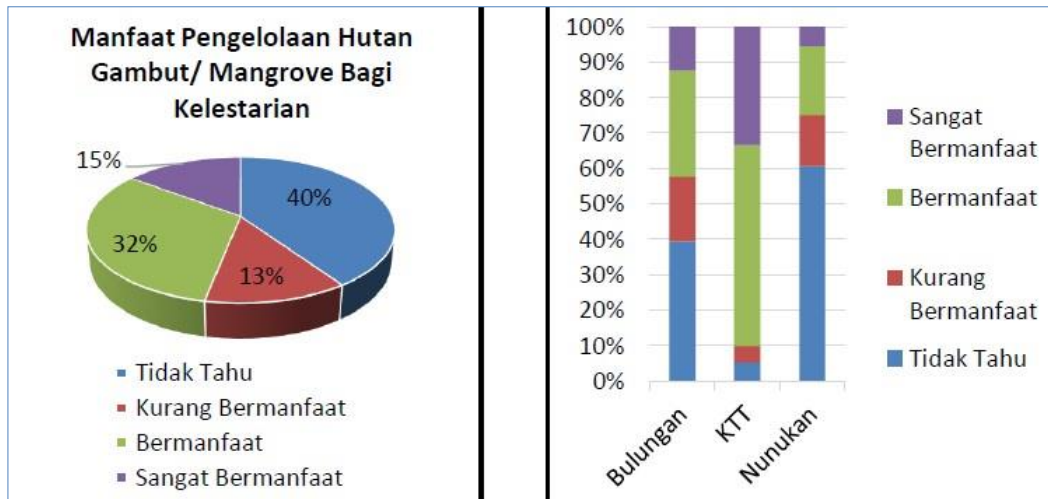


Gambar 95. Manfaat Pengelolaan Hutan Mangrove/Gambut Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Gambar 96. Perbandingan Manfaat Pengelolaan Hutan Mangrove/Gambut di Tiga Kabupaten Lokasi Studi di Delta Kayan Sembakung

Hasil survei terkait dengan manfaat dari pengelolaan kawasan hutan gambut/mangrove bagi kesejahteraan masyarakat menunjukkan 37% responden masih belum mengetahui, 36% responden bermanfaat, dan 14% responden lainnya juga menyatakan sangat bermanfaat sementara 13% lainnya menyatakan tidak bermanfaat. Sebagian besar warga masyarakat di desa-desa yang memiliki hutan mangrove dan gambutnya, adalah memanfaatkan kawasan tersebut sebagai lahan garapan untuk kegiatan pertanian dan perikanan.

Hasil survei terkait dengan manfaat pengelolaan hutan gambut/mangrove bagi kelestarian juga menunjukkan persentase yang besar dalam kategori masyarakat yang tidak tahu yaitu 40%, namun 32% responden lainnya menyatakan bermanfaat, 15% menyatakan sangat bermanfaat dan 13% responden lainnya menyatakan tidak bermanfaat.

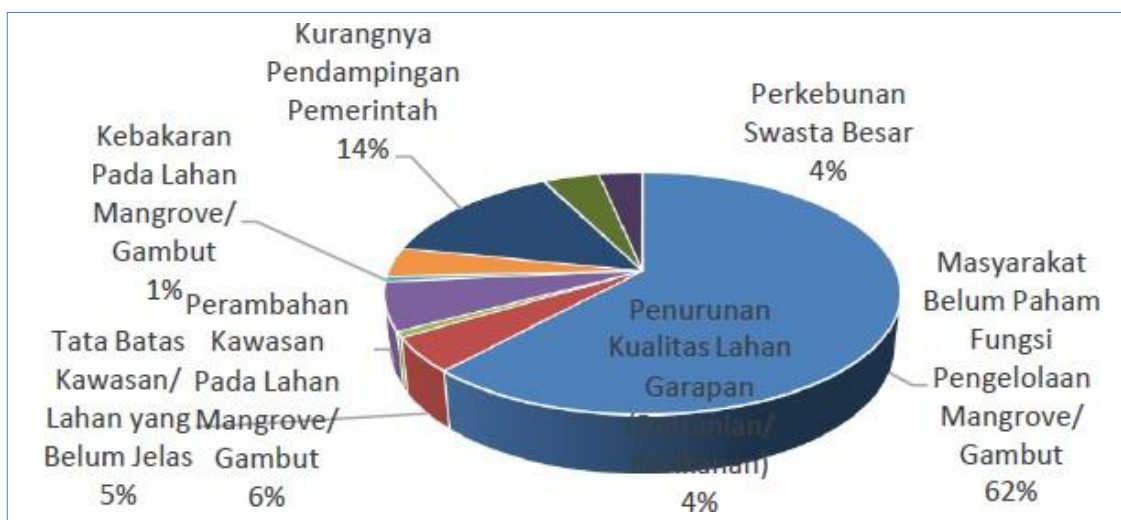


Gambar 97. Manfaat Hutan Mangrove/Gambut Bagi Kelestarian

Gambar 98. Perbandingan Manfaat Hutan Mangrove/Gambut Bagi Kelestarian di Tiga Kabupaten di Delta Kayan Sembakung

Identifikasi permasalahan yang dapat menggagalkan pengelolaan hutan mangrove/gambut menurut para 62% responden adalah belum pahamnya masyarakat akan fungsi pengelolaan hutan mangrove/gambut. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan banyaknya kesalahan penanganan atau pengolahan lahan maupun konflik baik vertikal maupun horizontal di tataran warga masyarakat. Selanjutnya 14% responden lainnya menyatakan kurangnya pendampingan pemerintah, termasuk pendapat bahwa perambahan dari kawasan mangrove/gambut sebesar 6% adalah permasalahan yang dapat menggagalkan pengelolaan hutan mangrove/gambut.

Sementara permasalahan lainnya seperti terkait tata batas kawasan/ lahan yang belum jelas, perkebunan swasta besar, penurunan kualitas lahan garapan pertanian/ perikanan, tumpang tindih kepemilikan lahan, kebakaran lahan mangrove/gambut, hutan tanaman industri dan permasalahan lainnya hanya dipilih oleh 5% responden saja.

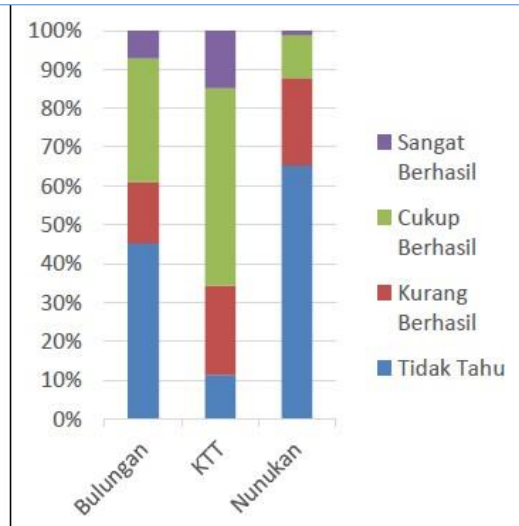


Gambar 99. Permasalahan Yang Dapat Menggagalkan Pengelolaan Hutan Mangrove/Gambut

Hasil survei terkait dengan indikator mengenai tingkat keberhasilan pengelolaan mangrove menunjukkan 64% untuk responden yang menyatakan tidak tahu, 27% menyatakan cukup berhasil, adapun 21% lainnya menyatakan kurang berhasil dan hanya 6% yang menyatakan sangat berhasil. Hasil dari analisis ini kemungkinan terkait dengan faktor ketidaktahuan dan kepehaman masyarakat akan nilai ekologis, ekonomi dan budaya dari keberadaan hutan mangrove/gambut.



Gambar 100. Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Hutan Mangrove/Gambut



Gambar 101. Perbandingan Tingkat Keberhasilan Hutan Mangrove/Gambut di Tiga Kabupaten Lokasi Studi

IX.1.4. Praktik-Praktik Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Mangrove dan Gambut

Hasil studi menunjukkan bahwa sumberdaya yang banyak dimanfaatkan masyarakat dari kawasan hutan gambut/mangrove adalah terkait jasa lingkungan (31%) dan hasil hutan kayu (31%), pemanfaatan lahan untuk pertanian/perikanan sebanyak 18%, hasil hutan non kayu (15%) maupun manfaat lainnya sebanyak 5%. Pemanfaatan lahan gambut dan mangrove tersebut pada umumnya memiliki pola yang sama yaitu untuk kegiatan budidaya perikanan tambak udang windu dan juga lahan pertanian.

Secara umum, studi ini juga telah mengumpulkan berbagai catatan lapangan terkait dengan praktik pemanfaatan sumberdaya hutan mangrove dan gambut sebagai berikut:

1. Hutan Mangrove banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan perairannya untuk lahan atau areal budidaya rumput laut, penangkapan ikan dan kepiting (dengan menggunakan pukat, memancing, keramba jaring apung dan jala), selain itu sebagian besar juga dimanfaatkan untuk tambak dan pemukiman warga. Sedangkan kayu dari hutan mangrove digunakan (secukupnya saja menurut responden) untuk bahan bakar, membuat pancang/jangkar tiang rumput laut dan gulang-gulang (tempat menjemur rumput laut) dan di beberapa tempat digunakan kayunya untuk acara pernikahan dan acara adat.

Tambak yang dijumpai pada waktu survei sudah tidak terlalu banyak dan sebagian sudah tidak produktif karena berupa hutan mangrove yang sudah terbuka, serta mulai berkurang kualitas lingkungannya. Meskipun demikian, sebagian masyarakat juga yang telah memanfaatkan areal hutan mangrove sebagai tempat wisata dengan konsep Ekowisata Mangrove sebagaimana dapat ditemui di Hutan Mangrove di Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale.

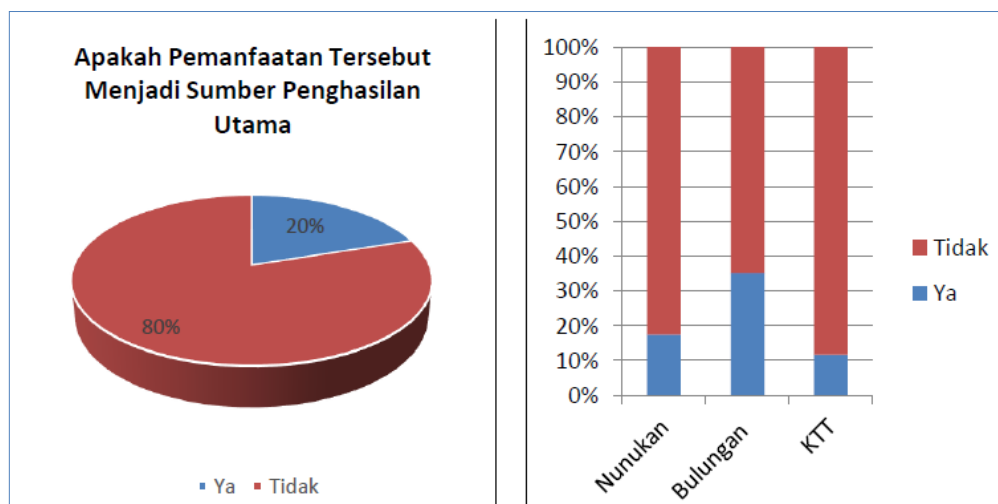
2. Hutan Gambut meskipun sebagian besar masih banyak yang dibiarkan serta tidak dikelola oleh masyarakat, tetapi dalam statusnya banyak yang sudah masuk kawasan yang telah dibebani izin perusahaan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan. Pertanian di lahan gambut ini berupa tanaman seperti singkong, pisang dan lada serta beragam sayur mayur seperti terong, cabe dan lain sebagainya.

Dalam skala yang lebih luas, maka hutan gambut ini juga dijadikan sebagai areal perkebunan dengan komoditas perkebunan utamanya yaitu kelapa sawit (di Desa Kunyit dan Sengkong di Kecamatan Sebuk). Areal hutan gambut yang menjadi areal dari perusahaan sebagian besar dimanfaatkan sebagai perkebunan sawit dan juga telah ditanami akasia. Sebagian masyarakat juga memanfaatkan lahan gambut sebagai areal bagi permukimannya, seperti yang dapat ditemui di Desa Lubakan Kecamatan Sembakung.

Perubahan peruntukan lahan sebagai lahan perkebunan sawit juga dikeluhkan oleh responden sebagai penyebab menurunnya kualitas perairan mangrove yang dimanfaatkan warga untuk pertanian rumput laut.

Oleh karena itu maka jenis sumberdaya yang dimanfaatkan masyarakat lebih banyak pada jasa lingkungan dan hasil hutan non kayu, maka 82% responden menyatakan pemanfaatan hutan mangrove/gambut bukan sebagai sumber pendapatan utama dan hanya 18% responden yang menyatakan sebaliknya. Hasil studi ini menunjukkan jika pemanfaatan lahan gambut dan mangrove selama ini ternyata tidak menjadi sumber matapencaharian utama dari masyarakat.

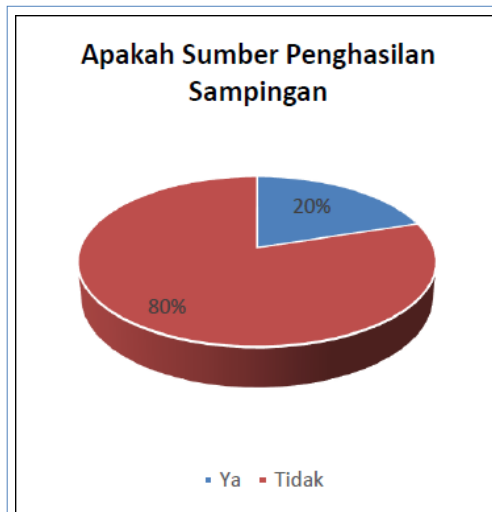
Meskipun di lapangan banyak ditemui rumah tangga yang hampir seluruh anggota keluarganya bekerja sebagai petani rumput laut ataupun berladang maupun bekerja di empang/kolam ikan. Tetapi ada juga responden yang menjadikan budidaya tambak sebagai pendapatan utamanya. Distribusi informasi ini di hampir sama di tiga kabupaten yang menjadi lokasi dari studi tetapi porsi dari Kabupaten Bulungan paling besar terkait dengan porsi masyarakatnya yang menjadikan pemanfaatan mangrove dan gambut sebagai sumber pendapatan utamanya.



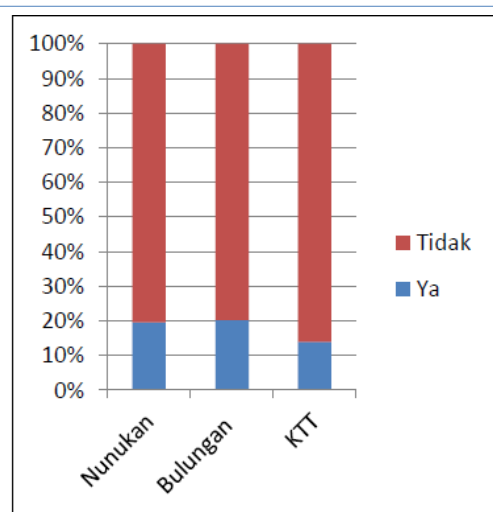
Gambar 102. Pemanfaatan Mangrove/Gambut Sebagai Sumber Pendapatan Utama Masyarakat

Gambar 103. Perbandingan Pemanfaatan Mangrove/Gambut Sebagai Sumber Pendapatan Utama di Tiga Kabupaten Lokasi Studi

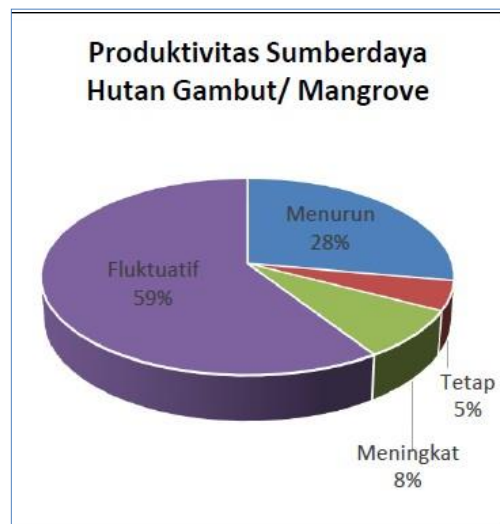
Hasil survei terkait dengan indikator mengenai pemanfaatan hutan mangrove dan gambut sebagai matapencaharian sampingan menunjukkan hasil yaitu 80% responden menyatakan tidak dan hanya 20% menyatakan ya. Dengan data ini menunjukkan relatif sama dengan indikator sebelumnya yang menunjukkan bahwa ternyata pemanfaatan gambut dan mangrove dalam masyarakat bukan merupakan pekerjaan utama ataupun pekerjaan sampingan.



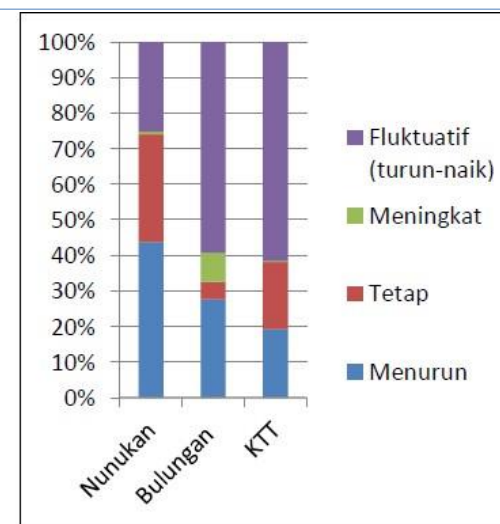
Gambar 104. Sebagai Penghasilan sampingan



Gambar 105. Perbandingan Sebagai Penghasilan Sampingan di Tiga Kabupaten Studi



Gambar 106. Produktivitas Sumber Daya Hutan Mangrove/Gambut di Delta Kayan Sembakung

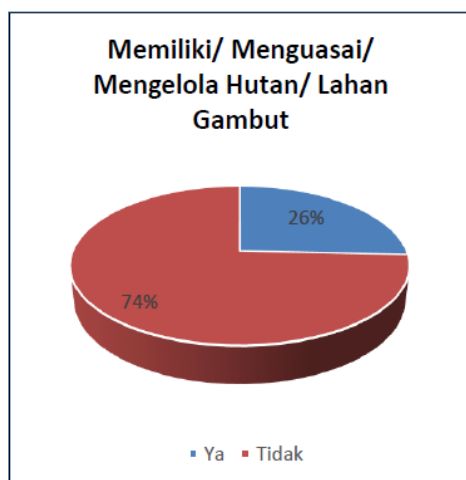


Gambar 107. Perbandingan Produktivitas Sumber Daya Hutan Mangrove/Gambut di Tiga Kabupaten Lokasi Studi

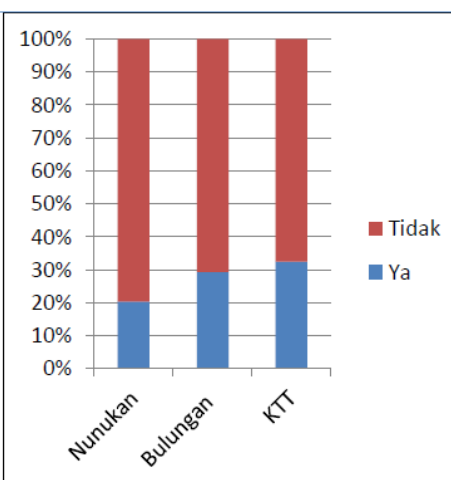
Terkait dengan produktivitas sumber daya hutan mangrove/gambut menurut responden ini bersifat lebih sering fluktuatif (59%), menurun hasilnya (28%), sementara hanya 8% responden yang menyatakan meningkat dan 5% menyatakan adalah tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan mangrove sebagai tambak udang windu yang memang hasilnya saat ini juga sudah tidak sebanyak sebelumnya. Serta kualitas perairan mangrove untuk pertanian rumput laut yang kondisinya saat ini hanya menghasilkan rumput laut yang kecil-kecil dan rendah harganya.

Hasil survei terkait data indikator untuk kepemilikan/menguasai/mengelola hutan dan lahan gambut menunjukkan bahwa sekitar 74% responden menyatakan jika mereka tidak memiliki atau menguasai lahan gambut yang ada di Desanya dan hanya memanfaatkan saja, sementara sekitar 26% responden menyatakan bahwa mereka memiliki/menguasai dan mengelola lahan gambut. Meskipun

demikian, untuk kawasan tambak yang masuk di dalam areal kawasan hutan maka warga masyarakat menyadari bahwa status kawasan ini adalah tidak dapat dimiliki sebagaimana seperti hak milik atau aset yang bersertifikat.

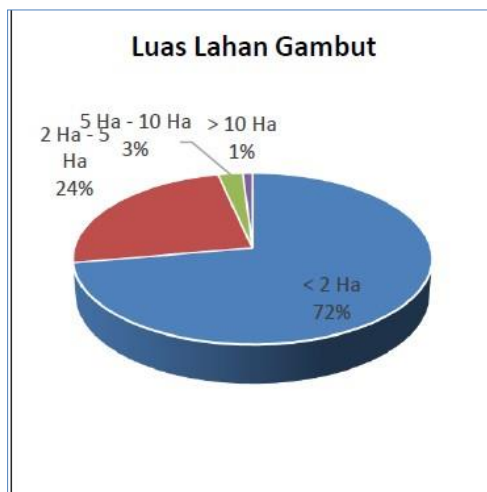


Gambar 108. Pemilikan/Penguasaan Pengelolaan Hutan Gambut di Delta Kayan Sembakung

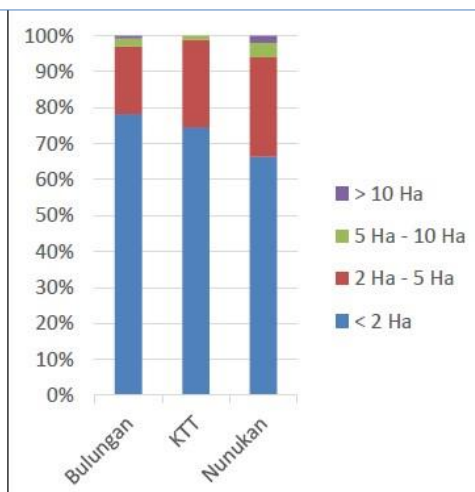


Gambar 109. Perbandingan Pemilikan/Penguasaan Pengelolaan Hutan Gambut di Tiga Kabupaten Lokasi Studi

Hasil survei menunjukkan luasan lahan gambut yang dikuasai oleh masyarakat menurut 72% responden adalah kurang dari 2 hektar, 24% responden menyatakan lebih dari 2 sampai kurang dari 5 hektar, 3% menyatakan lebih dari 5 hektar dan kurang dari 10 hektar dan hanya 1% responden yang menyatakan lebih dari 10 hektar.



Gambar 110. Kepemilikan/Penguasaan dan Pengelolaan Lahan Gambut di Delta Kayan Sembakung



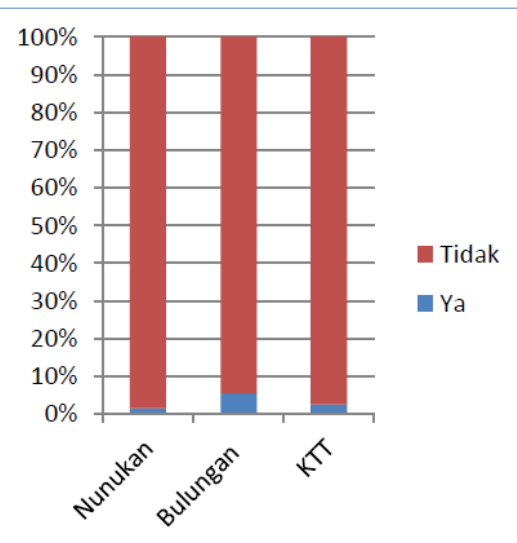
Gambar 111. Perbandingan Kepemilikan/Penguasaan dan Pengelolaan Lahan Gambut di Tiga Kabupaten Lokasi Studi

Hasil survei terkait dengan aset kepemilikan/penguasaan dan pengelolaan hutan mangrove menunjukkan sebanyak 97% responden menyatakan tidak memiliki/menguasai mengelola hutan

mangrove, dan hanya 3% yang menyatakan sebaliknya.

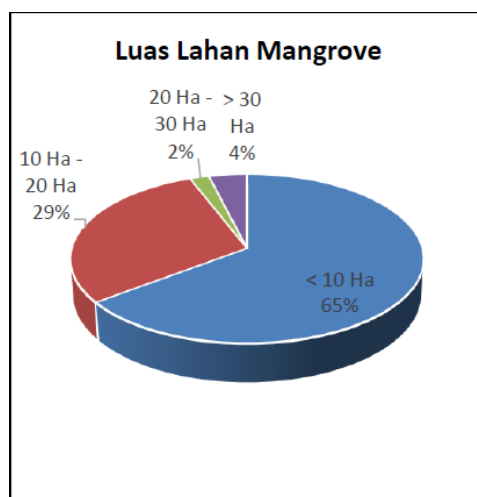


Gambar 112. Luas Lahan Mangrove Yang dikuasai di Delta Kayan Sembakung

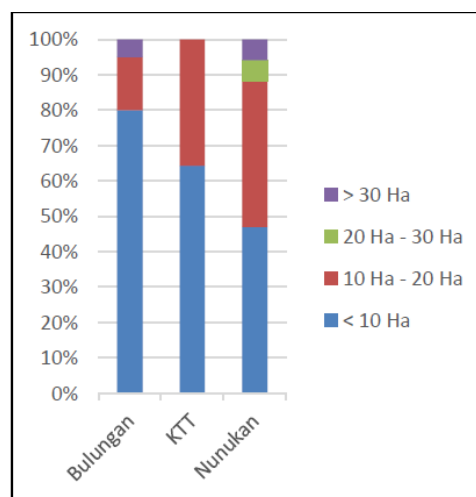


Gambar 113. Perbandingan Luas Lahan Mangrove Yang dikuasai Tiga Kabupaten Lokasi Studi

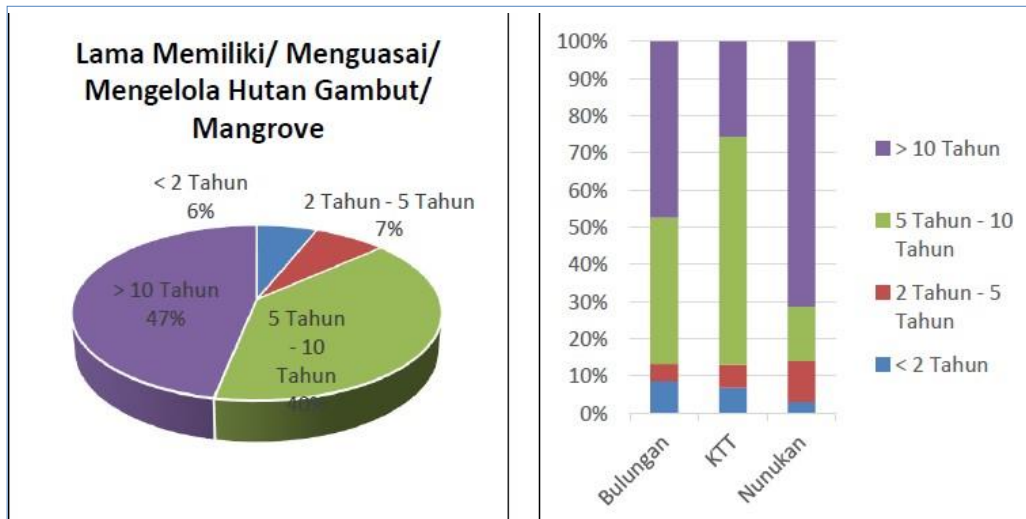
Hasil survei terkait luasan hutan mangrove yang dimiliki/dikuasai/dikelola oleh masyarakat, maka 65% responden menyatakan kurang dari 10 hektar, 29% menyatakan lebih dari 10 sampai kurang dari 20 hektar, 4% responden menyatakan lebih dari 30 hektar dan 2% lainnya menyatakan lebih dari 20 hektar sampai kurang dari 30 hektar.



Gambar 114. Luas Lahan Mangrove Yang Dikuasai di Delta Kayan Sembakung



Gambar 115. Perbandingan Luas Lahan Mangrove Yang dikuasai Tiga Kabupaten Lokasi Studi

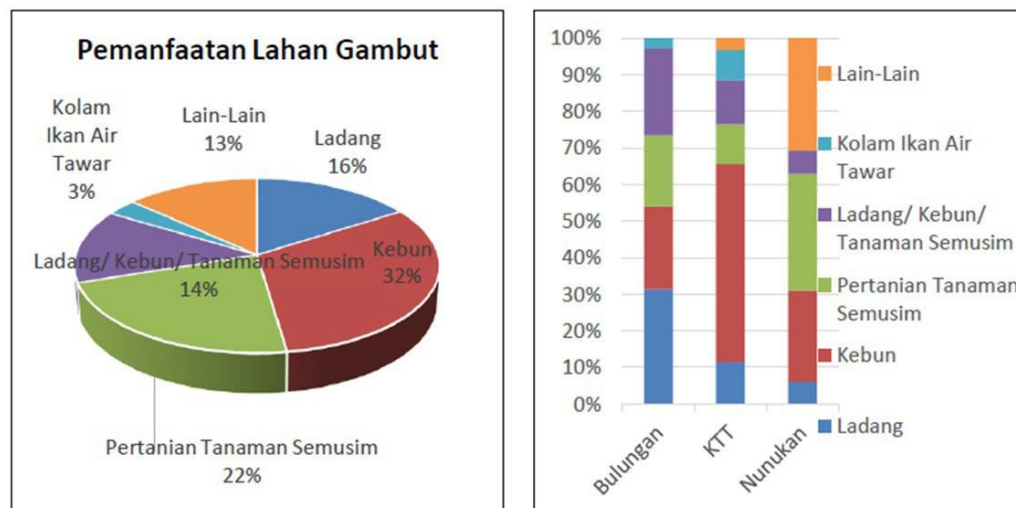


Gambar 116. Lama memiliki/menguasai dan mengelola hutan gambut/mangrove di Delta Kayan Sembakung

Gambar 117. Perbandingan Lama memiliki/menguasai dan mengelola hutan gambut/mangrove di Tiga Kabupaten Lokasi Studi

Data terkait lama memiliki/menguasai/ mengelola lahan gambut/ mangrove menunjukkan sekitar 47% responden adalah lebih dari 10 tahun, 40% responden lainnya menyatakan lebih dari 5 sampai kurang dari 10 tahun, sedangkan 7% responden menyatakan lebih dari 2 sampai kurang dari 5 tahun, dan 6% lainnya menyatakan kurang dari 2 tahun.

Hasil survei dari pemanfaatan kawasan lahan gambut menurut 32% responden adalah kebun; 22% responden menyatakan untuk pertanian tanaman semusim; 16% responden untuk ladang, 14% responden untuk ladang/ kebun/pertanian tanaman semusim; untuk pemanfaatan lain sebanyak 13% responden dan untuk kolam ikan air tawar sebanyak 3% responden.

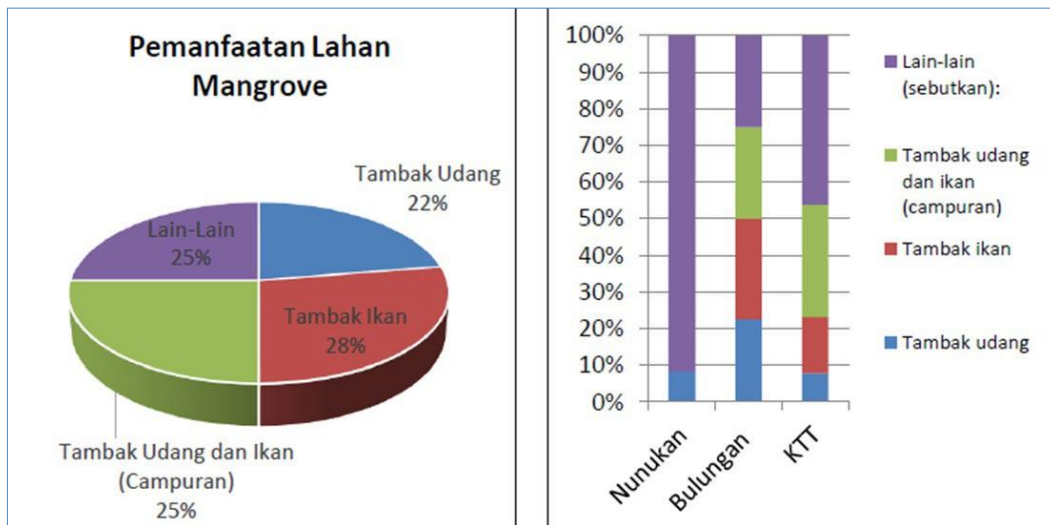


Gambar 118. Pemanfaatan Lahan Gambut di Delta Kayan Sembakung

Gambar 119. Perbandingan Pemanfaatan Lahan Gambut di Tiga Kabupaten Lokasi Studi

Sementara untuk pemanfaatan lahan mangrove menunjukkan persentase yang besar yaitu tambak ikan yaitu 28%, untuk tambak udang dan ikan (campuran) sebanyak 25% responden, untuk

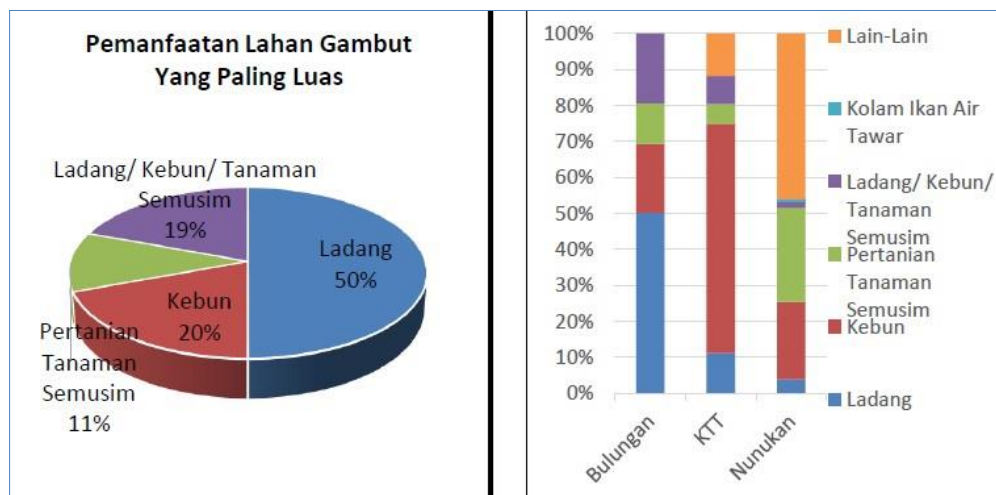
pemanfaatan lain-lain 25% responden dan untuk tambak udang sebanyak 22% responden.



Gambar 120. Pemanfaatan Lahan Mangrove di Delta Kayan Sembakung

Gambar 121. Perbandingan Pemanfaatan Lahan Mangrove di Tiga Kabupaten Lokasi Studi

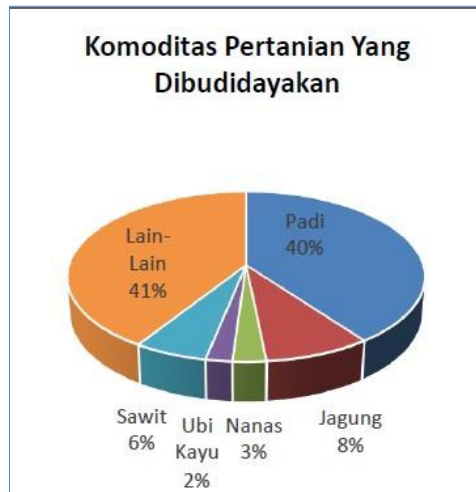
Pemanfaatan lahan gambut yang paling luas menurut masyarakat adalah untuk kebun (32%), pemanfaatan lain-lain 27%, untuk pertanian tanaman semusim 18%, untuk ladang 16% dan untuk ladang/ kebun/ tanaman semusim 7%. Dalam praktiknya sebagian masyarakat dan juga pengusaha membuka lahan masih dengan menggunakan metode membakar lahan. Hal ini yang tidak jarang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta semakin terbukanya lahan gambut.



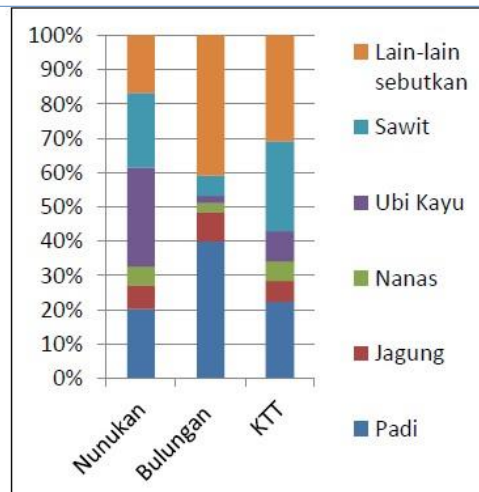
Gambar 122. Pemanfaatan Lahan Gambut Yang Paling Luas di Delta Kayan Sembakung

Gambar 123. Perbandingan Pemanfaatan Lahan Gambut Yang Paling Luas di Tiga Kabupaten Lokasi Studi

Komoditas pertanian yang dibudidayakan di lahan gambut menurut 26% responden adalah berbagai tanaman, 25% menyatakan padi masih menjadi komoditas pertanian terbesar yang dibudidayakan oleh masyarakat yang bermukim di Kawasan Delta Kayan Sembakung, 19% responden menyatakan untuk sawit, 18% menyatakan untuk ubi kayu, 7% menyatakan untuk jagung dan hanya 5% menyatakan untuk nanas.



Gambar 124. Komoditas Yang Dibudidayakan di Delta Kayan Sembakung



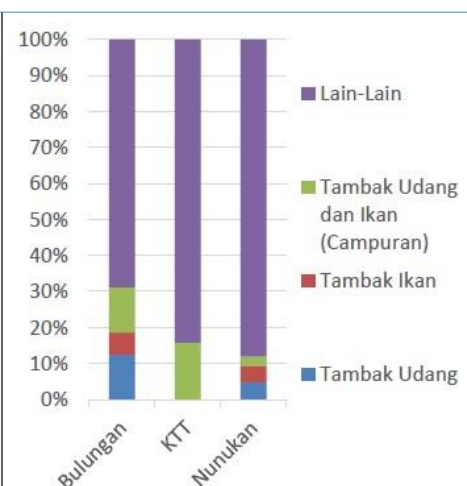
Gambar 125. Perbandingan Komoditas Yang Dibudidayakan di Tiga Kabupaten Lokasi Studi

Hasil survei menunjukkan pemanfaatan hutan mangrove yang paling luas menurut semua responden adalah untuk peruntukan lain-lain (69%), meskipun dalam indikator pemanfaatan hutan mangrove ini untuk tambak ikan, tambak udang dan tambak campuran memiliki persentase yang cukup besar. Pemanfaatan yang paling luas selanjutnya adalah untuk kawasan tambak udang dan ikan (campuran) sebanyak 13%, untuk tambak udang 12% dan untuk tambak ikan 6%.

Sementara jika memperhatikan detail catatan lapangan enumerator dan kegiatan monitoring evaluasi baseline ini, maka ada informasi hutan mangrove saat ini sudah lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian rumput laut dan jasa lingkungan yaitu ekowisata. Hal ini dilatar belakangi juga dengan kemunduran sektor pertambakan, serta adanya kebijakan yang melarang pembukaan areal mangrove untuk kegiatan pertambakan baru. Hadirnya program perbaikan kualitas hutan mangrove seperti reboisasi dan penghijauan, secara tidak langsung telah mengedukasi masyarakat tentang potensi bahaya kegiatan membuka lahan mangrove yang semena-mena.



Gambar 126. Pemanfaatan Lahan Mangrove Yang Paling Luas di Delta Kayan Sembakung

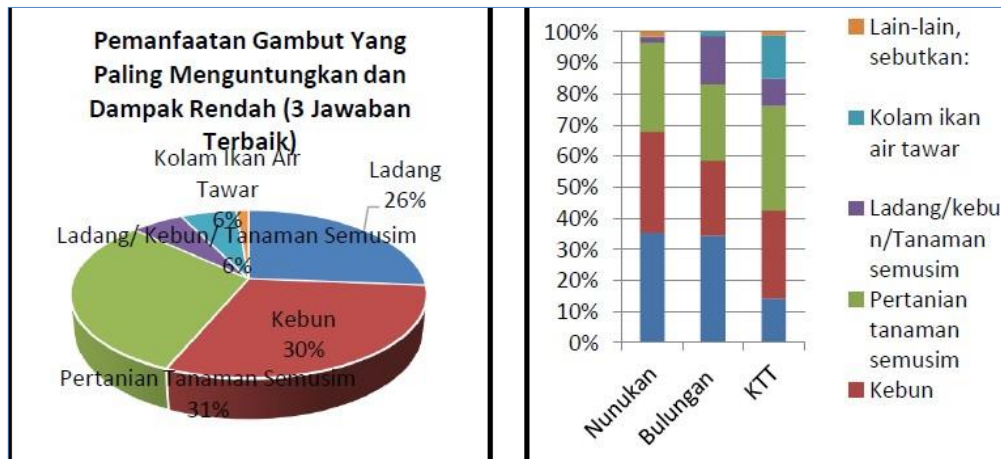


Gambar 127. Perbandingan Pemanfaatan Lahan Mangrove Yang Paling Luas Di Tiga Kabupaten Lokasi Studi

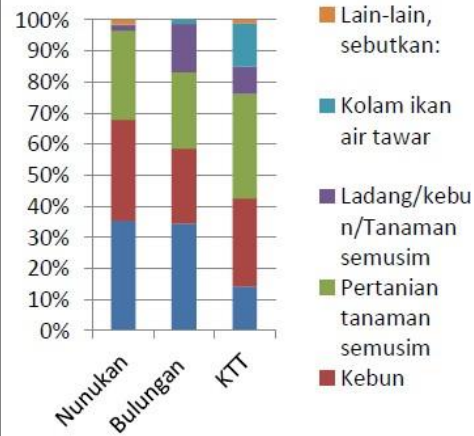
Saat ini juga mulai banyak kegiatan yang dilatar belakangi gerakan pembangunan hijau yang

mencoba meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan pendapatan daerah melalui program perbaikan kualitas hutan dan lingkungan alami.

Hasil survei menunjukkan tiga jawaban responden terbanyak terkait dengan pemanfaatan lahan gambut yang paling menguntungkan serta dampaknya rendah adalah pertanian tanaman semusim (31%), kebun (30%) dan ladang (26%).

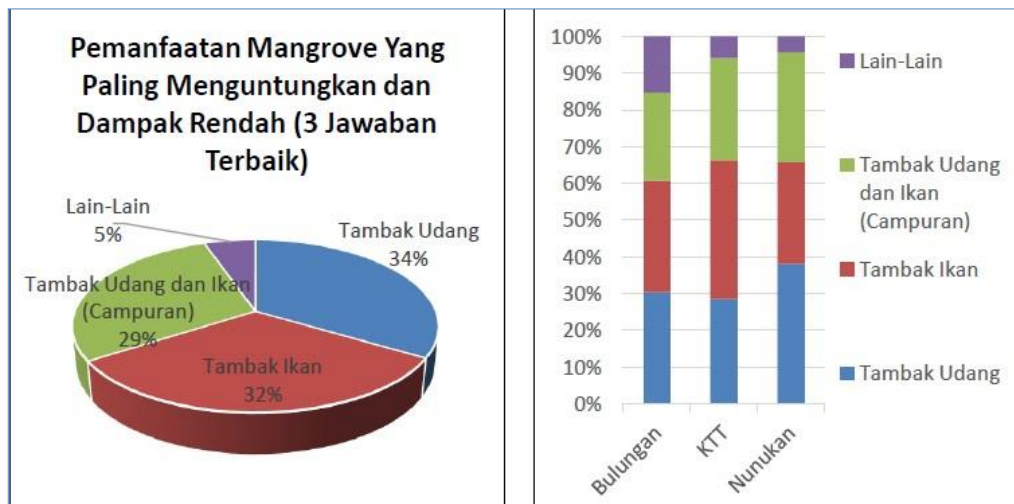


Gambar 128. Pemanfaatan Lahan Gambut Paling Menguntungkan dan Dampak Paling Rendah

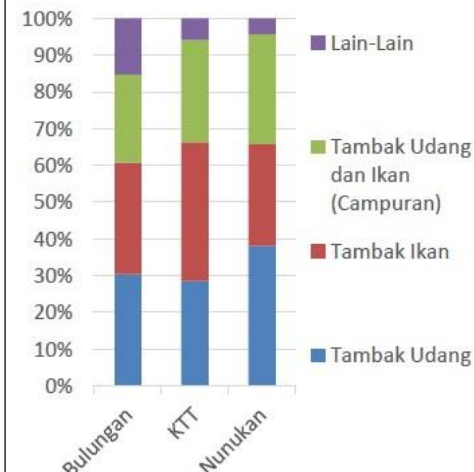


Gambar 129. Perbandingan Pemanfaatan Lahan Gambut Paling Menguntungkan dan Dampak Paling Rendah di Tiga Kabupaten Lokasi Studi

Sementara hasil survei untuk penggunaan lahan mangrove yang paling menguntungkan dan dampaknya rendah dengan jawaban responden terbanyak adalah tambak udang (34%), tambak ikan sebanyak 32% dan tambak campuran (ikan dan udang) sebanyak 29%.



Gambar 130. Pemanfaatan Lahan Mangrove Paling Menguntungkan dan Dampak Paling Rendah



Gambar 129. Perbandingan Pemanfaatan Lahan Mangrove Paling Menguntungkan dan Dampak Paling Rendah di Tiga Kabupaten Lokasi Studi

Hasil survei terkait hal penting yang sebaiknya dilakukan agar produksi di hutan mangrove

dan lahan gambut tetap tinggi menurut pengalaman responden adalah mengatur tata air sebanyak 26% responden, mengolah tanah/lahan 23%, memupuk tanah/lahan yaitu 18%, memberantas hama atau penyakit 17% dan Tindakan lain-lainnya sebanyak 16%.



Gambar 131. Hal Penting Yang Dilakukan Agar Produksi Tinggi Berdasarkan Pengalaman di Delta Kayan Sembakung



Gambar 132. Perbandingan Hal Penting Yang Dilakukan Agar Produksi Tinggi Berdasarkan Pengalaman di Tiga Kabupaten Lokasi Studi

BAGIAN X: PERSEPSI DAN MOTIVASI

Konsep persepsi dan motivasi dalam kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana persepsi responden terhadap manfaat hutan mangrove/gambut yang ada di sekitar desa dan motivasi responden dalam memanfaatkan hutan mangrove/gambut tersebut.

Kompleksitas persepsi responden ini akan dinilai dari persepsi terhadap 4 macam manfaat sumberdaya hutan mangrove dan gambut yaitu manfaat penggunaan langsung, manfaat fungsional, manfaat pilihan, manfaat keberadaan dengan manfaat lainnya. Sementara motivasi responden adalah terkait dengan penilaian terhadap motivasi ekonomi, motivasi sosial dan motivasi lingkungan.

X.1. PERSEPSI

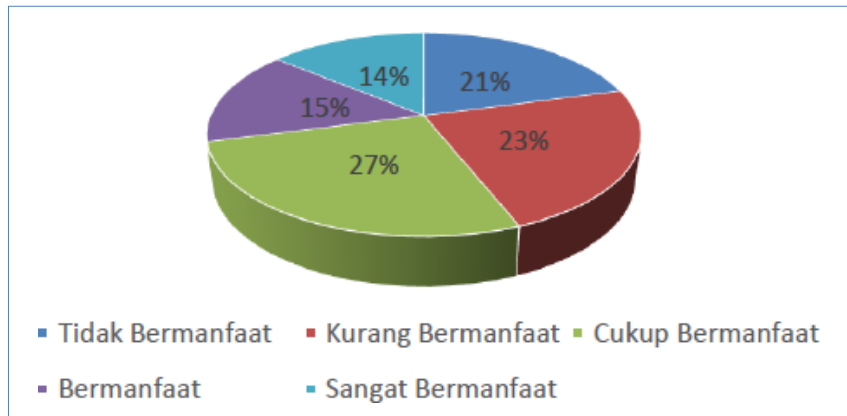
Secara konseptual, persepsi adalah sebuah proses yang ditempuh masing-masing individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan dari indera yang dimiliki individu agar memberikan makna kepada lingkungan sekitarnya. Persepsi dalam studi ini bertujuan untuk mengetahui atau menilai tentang persepsi masyarakat terhadap manfaat penggunaan, manfaat fungsional, manfaat pilihan, dan manfaat keberadaan sumberdaya hutan mangrove dan gambut.

IX.1.1. Persepsi Terhadap Manfaat Penggunaan Sumberdaya Hutan Mangrove/Gambut

Konsep manfaat penggunaan adalah manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dari hutan mangrove dan gambut baik ini berupa manfaat lahan garapan budidaya pertanian dan perikanan, manfaat hasil hutan kayu, manfaat hasil hutan non kayu dan manfaat sumber air. Hasil studi ini telah menunjukkan persepsi responden terhadap nilai manfaat penggunaan sumberdaya hutan mangrove dan gambut berada dalam kategori tingkat yang cukup bermanfaat.

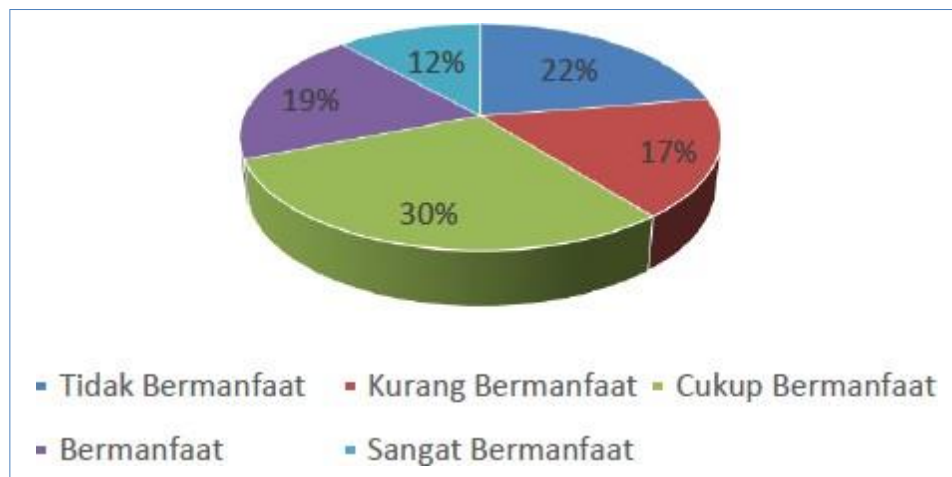
Pemanfaatan untuk lahan garapan dan kegiatan budidaya pertanian dalam kawasan lahan gambut dilakukan dengan menanam berbagai tanaman misalnya padi, jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, singkong, pisang, lada, cabe, terong, nanas, dan lainnya. Selain tanaman pertanian, maka lahan gambut ini juga sudah banyak dimanfaatkan untuk lokasi perkebunan kelapa sawit baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat setempat. Pemanfaatan untuk perikanan tidak berupa kegiatan budidaya tetapi sebagai tempat untuk mencari ikan dan udang selain untuk penjemuran rumput laut.

Manfaat hutan mangrove dan gambut untuk lahan garapan budidaya pertanian dan ataupun perikanan menurut 27% responden adalah cukup bermanfaat, 23% menyatakan kurang bermanfaat, 21% menyatakan tidak bermanfaat, 15% menyatakan bermanfaat dan ada 14% yang menyatakan sangat bermanfaat.



Gambar 133. Persepsi Sumber Daya Gambut/Mangrove Sebagai Lahan Garapan Budidaya Pertanian dan Perikanan

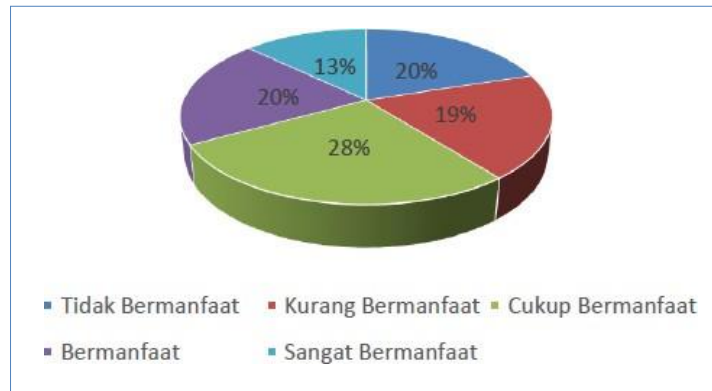
Hasil studi menunjukkan pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat di hutan mangrove adalah untuk kayu bakar, kayu untuk pancang, tiang dan jangkar pada budidaya rumput laut, kayu untuk “gulang-gulang” atau tempat menjemur rumput laut, dan juga kayu untuk bangunan rumah.



Gambar 134. Persepsi Sumber Daya Gambut/Mangrove Sebagai Sumber Hasil Hutan Kayu

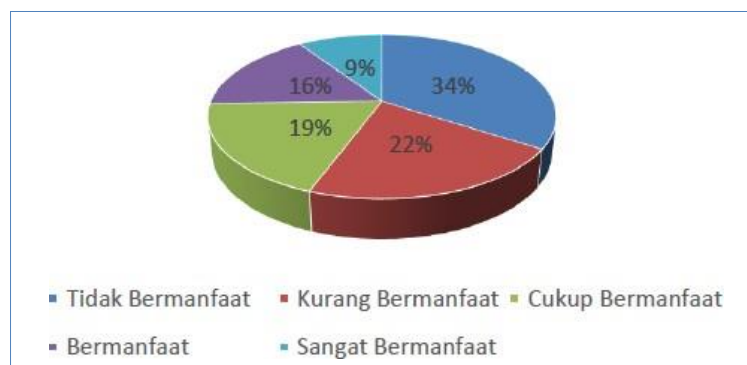
Sebagai sumber daya hasil hutan kayu, hasil studi juga menunjukkan sekitar 30% responden menyatakan kawasan hutan mangrove cukup bermanfaat, namun 22% responden menyatakan tidak bermanfaat, 19% responden menyatakan bermanfaat, 17% responden menyatakan kurang bermanfaat dan 12% menyatakan sangat bermanfaat.

Untuk pemanfaatan hasil hutan non kayu belum banyak dilakukan oleh masyarakat, karena yang dilakukan sekedar pengambilan madu dalam waktu tertentu. Untuk hasil hutan non kayu, maka 28% responden menyatakan cukup bermanfaat, 20% menyatakan tidak bermanfaat, 20% responden lainnya menyatakan sangat bermanfaat, 19% responden menyatakan kurang bermanfaat dan 13% menyatakan sangat bermanfaat.



Gambar 135. Persepsi Sumber Daya Gambut/Mangrove Sebagai Sumber Hasil Hutan Bukan Kayu

Warga masyarakat di sekitar hutan mangrove dan gambut secara umum telah menjadikan sungai, mata air dan sumur sebagai sumber air sehingga dengan demikian sumber daya air yang berasal dari hutan mangrove dan gambut tidak secara langsung dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini tergambar dari hasil survei yang menunjukkan 34% responden telah menyatakan hutan mangrove dan gambut tidak bermanfaat sebagai sumber air, 22% responden menyatakan kurang bermanfaat, 19% responden menyatakan cukup bermanfaat, dan hanya 16% responden menyatakan bermanfaat sementara 9% menyatakan sangat bermanfaat.

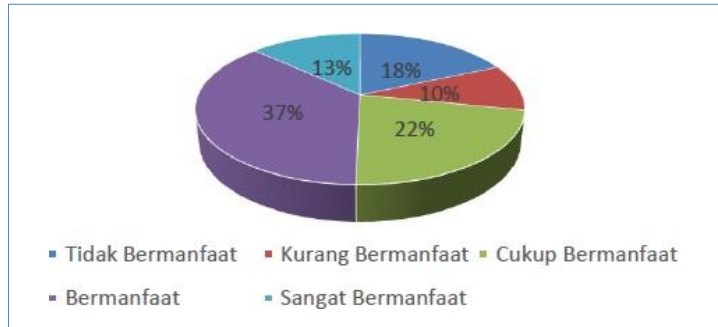


Gambar 136. Persepsi Sumber Daya Gambut/Mangrove Sebagai Sumber Air

IX.1.1. Persepsi Terhadap Manfaat Fungsional Sumber Daya Hutan Gambut/Mangrove

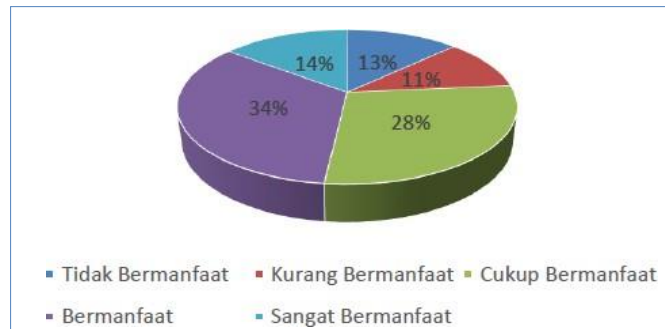
Secara konseptual, maka manfaat fungsional adalah nilai-nilai ekologis yang diberikan oleh sumberdaya hutan mangrove dan gambut seperti untuk perlindungan terhadap angin, mencegah banjir, mencegah erosi dan sedimentasi, pengatur tata air, dan untuk pelestarian plasma nutfah.

Hasil survei yang didasarkan kepada analisis skoring dapat menghasilkan kesimpulan bahwa penilaian masyarakat sumberdaya hutan mangrove dan gambut cukup bermanfaat secara fungsional atau ekologis.



Gambar 137. Persepsi Sumber Daya Mangrove/Gambut Untuk Perlindungan Terhadap Angin

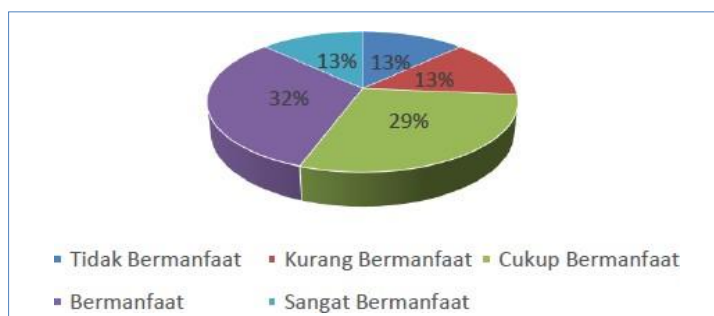
Hasil survei terkait dengan manfaat dari sumberdaya hutan mangrove dan gambut sebagai perlindungan terhadap angin menunjukkan sekitar 37% responden bermanfaat, 22% menyatakan cukup bermanfaat, 18% menyatakan tidak bermanfaat, 13% menyatakan sangat bermanfaat dan 10% menyatakan kurang bermanfaat.



Gambar 138. Persepsi Sumber Daya Mangrove/Gambut Dalam Mencegah Banjir

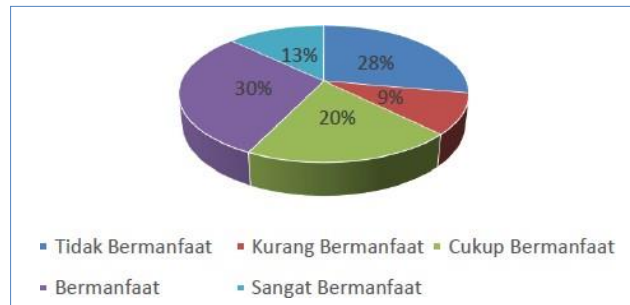
Warga masyarakat merasakan manfaat sumberdaya hutan dan gambut ini untuk mencegah banjir hasil survei menunjukkan persepsi 34% responden bermanfaat, 28% responden menyatakan cukup bermanfaat, 14% responden menyatakan sangat bermanfaat, ada 13% yang menyatakan tidak bermanfaat, dan 11% responden menyatakan kurang bermanfaat.

Terkait dengan fungsi untuk pencegahan erosi dan sedimentasi, hasil survei menunjukkan responden secara umum memiliki persepsi yang sama sebagaimana manfaat fungsional lainnya. Data hasil survei memperlihatkan 32% responden menyatakan bermanfaat, 29% dari responden menyatakan cukup bermanfaat, 13% responden menyatakan sangat bermanfaat, 13% responden menyatakan kurang bermanfaat, dan 13% lainnya menyatakan tidak bermanfaat.



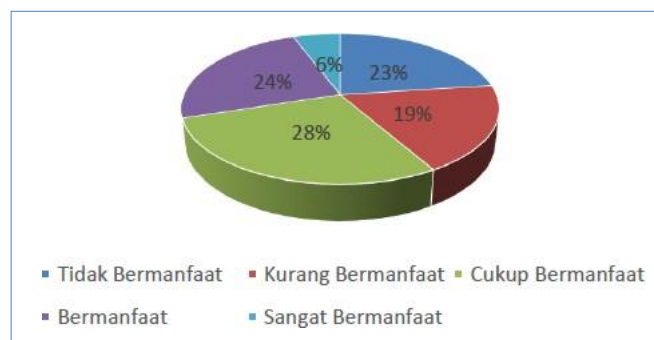
Gambar 139. Persepsi Sumber Daya Mangrove/Gambut Untuk Mencegah Erosi/Sedimentasi

Meskipun secara umum manfaat sumberdaya hutan mangrove dan gambut adalah sebagai pengatur tata air tetapi hasil survei menunjukkan pendapat 30% responden bermanfaat, sekitar 28% responden menyatakan tidak bermanfaat, 20% responden lainnya menyatakan cukup bermanfaat, 13% menyatakan sangat bermanfaat, dan 10% responden menyatakan kurang bermanfaat.



Gambar 140. Persepsi Sumber Daya Mangrove/Gambut Sebagai Pengatur Tata Air

Manfaat fungsional lainnya yang dapat diperoleh dari sumberdaya hutan mangrove maupun gambut adalah pelestarian plasma nutfah. Hasil survei terkait fungsi ini menurut 28% responden sumberdaya hutan mangrove dan gambut cukup bermanfaat untuk pelestarian plasma nutfah, 24% responden menyatakan bermanfaat, 23% responden menyatakan tidak bermanfaat, 19% responden menyatakan kurang bermanfaat, dan 6% responden lainnya menyatakan sangat bermanfaat.

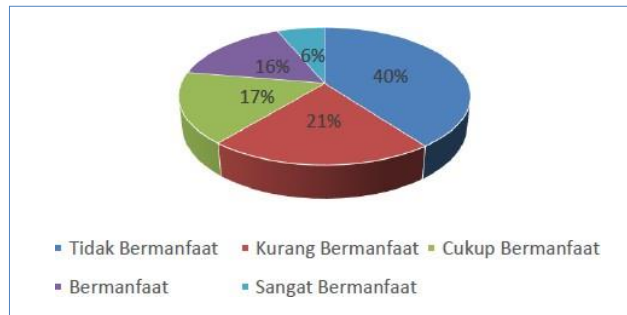


Gambar141. Persepsi Sumber Daya Mangrove/Gambut Untuk Pelestarian Plasma Nutfah

IX.1.3. Persepsi Terhadap Manfaat Pilihan Sumberdaya Hutan Mangrove/Gambut

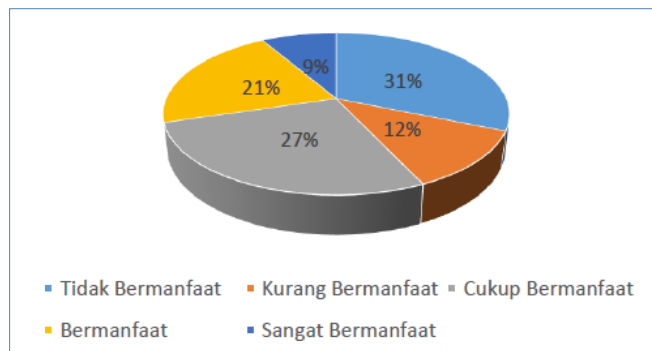
Manfaat pilihan dari sumberdaya hutan mangrove dan gambut adalah pilihan pemanfaatan di masa mendatang. Manfaat pilihan berkaitan dengan ketidakpastian manfaat yang dapat diberikan oleh lingkungan atau sumberdaya alam, sehingga manfaat pilihan ini juga dapat diartikan sebagai manfaat pemeliharaan sehingga manfaat dari sumberdaya alam dalam hal ini sumberdaya hutan mangrove dan gambut masih tersedia di masa depan.

Dalam kajian ini, maka responden diberikan tiga manfaat pilihan yang diperkirakan sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat di masa yang akan datang dari sumberdaya hutan mangrove dan gambut. Yaitu manfaat sebagai tempat berolahraga, tempat rekreasi, tempat pelaksanaan upacara adat dan pemandangan yang indah. Secara umum, tingkat persepsi responden terhadap manfaat pilihan yang ditetapkan ini adalah cukup bermanfaat.



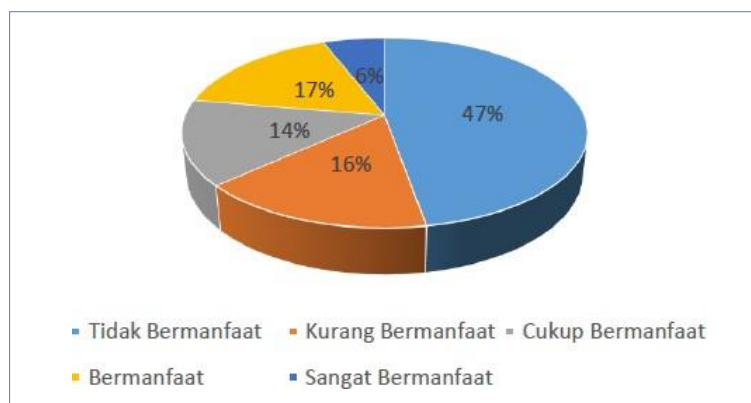
Gambar 142. Persepsi Sumber Daya Mangrove/Gambut Untuk Tempat Olah Raga

Hasil survei terkait dengan manfaat pilihan sebagai tempat olahraga menurut 40% responden studi ini adalah tidak bermanfaat, 21% responden menyatakan kurang bermanfaat, 17% responden menyatakan cukup bermanfaat, 16% responden menyatakan bermanfaat, dan hanya 6% responden menyatakan sangat bermanfaat.



Gambar 143. Persepsi Sumber Daya Mangrove/Gambut Sebagai Tempat Rekreasi

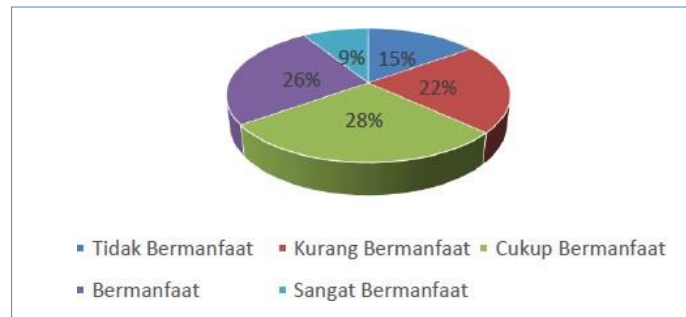
Hasil survei terkait manfaat pilihan sebagai tempat rekreasi menurut 31% responden adalah tidak bermanfaat, 27% responden menyatakan cukup bermanfaat, 21% responden menyatakan bermanfaat, 12% responden menyatakan kurang bermanfaat dan 9% responden menyatakan sangat bermanfaat.



Gambar 144. Persepsi Sumber Daya Mangrove/Gambut Tempat Upacara Adat

Hasil studi terkait dengan persepsi terhadap manfaat pilihan sebagai tempat upacara adat, adalah tidak jauh berbeda dengan persepsi terhadap manfaat pilihan lainnya. Responden lebih banyak

menyatakan tidak bermanfaat karena menurut 47% responden sumberdaya hutan mangrove dan gambut tidak bermanfaat sebagai tempat upacara adat, 17% responden menyatakan bermanfaat, 16% responden menyatakan kurang bermanfaat, 14% responden menyatakan cukup bermanfaat dan hanya 6% responden yang menyatakan sangat bermanfaat.



Gambar 145. Persepsi Sumber Daya Mangrove/Gambut Sebagai Keindahan Pemandangan

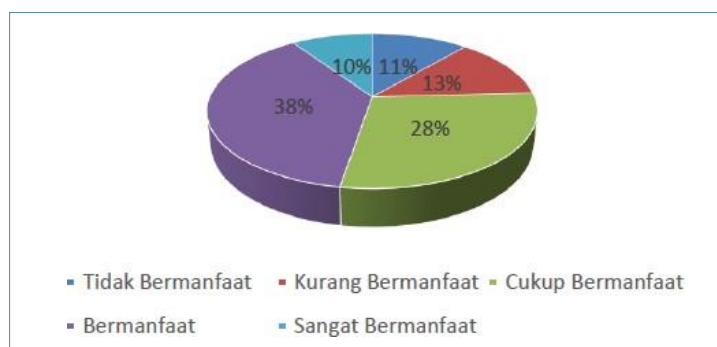
Manfaat pilihan dari berbagai sumberdaya hutan mangrove dan gambut ini dapat juga berupa keindahan pemandangan yang dirasakan oleh warga masyarakat, dimana 28% responden menyatakan cukup bermanfaat, 24% menyatakan bermanfaat, 23% responden menyatakan tidak bermanfaat, 19% responden menyatakan kurang bermanfaat dan 6% responden menyatakan sangat bermanfaat.

IX.1.4. Persepsi Terhadap Manfaat Keberadaan Sumber Daya Hutan Mangrove/Gambut

Manfaat keberadaan dapat diartikan sebagai satu kepuasan seseorang atau komunitas atau masyarakat terhadap keberadaan suatu sumberdaya alam, meskipun tidak ada satu keinginan untuk memanfaatkan. Seseorang atau warga masyarakat memberikan nilai kepada sumberdaya alam dapat disebabkan adanya manfaat lain yang diberikan oleh sumberdaya alam tersebut untuk lingkungan sekitarnya.

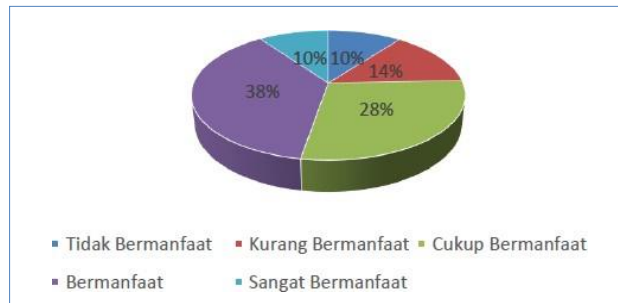
Hasil studi terkait persepsi responden terhadap manfaat keberadaan sumberdaya hutan mangrove dan gambut berdasarkan nilai skor adalah dalam kategori cukup bermanfaat. Persepsi ini terdiri dari persepsi responden terhadap keberadaan sumberdaya hutan mangrove dan gambut untuk habitat berbagai jenis tumbuhan, habitat berbagai jenis hewan, serta habitat tumbuhan dan hewan.

Nilai manfaat keberadaan sumberdaya hutan mangrove dan gambut untuk habitat tumbuhan menunjukkan persepsi sebanyak 38% berpendapat bermanfaat, 28% menyatakan cukup bermanfaat, 13% responden menyatakan kurang bermanfaat, 11% responden menyatakan tidak bermanfaat dan 9% responden menyatakan sangat bermanfaat.



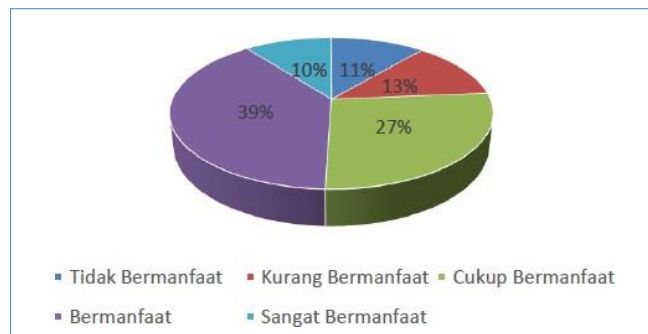
Gambar 146. Persepsi Sumber Daya Mangrove/Gambut Habitat Berbagai Tumbuhan

Hasil studi terkait dengan nilai keberadaan sumberdaya hutan mangrove dan gambut sebagai habitat hewan menurut sekitar 38% responden adalah bermanfaat, 28% responden menyatakan cukup bermanfaat, 14% responden menyatakan kurang bermanfaat, 10% responden menyatakan tidak bermanfaat dan 10% responden lainnya menyatakan sangat bermanfaat.



Gambar 147. Persepsi Sumber Daya Mangrove/Gambut Untuk Habitat Berbagai Jenis Hewan

Hasil studi terkait dengan persepsi responden terhadap nilai manfaat keberadaan sumberdaya hutan mangrove dan gambut untuk habitat tumbuhan dan hewan, menunjukkan total sebanyak 39% responden menyatakan bermanfaat, 28% responden menyatakan cukup bermanfaat, 13% responden menyatakan cukup bermanfaat, dan 11% responden menyatakan sangat bermanfaat.



Gambar 148. Persepsi Sumber Daya Mangrove/Gambut Sebagai Habitat Untuk Tumbuhan dan Hewan

X.2. MOTIVASI

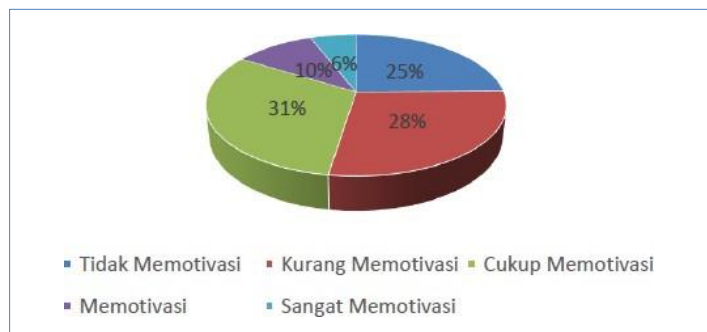
Secara konsep, motivasi dapat berarti dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Arti lainnya adalah semua hal yang akan menimbulkan dorongan ataupun semangat seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Pemanfaatan sumberdaya alam seperti sumberdaya hutan mangrove dan gambut juga didasarkan kepada motivasi atau secara sederhana sering disebut sebagai alasan.

Untuk memahami motivasi dan atau alasan memanfaatkan sumberdaya hutan mangrove dan gambut oleh warga masyarakat di desa-desa dalam kawasan Delta Kayan Sembakung, maka responden diberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan beberapa alternatif pilihan alasan sebagaimana uraikan berikut:

IX.2.1. Motivasi Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Mangrove/Gambut

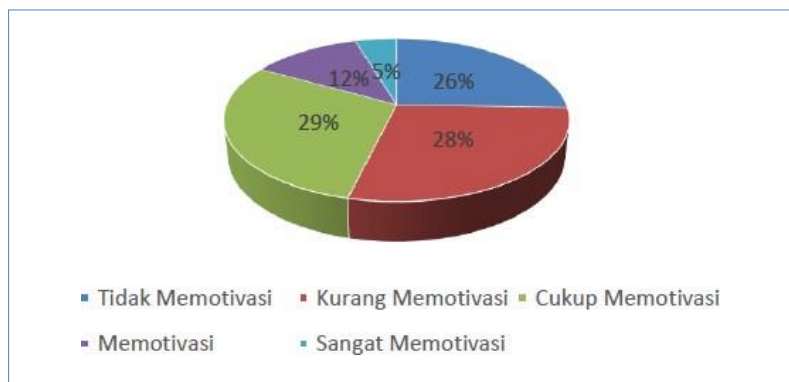
Sumberdaya hutan mangrove dan gambut dapat memberikan manfaat yang bernilai secara ekonomi atau menghasilkan pendapatan bagi masyarakat, hal ini dapat menjadi salah satu motivasi atau alasan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam tersebut.

Secara umum, maka hasil perhitungan skoring dari tanggapan responden ini menghasilkan kesimpulan bahwa manfaat sumberdaya hutan mangrove dan gambut yang dapat memberikan nilai ekonomi berupa pendapatan, dan cukup memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hutan mangrove atau gambut.



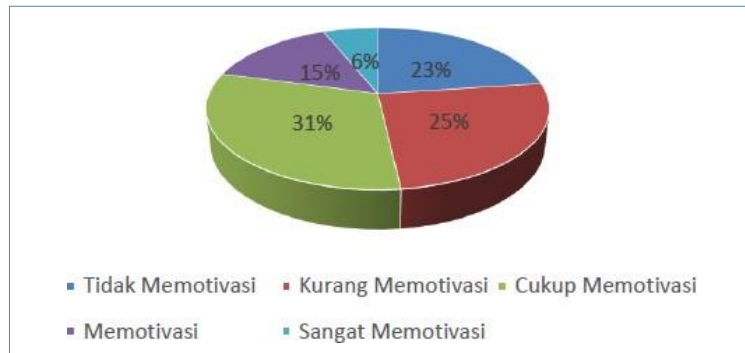
Gambar 149. Kebutuhan Memperoleh Pendapatan Dari Pemanfaatan Lahan (Tanah)

Hasil survei terkait motivasi untuk memperoleh pendapatan dari pemanfaatan lahan (tanah) sumberdaya hutan mangrove dan gambut menurut 31% responden adalah cukup memotivasi, namun ada sekitar 28% responden lainnya menyatakan kurang memotivasi dan 25% responden lainnya juga menyatakan tidak memotivasi. Meskipun demikian ada 10% responden menyatakan memotivasi dan 6% responden lainnya menyatakan sangat memotivasi.



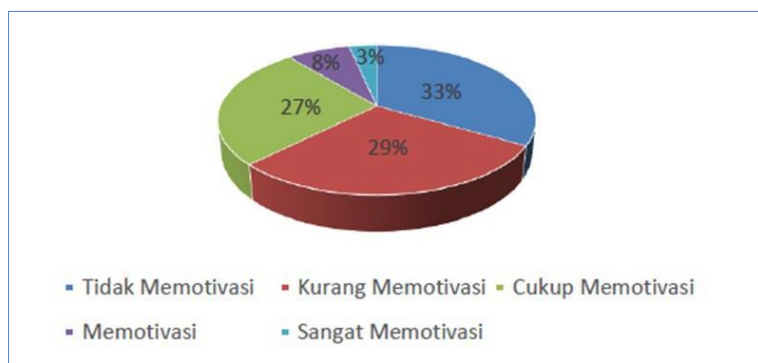
Gambar 150. Kebutuhan Memperoleh Pendapatan Dari Hasil Hutan Kayu

Berdasarkan hasil survei menunjukkan motivasi untuk memperoleh pendapatan dari hasil hutan kayu adalah disampaikan oleh 29% responden sebagai cukup memotivasi, namun menurut 28% responden kurang memotivasi dan 26% responden menyatakan tidak memotivasi, sedangkan 12% responden menyatakan memotivasi dan 5% responden lainnya menyatakan sangat memotivasi.



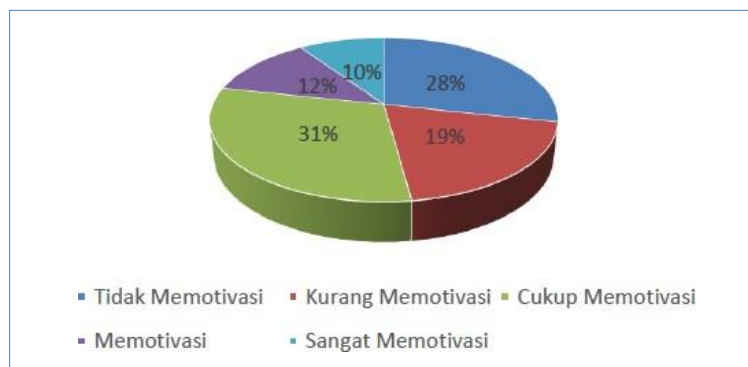
Gambar 151. Kebutuhan Memperoleh Pendapatan Dari Hasil Hutan Bukan Kayu

Hasil survei menunjukkan motivasi untuk memperoleh pendapatan dari hasil hutan non kayu menurut 31% responden adalah cukup memotivasi. Tetapi karena belum banyak warga masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan non kayu, maka ada 25% responden menyatakan kurang memotivasi dan 23% responden lainnya menyatakan tidak memotivasi. Hanya ada sekitar 15% responden yang menyatakan memotivasi dan 6% responden menyatakan sangat memotivasi.



Gambar 152. Kebutuhan Memperoleh Pendapatan Dari Pemanfaatan Air

Hasil survei menunjukkan bahwa pola pemanfaatan air dari sumberdaya hutan mangrove dan gambut adalah sangat jarang dilakukan oleh masyarakat. Tidak mengherankan sekitar 33% responden menyatakan motivasi untuk memperoleh pendapatan dari pemanfaatan air tidak memotivasi, 29% responden menyatakan kurang memotivasi, 26% responden menyatakan cukup memotivasi, dan hanya ada sekitar 8% responden yang menyatakan memotivasi dan 3% responden menyatakan sangat memotivasi.



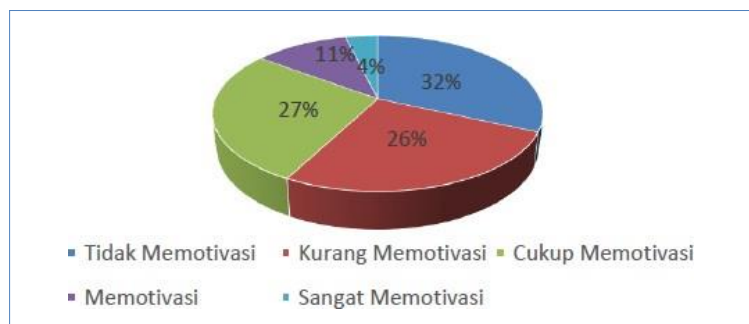
Gambar 153. Kebutuhan Memperoleh Pendapatan Dari Insentif Pemerintah

Hasil studi terkait dengan motivasi untuk memperoleh insentif dari pemerintah menurut 31% responden adalah cukup memotivasi, 28% responden menyatakan tidak memotivasi, 19% responden menyatakan kurang memotivasi, ada 12% responden menyatakan memotivasi dan 9% responden menyatakan sangat memotivasi.

IX.2.2. Motivasi Sosial Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Mangrove/Gambut

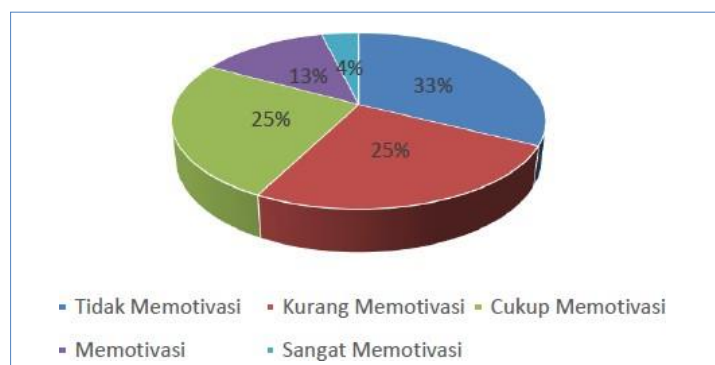
Konsep motivasi sosial adalah motivasi untuk pemanfaatan sumberdaya hutan mangrove dan gambut, yang berkaitan erat dengan kebutuhan secara pribadi maupun kebutuhan sebagai makhluk sosial atau bagian dari masyarakat. Penilaian dengan skoring menunjukkan bahwa motivasi sosial ini berada dalam kategori kurang memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan.

Motivasi untuk memperoleh pengakuan dari pihak lain seperti kebanggaan sosial menurut 32% responden adalah tidak memotivasi, 27% responden menyatakan cukup memotivasi dan 26% responden menyatakan kurang memotivasi, sedangkan 11% responden menyatakan memotivasi dan 4% responden menyatakan sangat memotivasi.



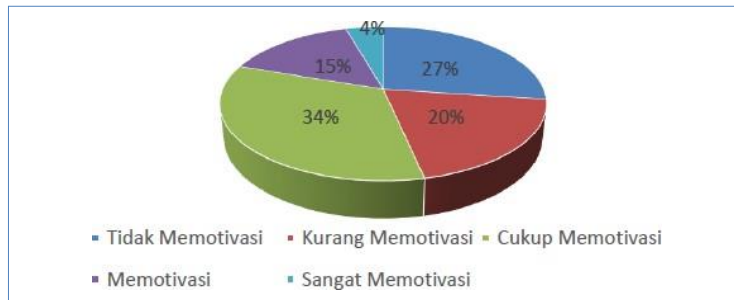
Gambar 154. Kebutuhan Memperoleh Pengakuan Dari Pihak Lain (Kebanggaan Sosial)

Hasil survei terkait dengan motivasi sosial kebutuhan untuk berkontribusi kepada komunitas menunjukkan sekitar 33% responden menyatakan tidak memotivasi, 25% responden menyatakan kurang memotivasi, 25% responden lainnya menyatakan cukup memotivasi. Adapun 13% responden menyatakan memotivasi dan hanya 4% responden saja menyatakan sangat memotivasi.



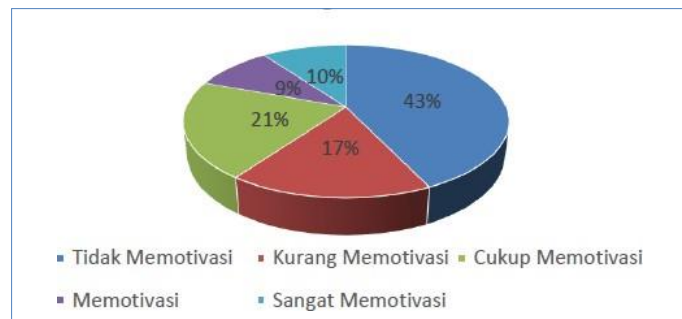
Gambar 155. Kebutuhan Berkontribusi Kepada Komunitas

Studi ini menunjukkan kebutuhan untuk memperoleh eksistensi dari kegiatan konservasi sumber daya alam ternyata cukup memotivasi yaitu bagi 34% responden, meskipun 27% responden menyatakan tidak memotivasi dan 20% responden lainnya menyatakan kurang memotivasi, adapun 15% responden lainnya menyatakan memotivasi dan 4% responden menyatakan sangat memotivasi.



Gambar 156. Kebutuhan Memperoleh Eksistensi Konservasi SDA

Terkait dengan dapun kebutuhan untuk menjalankan ajaran agama, maka hasil survei secara detail menunjukkan sekitar 43% responden adalah tidak memotivasi, 21% responden menyatakan cukup memotivasi, 17% responden lainnya menyatakan kurang memotivasi, adapun 9% responden menyatakan memotivasi dan 10% responden menyatakan sangat memotivasi.

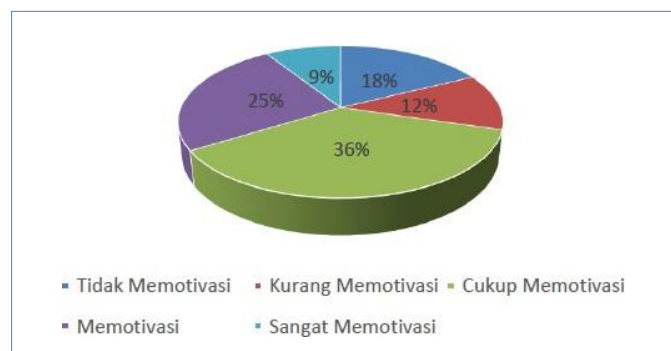


Gambar 157. Kebutuhan Untuk Menjalankan Ajaran Agama

IX.2.3. Motivasi Lingkungan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Mangrove/Gambut

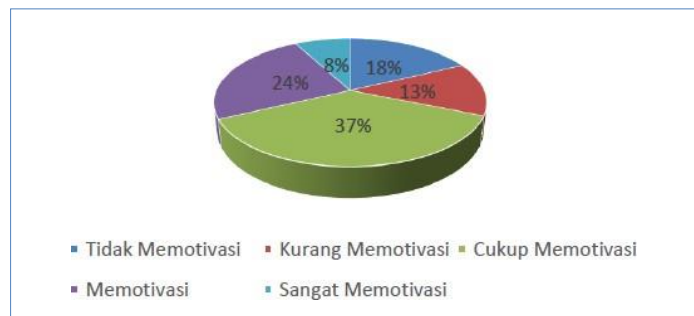
Konsep dari motivasi lingkungan adalah motivasi atau alasan pemanfaatan sumberdaya hutan mangrove dan gambut untuk kelestarian lingkungan. Penilaian terhadap motivasi lingkungan dengan skoring dari hasil studi ini memberikan hasil cukup memotivasi bagi responden untuk memanfaatkan.

Motivasi lingkungan berupa kebutuhan untuk mengurangi banjir yang cukup memotivasi bagi sekitar 36% responden, 25% responden lainnya menyatakan memotivasi, 18% responden lainnya menyatakan tidak memotivasi, 12% responden menyatakan kurang memotivasi dan 9% responden yang menyatakan sangat memotivasi.



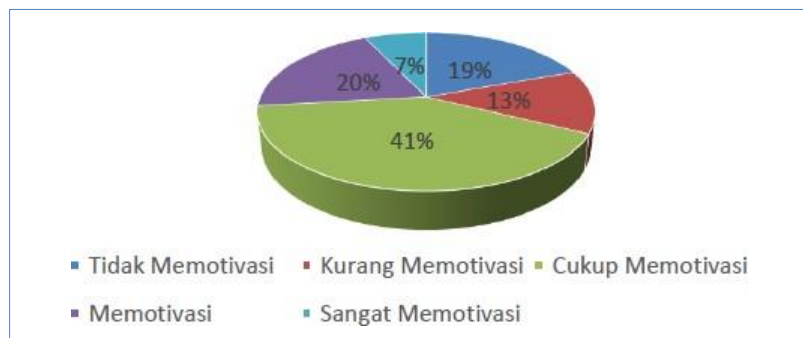
Gambar 158. Kebutuhan Untuk Mengurangi Banjir

Hasil studi menunjukkan kebutuhan untuk mengurangi erosi (yaitu konservasi tanah/lahan) adalah menunjukkan 37% responden cukup memotivasi, 24% responden menyatakan memotivasi, 18% responden menyatakan tidak memotivasi, 14% responden menyatakan kurang memotivasi dan 8% menyatakan sangat memotivasi untuk memanfaatkan.



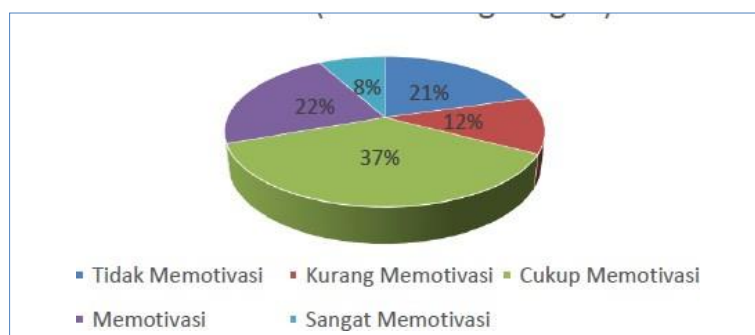
Gambar 159. Kebutuhan Untuk Mengurangi Erosi (Konservasi Tanah/Lahan)

Motivasi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan memperoleh daerah tangkapan air atau sumber air menurut 41% responden adalah cukup memotivasi meskipun secara umum masyarakat tidak memanfaatkan air dari hutan mangrove dan gambut. Terdapat 20% responden yang menyatakan memotivasi, 19% responden menyatakan tidak memotivasi, 13% responden menyatakan kurang memotivasi, dan 7% responden menyatakan sangat memotivasi.



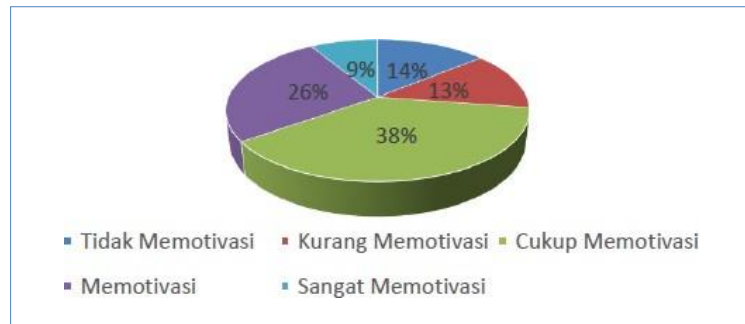
Gambar 160. Kebutuhan Untuk Memperoleh Daerah Tangkapan Air

Hasil survei terkait motivasi lingkungan untuk pengembangan ekowisata (wisata lingkungan) adalah cukup memotivasi sekitar 37% responden untuk memanfaatkan, 22% responden menyatakan memotivasi, 21% responden yang menyatakan tidak memotivasi dan 12% responden menyatakan kurang memotivasi, hanya 8% responden yang menyatakan sangat memotivasi.



Gambar 161. Kebutuhan Pengembangan Wisata Lingkungan (Ekowisata)

Terkait dengan motivasi lingkungan lainnya adalah kebutuhan untuk memperbaiki kualitas sumberdaya hutan yaitu berupa tumbuhan, hewan dan lingkungan. Motivasi lingkungan dari studi ini menunjukkan 38% responden cukup memotivasi, 26% responden menyatakan memotivasi, 14% dari responden menyatakan tidak memotivasi, 13% responden lainnya menyatakan kurang memotivasi, dan terdapat 9% responden yang menyatakan sangat memotivasi untuk memanfaatkan.



Gambar 162. Kebutuhan Untuk Memperbaiki Kualitas Sumber Daya Hutan Tumbuhan, Hewan dan Tumbuhan

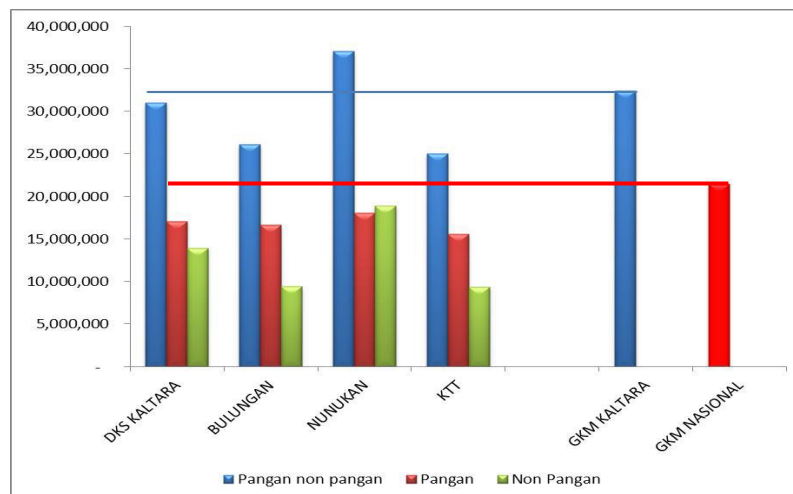
BAGIAN XI: ANALISIS TENTANG PENDAPATAN RUMAH TANGGA DAN KEMISKINAN

Garis Kemiskinan merupakan indikator kemiskinan nasional sebagai penjumlahan dari angka garis kemiskinan pangan dan garis kemiskinan non pangan. Dalam konsep ini, maka penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita pertahun dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan makanan adalah merupakan nilai dari pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori perkapita perhari. Sementara Garis Kemiskinan Non Makanan adalah menakup kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, aspek pendidikan dan kesehatan dan lain-lain.

Indikator kemiskinan di kawasan perkotaan serta kawasan pedesaan Indonesia adalah sebesar Rp. 404.398 perkapita perbulan atau setara dengan nilai Rp. 21.497.789 per keluarga pertahun. Hal ini terdiri pengeluaran rumah tangga untuk kelompok pangan sebesar Rp. 16.651.413 dan non pangan Rp. 5.954.877. Penduduk yang memiliki pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan non pangan pertahun di bawah garis kemiskinan akan dikategorikan sebagai miskin. Angka Garis Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara adalah Rp. 609.733 setara dengan Rp. 32.413.406 pertahun (rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga 4.43 orang). Kelompok pangan Rp. 25.425.365 dan non pangan Rp. 9.203.910. (BPS. 2019).

Survei yang dilakukan menemukan rata-rata pendapatan penduduk di lanskap Delta Kayan Sembakung yaitu dari Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung dengan jumlah 2.005 responden sebagai sampel yang tersebar dalam 22 desa adalah berada dibawah dan di atas tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara. Pendapatan rata-rata penduduk Delta Kayan Sembakung di Provinsi Kalimantan Utara adalah Rp. 584.626 perjiwa perbulan atau setara dengan Rp. 31.067.676 (rata-rata jiwa per rumah tangga 4.43 orang).

Berdasarkan kategori dari pengeluaran pangan Rp. 17.126.678 dan non pangan Rp.13.941.008 pertahun per rumah tangga, maka tingkat pendapatan penduduk di wilayah Delta Kayan Sembakung Provinsi Kalimantan Utara berada di atas level kemiskinan nasional tetapi dibawah tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara, kecuali Kabupaten Nunukan yang berada di atas level kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana terlihat dalam Gambar berikut ini.

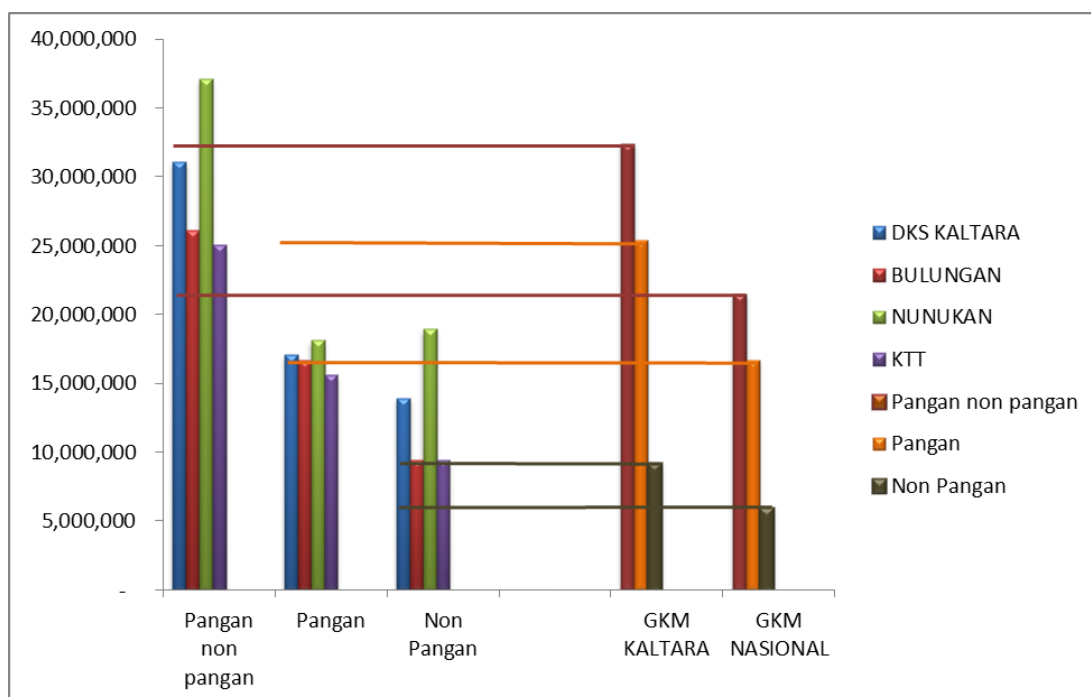


Gambar 163. Pendapatan Rumah Tangga Delta Kayan Sembakung

Pendapatan rumah tangga dalam kategori kelompok pangan maupun kelompok non pangan di Kabupaten Tana Tidung tergolong paling rendah. Angka kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung adalah disebabkan karena daya dukung sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang terbatas serta wilayah yang dominan berada dalam daerah aliran sungai.

Berdasarkan kelompok pangan dan kelompok non pangan secara regional maupun nasional, maka secara keseluruhan wilayah studi terjadi kemiskinan pangan dan berada di bawah angka Garis Kemiskinan Kalimantan Utara dan di atas level Nasional. Pendapatan rumah tangga dari kelompok pangan di wilayah studi ini sebesar Rp. 17.126.678 dan ada di bawah Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Rp. 25.425.365 dan sedikit di atas Garis Kemiskinan Nasional Rp. 16.651.413.

Sedangkan pengeluaran non pangan dalam wilayah studi sebesar Rp. 13.941.008 berada di atas Garis Kemiskinan provinsi Kalimantan Utara Rp. 9.203.910 dan tingkat Nasional yang hanya sebesar Rp. 5.954.877 sebagaimana terlihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 164. Pendapatan Rumah Tangga dan Garis Kemiskinan Delta Kayan Sembakung

Survei di Bulungan mencakup Desa Liagu, Desa Salimbatu, Desa Tanjung Buka dan Desa Tanah Kuning dengan total sampel adalah 462 orang. Hasil survei menunjukkan rata-rata pendapatan rumah tangga adalah sebesar Rp. 486.860 perbulan perjiwa atau setara dengan Rp. 26.113.426 pertahun dengan setiap rumah tangga terdiri dari 4.47 orang. Angka ini berada di atas Garis Kemiskinan secara nasional, tetapi dalam skala regional maka warga penduduk di kawasan Delta Kayan Sembakung dari Kabupaten Bulungan dapat dikategorikan miskin dan ada di bawah garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan pendapatan kelompok pangan Rp. 16.650.127 yang berada dibawah angka Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara dan di atas Nasional. Sedangkan kelompok non pangan yaitu Rp. 9.463.299 adalah berada di atas Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional. Dengan demikian, maka penduduk Delta Kayan Sembakung yang masuk dalam Kabupaten Bulungan ini dapat dikategorikan miskin pangan secara regional di Provinsi Kalimantan Utara.

Lokasi studi di Kabupaten Tana Tidung adalah mencakup Desa Bebatu, Desa Rian, Desa Sengkong, Desa Sepala Dalung, Desa Tengku Dacing dan Desa Tideng Pale yang merupakan wilayah

dalam daerah aliran Sungai Sesayap memiliki pendapatan rata-rata perjiwa yaitu adalah Rp. 536.118 perbulan. Nilai ini setara dengan pendapatan satu tahun sebesar Rp. 25.029.271 dengan jumlah rata-rata keluarga rumah tangga 3.89 orang. Nilai pendapatan dari kelompok pangan perbulan yaitu sebesar Rp. 334.538 atau setara dengan angka Rp. 15.618.288 pertahun, sementara non pangan adalah Rp. 201.580 yang setara dengan dengan 9.410.983 pertahun.

Tingkat pendapatan tersebut adalah berada di bawah Garis Kemiskinan Nasional dan regional Provinsi Kalimantan Utara, terkecuali pendapatan non pangan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Rp. 9.203.910 yaitu dengan selisih sebesar Rp. 207.073 dengan kategori sangat rentan terhadap kemiskinan.

Sementara di Kabupaten Nunukan maka wilayah studi ini 12 Desa yang meliputi Kecamatan Nunukan (Desa Tanjung Harapan dan Binusan), Kecamatan Sebuku (Desa Apas, Kekayap, Kunyit, Tetaban), serta Kecamatan Sembakung (Desa Butas Bagu, Katul, Lubakan, Tagul, Manuk Bungkul dan Desa Tepian). Hasil studi menunjukkan pendapatan perjiwa adalah Rp. 656.736 yaitu setara dengan pendapatan setahun Rp. 37.083.466 dengan jumlah rata-rata jiwa perkeluarga adalah 4.71 orang. Nilai pendapatan pangan adalah Rp. 18.128.294 dan non pangan Rp. 18.955.193 pertahun atau sebesar Rp. 321.046 dan Rp. 335.690 perjiwa perbulan.

Kondisi ini berada di atas kategori Garis Kemiskinan Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan tergolong lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten, Tana Tidung untuk seluruh kelompok pendapatan di kawasan Delta Kayan Sembakung. Data ini menunjukkan untuk pendapatan kategori non pangan lebih besar daripada pangan dan terjadi peningkatan sebesar 2,77% (BPS Kabupaten Nunukan, 2018)

Pendapatan rumah tangga dari penduduk dalam wilayah Delta Kayan Sembakung di Provinsi Kalimantan Utara dalam kategori kelompok pangan non pangan sebesar Rp. 31.067.676, kelompok pangan Rp. 17.126.678 dan non pangan 13.941.008. Kabupaten Nunukan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung untuk seluruh jenis kelompok pendapatan.

Dalam konteks ini, maka Kabupaten Tana Tidung berada dalam posisi paling rendah untuk seluruh jenis kelompok pendapatan di wilayah Delta Kayan Sembakung sebagaimana ditampulkan dalam Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Tingkat Pendapatan Rumah Tangga Delta Kayan Sembakung

Kabupaten	Pangan Pangan	Non Pangan	Non Pangan
Bulungan	26.113.426	16.650.127	9.463.299
Nunukan	37.083.466	18.128.294	18.955.193
Tana Tidung	25.029.271	15.618.288	9.410.983
DKS	32.413.406	25.425.365	9.203.910

Sumber: Data Primer (2019)

Tabel 12 berikut menunjukkan berbagai kondisi tingkat kemiskinan rumah tangga di lanskap Delta Kayan Sembakung. Kelompok pangan non pangan adalah di bawah angka Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara dan berada di atas Garis Kemiskinan Nasional. Sementara kelompok non pangan berada di atas Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional, kecuali di Kabupaten Nunukan dimana kelompok pangan berada di bawah Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan kelompok pendapatan lainnya di atas regional maupun nasional.

Tabel 12. Kondisi Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Delta Kayan Sembakung

KABUPATEN	KALTARA			NASIONAL		
	Pangan Non Pangan	Pangan	Non Pangan	Pangan Non Pangan	Pangan	Non Pangan
Bulungan	<i>Dibawah</i>	<i>Dibawah</i>	<i>Diatas</i>	<i>Diatas</i>	<i>Dibawah</i>	<i>Diatas</i>
Nunukan	<i>Diatas</i>	<i>Dibawah</i>	<i>Diatas</i>	<i>Diatas</i>	<i>Diatas</i>	<i>Diatas</i>
Tana Tidung	<i>Dibawah</i>	<i>Dibawah</i>	<i>Diatas</i>	<i>Diatas</i>	<i>Dibawah</i>	<i>Diatas</i>
DKS	<i>Dibawah</i>	<i>Dibawah</i>	<i>Diatas</i>	<i>Diatas</i>	<i>Diatas</i>	<i>Diatas</i>

Sumber: Data Primer (2019)

Dari hasil survei ini menunjukkan pendapatan dari penduduk Delta Kayan Sembakung dapat dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu bawah miskin, tengah miskin dan atas kemiskinan dengan standar pendapatan per kapita per bulan disajikan dalam bentuk distribusi pendapatan pada Tabel 3.5 Rumah tangga yang memiliki pendapatan terendah (miskin bawah) $\leq$ Rp. 315.000 adalah sebanyak 32,32%, miskin tengah dengan pendapatan Rp. 316.000 s/d Rp. 609.000 sebanyak 40,58% dan rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas kemiskinan yaitu $>$ Rp. 610.000 sebanyak 27,10%, dan ada sebanyak 9,90% responden yang memiliki pendapatan tinggi.

Tabel 13. Distribusi Pendapatan Penduduk Delta Kayan Sembakung

Rentang Pendapatan (<i>Rupiah</i>)	Frekwensi (Orang)	%
25.000 - 315.000	2.870	32.32
316.000 - 609.000	3.603	40.58
610.000 - 903.000	1.527	17.20
904.000 - 1.197.000	482	5.43
1.198.000 - 1.491.000	216	2.43
1.492.000 - 1.785.000	91	1.02
1.786.000 - 2.079.000	42	0.47
2.080.000 - 2.373.000	24	0.27
2.374.000 - 2.667.000	13	0.15
2.668.000 - 2.961.000	2	0.02
2.962.000 - 3.255.000	1	0.01
3.256.000 - 3.549.000	7	0.08
3.550.000 - 4.200.000	1	0.01
JUMLAH	8.879	100

Sumber: Data Primer (2019)

Mengacu kepada angka perbandingan pendapatan penduduk di wilayah survei secara per kapita per bulan berdasarkan dengan Garis Kemiskinan Nasional yaitu Rp. 404.398, maka terdapat sekitar 47,80% penduduk di Delta Kayan Sembakung adalah berada dibawah angka garis kemiskinan. Sedangkan berdasarkan angka Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 609.733, maka terdapat sekitar 72,90% penduduk Delta Kayan Sembakung berada dibawah garis kemiskinan.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penduduk Delta Kayan Sembakung secara ekonomi adalah tergolong miskin serta sebanyak 32,32% berada dalam kategori sangat miskin. Kemiskinan wilayah ini dimungkinkan, karena terdapat sebanyak 125 (27,96%) desa sangat tertinggal maupun 220

(49,22%) desa tertinggal dari 447 desa yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (DPMD Provinsi Kalimantan Utara, 2018). Selama kurun waktu 4 tahun (2014 -2018), maka jumlah desa tertinggal ini telah berkurang hanya menjadi 46 desa, dan yang masuk desa mandiri bertambah hanya 4 desa.

Sedangkan berdasarkan topografi wilayah, maka dominan berada di daerah dataran rendah dan pesisir yang tergantung kepada pertanian sub sisten dan perikanan. Ada sebanyak 332 (68,88%) desa yang berada di daerah dataran, dan 51 desa yang berada di wilayah puncak/lereng (10,58%) dan sisanya adalah berada di lembah (BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2018).

BAGIAN XII: KESIMPULAN

XII.1. KESIMPULAN

Survei sosial ekonomi budaya masyarakat desa di sekitar kawasan Delta Kayan Sembakung telah memberikan banyak gambaran yang penting untuk dapat dicermati dalam penyusunan berbagai program dan kegiatan pengelolaan hutan mangrove dan lahan gambut yang lestari dan berkelanjutan. Secara umum, beberapa kesimpulan dari hasil survei ini adalah sebagai berikut:

1. Wilayah studi adalah desa-desa yang terletak di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.247,50 km² dengan total jumlah populasi yaitu 193.900 jiwa, dan memiliki kepadatan penduduk sebesar 13,50 jiwa/km², Kabupaten Bulungan memiliki luas wilayah sebesar 13.181,92 km² dan jumlah populasi yaitu 136.204 jiwa dengan kepadatan penduduk 10,33 jiwa/km². Sedangkan Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah yang mencapai 4.828,58 km² dengan jumlah populasi 28.926 jiwa dan kepadatan penduduk 5,75 jiwa/km²;
2. Etnis asli dan terbesar di wilayah studi adalah Suku Tidung (37%), Suku Bugis sebesar 31%, Suku Bulungan 10%, Suku Agabag 7% dan suku-suku lainnya dengan persentase tidak lebih dari 1% dari total keseluruhan masyarakat. Suku-suku lain di antaranya adalah Suku Kayan, Kenyah, Banjar, Timor, dan Toraja. Masuknya etnis lainnya ke dalam wilayah ini dapat diterima dengan baik dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada secara bersama.
3. Kehadiran etnis lain di wilayah ini telah memunculkan keragaman dimensi sosial-budaya, dan uniknya tetap dapat hidup secara harmonis. Gotong royong masih menjadi budaya kebiasaan masyarakat, namun sikap tolong menolong antar warga masyarakat sangat rendah karena masyarakat memandang bahwa kehidupan pribadi adalah privasi antara anggota keluarga dan keluarga terdekat saja. Pelaksanaan upacara adat sudah jarang dilaksanakan namun sanksi adat masih banyak diberikan.

Besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat dari alam memunculkan persepsi untuk hidup selaras dengan alam. Mencari nafkah bagi masyarakat masih sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak untuk menumpuk kekayaan atau status sosial, meski demikian masyarakat menganggap bahwa masa depan yang lebih baik penting untuk dicapai.

4. Usia menikah laki-laki dan perempuan secara umumnya adalah di atas 18 tahun. Perempuan masih memegang peran yang utama untuk kegiatan domestik di dalam rumah tangga seperti pengasuh balita (74%), membersihkan rumah (92%), dan pengatur menu makanan (93%). Laki-laki berperan pada kegiatan produktif seperti mencari nafkah (74%), pengambil kayu bakar (25%) dan penentu jenis komoditas pertanian (32%).

Aktivitas sosial politik menunjukkan bahwa anak perempuan telah bersekolah (80%), suami (77%) menjadi wakil dalam musyawarah desa, suami (57%) mewakili dalam penyuluhan pertanian/ perkebunan/ kehutanan, namun dalam penyuluhan kesehatan 74% diwakili oleh perempuan. Keputusan bersama dilakukan dalam hal mengikuti Keluarga Berencana (42%), pendidikan anak (76%), dan perkawinan anak (65%). Pada keadaan terbatas maka prioritas untuk sekolah diberikan kepada anak yang pintar (33%).

5. Indeks kesejahteraan dan kemiskinan di wilayah studi secara umum berada dalam kondisi sedang dan baik. Kesejahteraan subjektif pada kondisi baik di semua wilayah studi, demikian pula lingkungan inti yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif seperti kesehatan, kekayaan materi dan pengetahuan pada kondisi baik. Lingkungan konteks aspek sosial berpengaruh baik, sedangkan aspek alam, ekonomi, dan politik pada kondisi sedang. Adapun aspek sarana dan pelayanan yang mempengaruhi lingkungan konteks berada pada kondisi sedang.

Desa-desanya yang berada dalam kategori kondisi kritis untuk aspek ekonomi adalah Desa Liagu di Kabupaten Bulungan, Desa Apas, Desa Binusan, Desa Kekayap, Desa Lubakan dan Desa Tagul di Kabupaten Nunukan. Desa dalam kondisi kritis untuk lingkungan alam adalah di Desa Sepala Dalung di Kabupaten Tana Tidung dengan beberapa Desa Apas, Desa Lubakan, Desa Tagul dan Desa Tanjung Harapan di Kabupaten Nunukan.

Pada aspek politik, terdapat dua desa dengan kondisi kritis yaitu Desa Tanah Kuning dan Desa Tanjung Buka di Kabupaten Nunukan. Desa Bebatu (Kabupaten Tana Tidung), Desa Lubakan, Desa Manuk Bungkul, Desa Tagul, Desa Tepian dan Desa Tetaban (Kabupaten Nunukan) adalah merupakan desa-desa dengan kondisi aspek sarana dan pelayanan kritis.

6. Pengetahuan masyarakat tentang hutan mangrove dan gambut pada kategori tinggi artinya mereka mengetahui keberadaan dan letak dari hutan mangrove dan gambut dan telah menjadi bagian dari sistem penghidupan masyarakat di Delta Kayan dan Sembakung. Pengelolaan untuk kelestarian hutan mangrove dan gambut masih sangat minim dilakukan, padahal masyarakat memahami pentingnya kegiatan pengelolaan kelestarian hutan mangrove dan gambut, serta berharap semua pihak seperti pemerintah pusat, daerah, LSM, swasta dan masyarakat dapat terlibat. Pemanfaatan hutan mangrove dan gambut oleh masyarakat masih terbatas pada kegiatan budidaya dan perikanan, namun tidak selalu menjadi sumber mata pencaharian utama;
7. Persepsi responden terhadap nilai manfaat penggunaan, nilai manfaat fungsional/ekologis, nilai manfaat pilihan dan nilai manfaat keberadaan sumberdaya hutan mangrove/gambut berada dalam kategori tingkat cukup bermanfaat. Manfaat ekonomi dan lingkungan sumberdaya hutan mangrove dan gambut cukup memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan, dan sedangkan manfaat sosial kurang memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan;
8. Rata-rata pendapatan penduduk di wilayah studi yang meliputi 22 desa dan 2005 responden di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung berada dibawah tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara.

Pendapatan rata-rata penduduk Delta Kayan Sembakung Provinsi Kalimantan Utara adalah sekitar Rp. 584.626 per jiwa perbulan atau setara Rp. 31.067.676 (rata-rata jiwa per rumah tangga 4.43 orang). Berdasarkan kategori pengeluaran pangan adalah Rp. 17.126.678 dan non pangan Rp.13.941.008 pertahun per rumah tangga.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penilaian aspek sosial ekonomi budaya masyarakat di desa-desa sekitar Kawasan Delta Kayan Sembakung diharapkan akan memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun para pihak dalam pengembangan strategi maupun program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mendukung kelestarian sumber daya alam.

TENTANG PROPEAT

Peatland Management and Rehabilitation Project (PROPEAT) merupakan salah satu proyek kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman melalui Kementerian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development - BMZ) dan diimplementasikan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Kerusakan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan GIZ (The German Agency for International Cooperation).

Tujuan utama PROPEAT adalah perbaikan pengelolaan ekosistem gambut dan lahan basah di Kalimantan Utara dengan Kalimantan Timur lebih berkelanjutan secara ekologis. Hal ini dapat dicapai melalui proses perencanaan integratif dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lestari; mendukung perbaikan praktek pengelolaan gambut dan lahan basah; dan mendiseminasikan hasil penelitian aplikatif dan pembelajaran di lapangan ke berbagai stakeholder baik di level lokal, nasional dan internasional.

PROPEAT bekerja di 2 (dua) Provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang memiliki 16 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas 342.000 hektar di Kalimantan Timur dan 13 KHG di Kalimantan Utara dengan luas 347.451 hektar. Di Kalimantan Utara, area KHG mencakup Kabupaten Tana Tidung, Nunukan dan sebagian kecil di Kabupaten Malinau. Di Kalimantan Timur, lahan gambut tersebar utamanya di wilayah Mahakam Tengah meliputi kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat serta sebagian kecil di Kabupaten Berau dan Kabupaten Paser.

Bersama dengan mitra utama dan para pihak, PROPEAT mendukung berbagai kegiatan terkait pengembangan informasi dasar, penyusunan kebijakan perencanaan yang terpadu, implementasi pengelolaan tata guna lahan berkelanjutan, memperkuat pengembangan mata pencaharian dan ekonomi, pelaksanaan riset aksi, dan juga mendukung proses penyebaran pengetahuan, pembelajaran dan praktik manajemen terbaik.



GIZ Peatland Management and Rehabilitation Project (PROPEAT)

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Kesuma Bangsa, Samarinda

Provinsi Kalimantan Timur 75124

Phone +62 (541) 75121



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur,

Gedung B Lantai 3 – Indonesia 13410

Telp/Fax : +62 21-8520886/8580105



Kantor Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Jl. Agathis, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor

Provinsi Kalimantan Utara 77216

Phone +62 (552) 203388